

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

- **Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional**
Denik Iswardani Witarti

- **Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Dan Budaya Studi Kasus: Parlemen India Dan Mesir**
Jeanie Annissa

- **The Role Of NGO & Women Empowerment In The Peacebuilding Process Of Aceh Conflict**
Ronald Roger Rohrohmana

- **Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan Transnasional Dalam Rangka Implementasi Cedaw Di Malaysia**
Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli

- **NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita Studi Kasus: National Council Of Women's Organizations (NCWO) Di Malaysia**
Yuni Satia Rahayu

- **Pengaruh Feminisme Global Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia**
Yusran



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Budi Luhur

Transnasional

Jurnal Ilmu Hubungan Internasional

Penanggung jawab:
Dekan FISIP

Pemimpin Redaksi:
Rusdiyanta, S.IP, M.Si

Dewan Redaksi:
Denik Iswardani Witarti, Ph.D
Bambang Pujiyono, MM, M.Si
Arin Fithriana, S.IP, M.Si
Yusran, S.IP, M.Si

Reviewer
Dato' Dr. Junaidi Abubakar
(Universiti Kebangsaan Malaysia)
Denik Iswardani Witarti, Ph.D
(Universitas Budi Luhur)
Dr. Lili Romli
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Sekretariat
Samsinar, M.Kom

Alamat Redaksi:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur
Jln. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260
Telp. (021) 5853753 Ext. 252

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Beberapa tanggapan telah kami terima, sehubungan dengan beberapa edisi penerbitan jurnal ini sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih atas saran, kritik dan komentar yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini.

Penerbitan pada edisi ini merupakan makalah yang terpilih dari Seminar Nasional “Peran NGO Dalam Perlindungan Hak Perempuan” pada tanggal 25 April 2011 dan telah direvisi.

Kami telah berusaha mengelaborasi ruang lingkup studi hubungan internasional pada setiap edisinya. Untuk edisi ini, kami menampilkan ragam topik di antaranya tulisan Denik Iswardani Witarti tentang Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional, Jeanie Annissa tentang Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Dan Budaya Studi Kasus: Parlemen India Dan Mesir, Ronald Roger Rohrohmana tentang *The Role Of NGO & Women Empowerment In The Peacebuilding Process Of Aceh Conflict*, Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli tentang Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan Transnasional Dalam Rangka Implementasi CEDAW Di Malaysia, Yuni Satia Rahayu tentang NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita Studi Kasus: national Council Of Women’s Organizations (NCWO) Di Malaysia, Yusran tentang Pengaruh Feminisme Global Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia.

Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat bagi bagi para pembaca.

Kemanfaatan ini sangat tergantung pada kontribusi tulisan-tulisan yang masuk pada redaksi. Selamat membaca

Jakarta, Desember 2011

Salam kami,

Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

<i>Denik Iswardari Witarti</i>	Gerakan Perempuan Malaysia: Kajian Gerakan Transnasional	1-15
<i>Jeanie Annissa</i>	Kedudukan Perempuan Dalam Berpolitik Ditinjau Dari Perspektif Pembangunan Dan Budaya Studi Kasus: Parlemen India Dan Mesir	16-27
<i>Ronald Roger Rohrohmana</i>	<i>The Role Of NGO & Women Empowerment In The Peacebuilding Process Of Aceh Conflict</i>	28-36
<i>Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli</i>	Peranan NGO Sebagai Representasi Perempuan Transnasional Dalam Rangka Implementasi CEDAW Di Malaysia	37-54
<i>Yuni Satia Rahayu</i>	NGO Dan Perkembangan Gerakan Wanita Studi Kasus : National Council Of Women's Organizations (NCWO) Di Malaysia	55-74
<i>Yusran</i>	Pengaruh Feminisme Global Terhadap Gerakan Wanita Di Indonesia	75-92

GERAKAN PEREMPUAN MALAYSIA: KAJIAN GERAKAN TRANSNASIONAL

Denik Iswardani Witarti

deni_kiss@yahoo.com, denik.iswardani@budlihur.ac.id

ABSTRACT

Feminism and gender issues have become one of the subjects in the study of international relations. The emergence of these issues through a long process and is the result of the struggle of the women's movement across borders. This paper describes and analyzes the developments about the women's movement by using a transnational approach. This approach is able to bridge the local women's issues to be discussed as a global issue of women. It also describes the development of woman's issues, particularly discussing about the major problems of women in the world. This paper focuses on women's movement in Malaysia as a case study to clarify the phenomenon. This study found that the international women's conference has an important role in building women's networks in order to fight for the rights of women. Finally, this paper concludes that the women's movement has the character and the different problems in each country.

Keywords: *Transnational issues, Feminism, Social movement, Women movement*

PENDAHULUAN

Beberapa kajian (Baylis & Smith, 2006; Burchill, 2001; Ticker, 2002) menyebutkan bahwa pada awalnya ilmu hubungan internasional merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang sangat maskulin dan patriarkal. Ilmu hubungan internasional di awal perkembangannya menekankan kepada masalah-masalah *high politics* misalnya keamanan, perang, dan perdamaian yang dianalisa berdasarkan kepentingan kaum laki-laki. Hal tersebut terus mendominasi bahkan ketika pendekatan ekonomi politik muncul dalam perkembangan ilmu hubungan internasional. Konsep-konsep yang dikembangkan hampir semuanya merefleksikan kepentingan laki-laki.

Masuknya isu gender sebagai bagian dalam studi ilmu hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dengan sejarah gerakan perempuan yang terjadi sejak beberapa abad silam di Eropa. Perjuangan kaum perempuan dalam menuntut hak-haknya dipelopori oleh Lady Mary Wotrley dan Marquis de Condorcet di Middleburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Mereka mengkaji bahwa keadaan mayoritas kaum perempuan yang buta huruf dan tidak mempunyai keahlian merupakan penyebab ketertinggalan mereka. Oleh karena itu hal utama yang dituntut adalah adanya perubahan sistem sosial sehingga memungkinkan wanita mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.

Namun perjuangan mereka kurang mendapat dukungan yang maksimal. Seabad kemudian gerakan perempuan kembali muncul. Seiring dengan revolusi industri yang sedang terjadi, perjuangan mereka lebih menumpukan kepada masalah-masalah ketidakadilan dalam gaji, hak untuk memperoleh cuti haid, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan.¹

Meskipun berawal di Eropa, tetapi gerakan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan ketika terjadi di Amerika Serikat. Perjuangan wanita di Amerika Serikat ini menandai lahirnya gerakan feminisme dunia yang dikenal sebagai Feminisme Gelombang Pertama. Buku karya Mary Wollstonecraft yang berjudul *Vindication of the Rights of Women* yang diterbitkan pada tahun 1792 telah menandai lahirnya feminisme gelombang pertama. Kaum feminis pada masa ini menumpukan perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik dan kesempatan ekonomi yang sama bagi kaum perempuan. Pada masa ini, kaum feminis liberal menjadi motor penggerak perjuangan. Keberhasilan utama mereka adalah memperoleh hak pilih dalam pemilu pada tahun 1920. Kaum feminis juga berhasil memenangkan hak kepemilikan bagi perempuan, kebebasan reproduksi yang lebih dan akses yang

lebih besar dalam bidang pendidikan dan profesional.²

Gerakan feminis kembali berkembang sekitar tahun 1960-an. Kali ini tidak hanya negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa saja yang terdorong untuk menggalakan kembali gerakan tersebut. Gerakan pada periode ini disebut sebagai gerakan feminisme Gelombang Kedua. Gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis).³ Feminisme gelombang kedua ditandai oleh penerbitan buku *The Second Sex* yang ditulis oleh Simone de Beauvoir's. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa perbedaan gender bukan berakar dari biologi, tetapi memang sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap kaum perempuan. Kaum feminis gelombang kedua lebih radikal dalam perjuangannya untuk merubah setiap aspek kehidupan pribadi, ekonomi dan politik.⁴ Pada tahun 1980 gerakan perempuan memasuki fase yang dikenal sebagai feminisme gelombang ketiga. Kaum feminis pada masa ini menginginkan keragaman

¹ Soenarti Djajanegara. 2000. *Kritik Sastra Feminis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1-14

² Cudd, Ann E & Robin O. Andreasen (ed). 2005. *Feminist Theory; A Philosophical Anthology*. Blackwell Publishing Ltd.

³ Soenarti Djajanegara, hlm. 1-14.

⁴ Cudd, hlm. 8

perempuan (women's diversity) atau keragaman secara umum. Misalnya mengenai kepentingan perempuan kulit berwarna yang kurang terwakili oleh kaum feminis gelombang kedua yang didominasi oleh wanita kulit putih yang berasal dari kelas menengah.⁵

Perjuangan gerakan perempuan semakin berkembang di seluruh dunia dan menemukan momentum ketika untuk memperingati 50 tahun berdirinya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Pertemuan Perempuan Sedunia yang menghasilkan Deklarasi Beijing. Pertemuan yang diselenggarakan di bulan September 1995 tersebut telah menandai masuknya isu-isu gender sebagai salah satu agenda penting dalam arena politik internasional. Isu gender berkembang semakin cepat seiring dengan laju keterbukaan di berbagai bidang terutama media massa yang membantu penyebaran isu-isu gender ke seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan strategi yang dikemukakan oleh Karen Beckwith

(2005) untuk memahami dan menganalisis gerakan perempuan di suatu negara. Pertama, pendekatan strategi lintas nasional (*cross-national*). Pendekatan ini mempunyai hipotesis bahwa gerakan perempuan di berbeda negara akan menghadapi kesempatan, kondisi dan tantangan yang berbeda juga. Cara-cara yang digunakan gerakan perempuan juga akan berbeda, misalnya dalam merubah bentuk institusi politik, merubah praktek politik, dan menggeser konfigurasi kekuasaan yang ada.⁶ Kedua, pendekatan lintas jangkauan (*cross-scope*) yang sangat dekat dengan kajian ilmu hubungan internasional. Prinsip dasar pendekatan ini adalah membahas masalah-masalah nasional secara transnasional. Aktivitas transnasional didefinisikan sebagai interaksi satu dengan yang lain, dengan negara, dan dengan organisasi internasional untuk membentuk jaringan para aktivis, dan mereka mempunyai idea atau nilai-nilai yang berbeda yang mendorong pembentukannya.

Kedua pendekatan tersebut mampu menjelaskan bahwa masalah-masalah yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan di setiap negara adalah tidak sama tetapi tetap dapat

⁵ Dinar Dewi Kania. 2010. *Sejarah Feminisme Di Barat*. Jurnal Islamia http://uika-bogor.academia.edu/DinarKania/Papers/384769/History_of_Feminism diakses pada 2 April 2011.

⁶ Kriesi, Hanspeter. 1996. The organizational structure of new social movements in a political context. Dalam Doug McAdam, John D. McCarthy & Mayer N. Zald (ed). *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*, hlm. 152–84. Cambridge: Cambridge University Press.

diangkat dan dibahas pada level internasional. Hal ini semakin didukung oleh keterbukaan media massa secara global yang dapat dengan cepat menyebarkan ide atau masalah-masalah yang sedang dihadapi. Gerakan perempuan secara transnasional ini pada akhirnya bisa memberi inspirasi dan mendorong gerakan perempuan di tempat lain. Untuk mendapatkan analisa yang lebih terperinci, tulisan ini mengkaji gerakan perempuan di Malaysia.

DEFINISI GERAKAN PEREMPUAN

Karen Beckwith (2005: 583) mengidentifikasi gerakan perempuan sebagai suatu gerakan sosial dimana kaum perempuan yang diorganisasikan secara terbuka, menjadi aktor utama dan sebagai pemimpin, serta mengklaim identitas gender sebagai asas/dasar tindakan mereka. Gerakan perempuan merupakan bagian dari gerakan sosial pada umumnya. Definisi gerakan sosial menurut David Meyer dan Sidney Tarrow (1998) adalah "*collective challenges to existing arrangements of power and distribution by people with common purposes and solidarity, in sustained interaction with elites, opponents and authorities.*"

M. Dahlan Yacub Al-Barry (2001:92) mendefinisikan gerakan sosial dengan lebih tegas. Menurutnya, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana dan terorganisir yang

dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana yang ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan. Apabila mencermati definisi di atas, menunjukkan gerakan sosial dapat dilakukan tanpa harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Gerakan sosial mesti memiliki program yang terencana dan memiliki target untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini diperkuat oleh Yanti Muchtar (2000:7-8) yang menyatakan bahwa meskipun tidak memiliki massa, gerakan perempuan merupakan suatu gerakan sosial karena mampu menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat.

Definisi mengenai gerakan perempuan secara komprehensif sangat sulit dirumuskan karena mereka tidak berbicara dalam satu bahasa. Saskia E. Wieringa (1999:75) mendefinisikan gerakan wanita sebagai spektrum menyeluruh dari perbuatan individu atau kolektif baik secara sadar atau tidak sadar, kegiatan, kelompok atau organisasi yang menaruh perhatian terhadap berkurangnya berbagai aspek subordinasi gender yang dipandang sebagai penindasan berdasarkan pada preferensi kelas, ras, etnik, umur dan seks.

Definisi lain dikemukakan oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) (1978:26) yang merumuskan gerakan wanita sebagai perjuangan untuk

memperbaiki kedudukan wanita, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Hal inilah yang membedakan warna perjuangan emansipasi wanita di dunia. Ruang lingkup gerakan wanita meliputi berbagai bidang yaitu bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sedangkan, Sukanti Suryochondro (1984:26) mendefinisikan gerakan perempuan sebagai usaha kaum wanita melawan penindasan, untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan kaum lelaki. Definisi yang dibuat oleh Sukanti seakan-akan mewakili daripada kaum feminis liberal, yang hanya mengutamakan kesamaan hak dan kedudukannya dengan kaum lelaki. Hal ini bisa difahami karena memang definisi ini dibuat dalam konteks pasca kemerdekaan.

Definisi yang lebih luas disampaikan oleh Yanti Muchtar (2000:8) yang mengutip pendapat Alvarez. Definisi gerakan perempuan adalah sebuah gerakan sosial dan politik, yang terdiri dari sebagian besar wanita dan yang memperjuangkan keadilan gender. Alvarez dalam membuat ini tidak hanya mencakup organisasi perempuan milik pemerintah saja, tetapi juga termasuk organisasi perempuan milik partai politik atau di bawah organisasi massa tertentu atau organisasi yang bergerak tidak saja pada isu wanita.

KONFERENSI PEREMPUAN SEDUNIA

Gerakan-gerakan perempuan semakin mengglobal dengan diselenggarakannya beberapa konferensi internasional mengenai perempuan. Konferensi-konferensi tersebut menjadi ajang penting bagi para pejuang kaum perempuan untuk saling bertukar informasi, membangun jaringan dan mengangkat masalah-masalah perempuan secara global. *United Nations World Conference on Women* yang diselenggarakan pada bulan September 1995 di Beijing menjadi ajang pertemuan terbesar para aktivis pejuang wanita secara transnasional. Pada konferensi ini terjadi dua macam pertemuan resmi. Pertama, konferensi Perempuan Sedunia ke 4 yang dihadiri para utusan resmi dari negara-negara anggota PBB. Kedua, Pertemuan Forum Organisasi Perempuan Non-Pemerintah (*Forum NGO on Women*) yang dihadiri oleh perwakilan NGO perempuan dari seluruh dunia. Kedua kelompok peserta konferensi ini kemudian menghasilkan persetujuan sebagai suatu program aksi.⁷ Konferensi yang tersebut juga tidak saja menjadi arena komunikasi para aktivis pada level internasional tetapi juga menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya sumber-sumber transnasional dan jaringan bagi kaum

⁷ Murniati A. Nunuk P. 2004. Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM. Magelang: Indonesia Tera, hlm. 8

feminis. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan beberapa konferensi perempuan sedunia yang pernah diselenggarakan oleh PBB. dalam rangka globalisasi isu gender.

Tabel 1. Konferensi Perempuan Sedunia

1946	the commission on the status of women
1975	International Women's Year
1975	Mexico women's conference
1976-85	UN decade for women
1979	UN Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)
1980	Copenhagen women conference
1985	Nairobi women conference
1993	Vienna human rights conference
1994	Cairo internasional conference on population and development
1995	Beijing women's conference
2000	Beijing+5, New York
2002	Durban world conference against racism
2005	UN women's conference (review setelah 5 tahun Konferensi Beijing)

Sumber: diolah dari beberapa rujukan

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum Deklarasi Beijing, terdapat beberapa konferensi atau pertemuan perempuan sedunia. Konferensi di Beijing merupakan rangkaian dari Konvensi Perempuan Sedunia yang dimulai pada peringatan Tiga Dasawarsa PBB pada tahun 1975 yang juga ditetapkan sebagai Tahun Internasional Perempuan (*International Women's Year*). Pada peringatan tersebut muncul kesadaran perempuan untuk memperjuangkan "kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian". Konferensi Perempuan Sedunia pertama

diselenggarakan di Mexico menghasilkan deklarasi mengenai persamaan hak perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik.⁸

Pertemuan Perempuan Sedunia selanjutnya diselenggarakan di Copenhagen tahun 1980 yang menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW secara terstruktur menjelaskan mengenai konvensi HAM yang

⁸ Murniati A. Nunuk P, hlm. 6

menyebutkan satu demi satu hak-hak perempuan dan selanjutnya diiringi oleh ketetapan-ketetapan yang berkesinambungan dengan implementasi konvensi tersebut. Dengan terselenggaranya CEDAW, artinya setiap negara di dunia secara *de jure* gerakan perempuan telah mendapatkan pengakuan. Namun secara *de facto* pemerintah di masing-masing negara tetap masih harus membereskan banyak persoalan dalam mengimplementasikan CEDAW secara utuh.⁹ Secara sederhana, CEDAW menyebutkan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perempuan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁰ Oleh karena itu, adalah sebuah konsekuensi logis jika negara harus bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran HAM di negaranya.

Konferensi Perempuan Sedunia ketiga berikutnya diselenggarakan di Nairobi, Kenya. Kemajuan penting dicapai dalam konferensi ini yaitu pengakuan pentingnya membahas masalah-masalah perempuan di Dunia Ketiga. Hasil penting lain adalah mengenai pentingnya jaringan di antara NGO perempuan yang melintas batas negara. Aktivitas gerakan perempuan

juga muncul di beberapa konferensi internasional lainnya seperti dalam Konferensi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Partisipasi gerakan perempuan juga mewarnai Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993.¹¹ Konferensi internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Kairo pada tahun 1994 juga sangat penting bagi kaum perempuan karena persoalan kependudukan berkaitan erat dengan fungsi reproduksi perempuan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas tergambar bahwa membangun suatu kerangka kerjasama organisasi pada level internasional dapat menjadi jembatan untuk membicarakan isu-isu perempuan yang melintas batas negara. Feminisme dalam berbagai bentuk variasi lokalnya kini dapat dimengerti sebagai fenomena global. Ini menunjukkan kesuksesan atau hasil dari dialog, persetujuan, koalisi dan jaringan yang dijalin.¹³

Memang feminisme secara umum pada awalnya lebih berasal perspektif Barat. Perspektif itu kemudian menyebar

⁹ Goran Melander dan Gudmundur A. 1997. *The Raoul Wallenberg Compilation of Human Rights Instruments*. London : The Hague, hlm. 18.

¹⁰ Rebecca J.Cook (ed). 1994. *Human Rights of Woman, National and International Perspective*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, hlm. 634.

¹¹ Baylis, John & Steve Smith. 2004. *The Globalization of World Politics. An Introduction to the International Relations*. New York: Oxford University Press, hlm. 683

¹² Murniati A. Nunuk, hlm. 8

¹³ Ferree, Myra Marx & Aili Mari Tripp. 2006. *Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, and Human Rights*. New York: NYU Press.

ke seluruh dunia dengan berbagai variasi menyesuaikan dengan masalah-masalah lokal. Ini merupakan hasil saling belajar dan berbagi mengenai masalah-masalah lain secara transnasional.

GERAKAN PEREMPUAN DI MALAYSIA

Kaum wanita di Malaysia tidak suka dipanggil sebagai feminis karena lebih berkonotasi dengan konsep dan praktek yang diimpor dari Barat, dan kurang sesuai dengan keadaan lokal. Mereka lebih suka menyebut dirinya sebagai pejuang wanita, yang berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan ekonomi dan sosial, dan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan.¹⁴

Pada kenyataannya gerakan perempuan di Malaysia sangat kuat dipengaruhi oleh feminisme dari Barat. Gerakan mereka kebanyakan hanya didukung oleh golongan elit dan menengah ke atas yang berpendidikan tinggi. Isu-isu utama yang dibahas adalah berkenaan dengan soal keadilan sosial, kesetaraan, hak kemanusiaan, hak wanita, liberalisasi kaum wanita, dan pelbagai pendekatan yang berpusat pada kepentingan dan pandangan yang memihak dan membela kaum wanita.¹⁵

Hal tersebut sering menimbulkan benturan karena perbedaan situasi social dan budaya masyarakat yang berbeda dengan negara Barat.

Rohana Arifin (1999) menguraikan perbedaan dasar perjuangan kaum perempuan di Malaysia dengan kebanyakan negara Barat. Perbedaan utamanya adalah wanita di Malaysia tidak berjuang untuk mendapatkan hak memilih. Hak tersebut telah diberikan berdasarkan konstitusi ketika Malaysia mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1957. Partisipasi kaum perempuan sudah dimulai ketika mereka berjuang bersama-sama dengan kaum pria melawan rezim kolonial di Malaysia. Persamaan hak ketika itu adalah dalam konteks perjuangan untuk meraih kemerdekaan negara, bukan sebagai isu gender. Setelah tahun 1945, ketika perjuangan menuntut kemerdekaan semakin memuncak, kaum wanita di Malaysia juga mulai menuntut pendidikan yang lebih baik terutama untuk anak-anak perempuan meskipun hal tersebut belum menjadi agenda utama. Selain itu, mereka juga mulai menuntut adanya perwakilan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Partisipasi politik kaum perempuan di Malaysia juga dipengaruhi oleh kemajemukan etnis yang ada di

¹⁴ Arifin, Rohana 1999 Arifin, Rohana. 1999. *Feminism In Malaysia: A Historical And Present Perspective Of Women's Struggles In Malaysia*. Women's Studies International Forum, Vol. 22, No. 4, hlm. 417-423.

¹⁵ Abd. Rahim Abd. Rashid. 1998. *Gerakan Feminisme Di Malaysia. Antara Idelisme Dengan Matlamat*. DEWAN BUDAYA, OGOS 1998, BIL 8

Malaysia. Mereka pada awal perjuangannya berupaya untuk memperbaiki posisi etnik mereka sendiri. Bentuk partisipasi politik mereka adalah melalui sayap perempuan di masing-masing partai politik yang mewakili etnik mereka. Misalnya, Malaysian Chinese Association (MCA) dan Malaysian Indian Congress (MIC) yang mendirikan sayap perempuan tahun 1950an dan 1960an.

Perbedaan lainnya adalah perjuangan kaum wanita di Malaysia berkembang di bawah pengaruh kuat agama Islam yang telah menjadi pedoman hidup dan sebagai identitas mereka. Para aktivis perempuan di Malaysia sangat berhati-hati dan menghindari segala perdebatan yang bertentangan dengan tatanan sosial-budaya atau hirarki keagamaan yang sudah ada. Mengenai hal ini kajian Cecilia Ng (2007) menunjukkan bahwa mempolitikkan hal-hal etnik dan agama telah semakin mempersempit ruang gerak perjuangan kaum wanita yang memang sudah terbatas.

Gerakan perempuan di Malaysia pada awal kemunculannya menumpukan kepada isu kekerasan domestik terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Insiden kekerasan domestik yang biasa terjadi adalah kekerasan seksual, pemerkosaan, perdagangan wanita, dan penderaan psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Fuziah Salleh (2010) menunjukkan bahwa hampir 50% wanita

di Malaysia pernah mengalami kekerasan domestik dalam perkawinan mereka. Berdasarkan catatan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) kasus-kasus perkosaan terhadap perempuan dan anak-anak pada tahun 2008 juga semakin meningkat sekitar 10%.¹⁶

Isu kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi perhatian utama gerakan wanita di Malaysia terutama mereka yang tergabung dalam JAG (*Joint Action Group*). JAG merupakan koalisi dari beberapa kelompok perempuan yang memperjuangkan hak perempuan di Malaysia. Pada tahun 1985, JAG mengawali kampanye anti kekerasan terhadap wanita. Beberapa kelompok seperti *Association of Women Lawyers (AWL)*, *Malaysian Trades Union Congress – Women’s Section*, *University Women’s Association (University Malaya)*, dan *Women’s Aid Organisation (WAO)*, bergabung dalam *Joint Action Group against Violence Against Women (JAG-VAW)*.¹⁷

Isu kekerasan terhadap perempuan di Malaysia dahulu bukan merupakan hal yang biasa untuk dibahas di publik. Dalam rangka International Women’s Day, JAG melakukan *road show* untuk melakukan kampanye nasional, dan ternyata mendapat respon yang sangat baik. Ini mendorong

¹⁶ *Berita Harian*, 12 Mei 2009

¹⁷ Joint Action Group against Violence Against Women. 1985. “Proceedings of a Workshop-cum-Exhibition on Violence Against Women”, 23-24 Maret.

pembentukan beberapa NGO perempuan baru seperti *All Women's Action Society* (AWAM), *Sabah Women's Action Resource Group* (SAWO). *Others like the Women's Development Collective* (WDC), *Sarawak Women for Women's Service* (SWWS), dan *Women's Crisis Centre* (WCC)¹⁸ di Penang.¹⁹

Sebagai suatu gerakan sosial, JAG bersifat *ad hoc* dan informal, dengan keanggotaan yang terbagi dalam urusan isu-isu khusus. Pada tahun 2005, untuk lebih memperluas koalisi dan perjuangannya demi kesetaraan dan tidak adanya diskriminasi terhadap kehidupan perempuan, jaringan ini berubah namanya menjadi *Joint Action Group for Gender Equality* (JAG/GE). Meskipun belum bersifat formal secara resmi, jaringan ini telah memiliki komposisi yang lebih permanen yaitu AWAM, WAO, WCC Penang, WDC, Sisters in Islam (Sis), dan komisi perempuan di *Malaysian Trades Union Congress* (MTUC) *Women's Committee*. Mereka mempunyai tujuan yang hampir sama tetapi memiliki strategi dan mengkampanyekan isu yang berbeda. AWAM melakukan kampanye anti perkosaan, WAO untuk anti kekerasan domestik, WCC untuk pelecehan

seksual, Sis untuk perjuangan hak perempuan Islam, dan komisi perempuan di MTUC memgurus masalah isu ketenagakerjaan. Selain tergabung dalam JAG, kebanyakan NGO perempuan di Malaysia juga bergabung dengan *National Council of Women's Organizations* (NCWO). NCWO secara resmi berdiri pada tanggal 25 Agustus 1963 yang bertindak sebagai coordinator konsultasi dan badan penasehat untuk meningkatkan status kaum perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan nasional. NCWO mempunyai afiliasi dengan 125 NGO lainnya.²⁰ Dengan kata lain, NCWO merupakan organisasi payung bagi NGO perempuan. Keberadaan NCWO dan semakin meluasnya kesadaran emansipasi wanita, kegiatan NGO perempuan tidak saja hanya membela kepentingan dan menjaga kebajikan semata-mata tetapi juga mulai melakukan langkah-langkah agitasi (penentangan) terhadap undang-undang yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.²¹

¹⁸ Sejak tahun 2003, organisasi ini lebih dikenal dengan nama Women's Centre for Change.

¹⁹ Ng, Cecilia, Maznah Mohamad and tan, beng hui (2006), *Feminism and the Women's Movement in Malaysia: An unsung (r)evolution*, London and New York: Routledge, hlm. 185.

²⁰ <http://www.ncwomalaysia.org.my/> diakses pada 2 April 2011

²¹ Makmor Tumin. 2006. *Wanita di Malaysia, Perjuangan Menuntut Hak*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Secara teoritis untuk mencapai tujuannya, gerakan perempuan dapat menjalankan sejumlah strategi. Salah satunya adalah dengan bergabung atau melembagakan gerakan mereka, bahkan bergabung dengan pemerintah. Karakter gerakan sosial yang pertama diangkat pada tahun 1960an dan 1970an, pada awalnya ditandai dengan kegiatan protes melawan negara dan melawan norma-norma yang mendominasi, dan mempunyai struktur organisasi yang longgar. Kini, gerakan-gerakan sosial, termasuk feminisme, sebagian telah dilembagakan dalam pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah, dan dalam kebijakan, praktek maupun norma-norma sosial.

Hal ini menjadi perdebatan, bahkan beberapa pemerhati menyatakan bahwa ini merupakan tanda berakhirnya gerakan sosial. Ide instiusionalisme membawa konsekuensi bahwa gerakan-gerakan sosial tersebut bergabung atau berkolaborasi dengan institusi-institusi yang lebih formal. Konsekuensinya, mereka mesti menerima atau menyesuaikan diri dengan cara-cara perjuangan lain yang lebih variatif, yang bisa membahayakan perjuangan mereka. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur, terjadinya pergeseran yang tidak nyambung, perubahan dukungan pemerintah, hingga pemutusan dukungan dana.

Hal tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari bentuk baru "institusionalisme feminis" yang dapat digunakan untuk memahami mengenai ide institusionalisme.²²

Apa yang terjadi di Malaysia menunjukkan bahwa NCWO sering menjadi penghubung komunikasi di antara NGO-NGO perempuan dengan pemerintah dalam usaha memperjuangkan tuntutan mereka. NCWO yang sejarahnya memiliki hubungan dengan dengan partai berkuasa, ternyata lebih mendapatkan respon pemerintah ketika mengartikulasikan kepentingan para NGO perempuan. NCWO sebagai payung organisasi perempuan telah bertindak sebagai kelompok pelobi secara efektif.²³

Organisasi perempuan tersebut akan lebih terjamin keberhasilannya dalam memperjuangkan wanita bila mau berkerjasama dan berhubungan dekat dengan birokrasi lebih menjamin keberhasilan perjuangan wanita. Model seperti ini dikenal dengan istilah "femokrat", yaitu nama yang diberikan untuk para kaum feminis yang ditunjuk untuk duduk atau mempunyai posisi di birokrasi dengan tugas khusus untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik

²² Andrew, Merrinda. 2010. Women's Movement Institutionalization: The Need for New Approaches. *Journal Politics and Gender* 6(4), hlm. 609-616.

²³ Rohana Arifin, hlm. 420.

mengenai perempuan.²⁴ Keberhasilan gerakan perempuan di Malaysia misalnya, dapat dilihat dari terbentuknya Kementerian Wanita dan Pembangunan, lahirnya Akta Keganasan Rumah Tangga, *Women's Agenda for Change* (WAC) dan *Women's Candidacy Inisiatif* (WCI). Hal ini tidak saja menunjukkan keberhasilan suatu gerakan dalam mencapai tujuannya, tetapi juga pengaruh gerakan tersebut terhadap negara dan masyarakat dalam memahami ide dan tujuan gerakan perempuan.

Di beberapa kantor pemerintahan bahkan sudah mempunyai unit khusus perempuan. Para pegawai perempuan di pemerintah ini diperbolehkan menghadiri konferensi-konferensi perempuan sedunia yang berhubungan dengan perbaikan nasib perempuan. Setelah mengikuti pertemuan-pertemuan internasional seperti di Wina, Denmark dan konferensi Beijing, banyak para anggota parlemen perempuan yang lebih berani bersuara vokal menyangkut isu-isu perempuan. Para femokrat inilah yang kemudian mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan beberapa pertemuan dan seminar-seminar dengan NGO perempuan untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antara NGO dengan pemerintah.²⁵

Gabungan, konsolidasi dan kerjasama di antara NGO-NGO yang terwakili dalam NCWO dan JAG telah memberikan kontribusi yang besar terhadap gerakan feminisme di Malaysia. Kegiatan NGO-NGO wanita tidak lagi terpusat hanya kepada isu-isu gender semata-mata, tetapi berkembang pada isu-isu hak asasi. Dalam perjalanannya NCWO dan JAG memberikan kontribusi yang amat besar dalam perjuangan wanita dan hak asasi manusia di Malaysia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, tulisan ini menyimpulkan bahwa konsep perjuangan Feminisme Barat apabila diterima begitu saja akan berbenturan dengan isu-isu dasar yang dihadapi oleh kebanyakan masyarakat di negara berkembang seperti kemiskinan, kemunduran, pemodernan, keadilan sosial, dan pergeseran kelas. Dalam konteks seperti inilah gerakan wanita transnasional menjadi jembatan antara masalah-masalah lokal, nasional, regional dan internasional. Melalui pendekatan transnasional, gerakan perempuan sedunia dapat mengangkat isu-isu lokal perempuan di suatu negara dan membicarakannya secara global.

²⁴ Andrew, Merrindahl, hlm. 610.

²⁵ Rohana Arifin, hlm. 421.

Konferensi-konferensi perempuan sedunia yang menguntungkan telah sangat menguntungkan gerakan-gerakan perempuan di seluruh dunia untuk memperkuat jaringan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, Merrindah. 2010. Women's Movement Institutionalization: The Need for New Approaches. *Journal Politics and Gender* 6(4), hlm. 609-616.
- Abd. Rahim Abd. Rashid. 1998. *Gerakan Feminisme Di Malaysia. Antara Idealisme Dengan Matlamat*. Dewan Budaya, Ogos 1998, BIL 8 JIL 20, M/S 10-11. http://www.sabah.org.my/bm/na_sihat/wanita/feminisme.htm diakses pada 13 Maret 2010
- Arifin, Rohana. 1999. Feminism In Malaysia: A Historical And Present Perspective Of Women's Struggles In Malaysia. *Women's Studies International Forum*, Vol. 22, No. 4, hlm. 417–423.
- Baylis, John & Steve Smith. 2004. *The Globalization of World Politics. An Introduction to the International Relations*. New York: Oxford University Press
- Beckwith, Karen. September 2005. The Comparative Politics of Women's Movements. *Perspectives on Politics* 3 (3), hlm. 583.
- Burchill, Scott. 2001. *Theories of International Relations: Feminism*. New York: Palgrave.
- Ferree, Myra Marx & Aili Mari Tripp. 2006. *Global Feminism: Transnational Women's Activism, Organizing, And Human Rights*. New York: NYU Press.
- Joint Action Group against Violence Against Women. 1985. "Proceedings of a Workshop-cum-Exhibition on Violence Against Women", 23-24 Maret.
- Kriesi, Hanspeter. 1996. The organizational structure of new social movements in a political context. Dalam Doug McAdam, John D. McCarthy & Mayer N. Zald (ed). *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*, hlm. 152–84. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meyer, David S & Tarrow, Sidney (ed). 1998. *The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
- Murniati A. Nunuk P. 2004. *Perempuan Indonesia dalam perspektif sosial, politik, ekonomi, hukum, dan HAM*. Magelang: IndonesiaTera.

Ng, Cecilia, Maznah Mohamad and tan, beng hui (2006), *Feminism and the Women's Movement in Malaysia: An unsung (r)evolution*. London and New York: Routledge.

Soenarti Djajanegara. 2000. Kritik Sastra Femenis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ticker, Aann. 2002. *Feminist Perspective on International Relations*. London: SAGE Publications

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN DAN BUDAYA
STUDI KASUS: PARLEMEN INDIA DAN MESIR**

Jeanie Annissa

jeanierosadi@yahoo.com

ABSTRACT

In the last four decades, woman's role in the national socio-economic development has been increasing. Woman has a significant contribution in development process instead of being considered as a weak creature. Gender is a discourse of socio-cultural construction that has been explained through dialogue to build better option for woman needs. Gender issues are usually related to development process and culture which then are also connected to socio-economic area thus give impact on woman's role in politics. This paper discusses issues on woman from political and cultural perspective correlated with national development and politic representation in the case of study of India and Egypt who have strong cultural values.

Keywords : *Woman, Politic, and Culture*

PENDAHULUAN

Tahapan pembangunan merupakan suatu karakteristik penting untuk mengukur representasi politik kaum perempuan. Melalui arah pembangunan seperti tingkat pendidikan, perbaikan sosial ekonomi, peningkatan urbanisasi dan perkembangan nilai-nilai modernisasi mengantarkan perempuan untuk memiliki kemandirian dalam mendapatkan sumber-sumber politiknya.

Pembangunan juga meningkatkan perempuan untuk menjaga eksistensinya, menjaga pertahanan ekonomi dan posisi tawar dalam pekerjaan melalui organisasi formal, seperti serikat pekerja ataupun organisasi-organisasi profesional lainnya. Kondisi ini terbentuk karena

pembangunan selalu berkorelasi dengan budaya yang menyinggung persoalan pembagian kerja antara pria dan wanita.

Dalam perspektif budaya, perempuan selalu termarginalkan untuk mendapatkan hak kemandiriannya dalam menentukan pilihan. Perempuan selalu ditempatkan sebagai makhluk yang tidak memiliki posisi *bargain*. Padahal disisi lain, pembangunan meningkatkan posisi tawar perempuan dan mensetarakannya dengan laki-laki.

Namun, perspektif budaya juga memiliki pengaruhnya sendiri. Setiap negara memiliki pengaruh budaya masing-masing, walaupun perkembangan pembangunannya setara. Di suatu negara bisa saja perempuan secara substansial memiliki kesetaraan

dengan laki-laki tetapi di negara lain kondisi tersebut belum tentu terjadi. Sementara budaya selalu dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan penting yang terus-menerus diyakini tetapi sulit secara langsung untuk menguji pengaruhnya.¹

Dalam beberapa penelitian, rasio perempuan yang melek huruf, berpendidikan dan bekerja memiliki tingkat kemampuan yang sama dengan rasio laki-laki yang melek huruf, berpendidikan dan bekerja. Asumsinya bahwa perempuan dan laki-laki dalam lingkup sosial dan politik memiliki kesetaraan. Dengan demikian representasinya pun meningkat. Hipotesanya menunjukkan penggambaran bahwa ukuran-ukuran kultur sangat erat berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Penelitian ini memang dapat mengidentifikasi sebab-sebab representasi perempuan, tetapi hanya berlaku di negara yang sudah maju. Di negara-negara berkembang, tidak ada variabel yang signifikan dan mempunyai pengaruh yang konsisten.²

Tingkat pembangunan yang rendah di negara-negara berkembang sangat mempengaruhi representasi perempuan dalam berpolitik. Ada

kekuatan besar yang bersinergi untuk menentang aktivitas politik perempuan berkaitan dengan peraturan representasi minimal. Gagasan pembangunan nasional di negara berkembang juga masih menganggap bahwa kaum lelaki-lah yang mendominasi bidang publik sedangkan wanita hanya mengurus hal yang berkaitan dengan lingkungan rumah tangga atau domestik.

Namun, seiring pertumbuhan pembangunan, perempuan mulai mendapat tempat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan secara politis. Ketika sumber-sumber politis substansial dikuasai, lalu perempuan membentuk kelompok kepentingan yang efektif dalam memperoleh haknya yang lebih luas.

Pergeseran nilai peranan perempuan sebagai imbas dari laju perkembangan pembangunan bukan berarti melibas perspektif budaya terhadap posisi kaum perempuan. Perempuan selalu ditempatkan sebagai makhluk "nomer 2" dalam segala bidang. Khususnya, perempuan di negara-negara yang sarat akan tingginya nilai budaya dan agama, selalu mendapatkan sikap diskriminasi.

Di negara yang memiliki adat budaya dan agama yang kental seperti India -Hindu-, memperlihatkan bahwa banyak politisi perempuan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, apalagi menyamakan

¹ Richard, E. Matland, *Pengaruh Pembangunan dan Kultur Terhadap Representasi Perempuan; dalam buku Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), International IDEA, Jakarta, 1999, hal. 27.

² *Ibid.*

jurang gender. Persoalan tanggung jawab domestik, kurangnya kekuasaan finansial, memuncaknya kriminalisasi politik dan ancaman pembinasakan karakter menyebabkan kesulitan yang meningkat bagi perempuan untuk menjadi bagian dari kerangka politik.³

Banyak dari politisi perempuan di parlemen India menyatakan bahwa, sedikit sekali perempuan yang berada dalam posisi kepemimpinan. Sebagian besar dari perempuan yang masuk dalam kandidat pemilihan dikarenakan takut kehilangan suara pemilih sedangkan partai tidak mau membuang kandidat laki-laki.⁴

Sejalan dengan itu, Mesir sebagai negara yang memiliki adat budaya dan agama yang kuat -Islam-, menunjukkan adanya tingkat partisipasi perempuan yang sangat rendah di parlemen. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor meliputi jumlah perempuan dalam anggota parlemen yang masih sedikit, minimnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta lemahnya perencanaan strategi bagi partisipasi perempuan. Perempuan arab, khususnya Mesir telah mengembangkan sejumlah strategi dalam menjalankan mekanisme untuk memudahkan partisipasi perempuan, tidak hanya

dalam bidang politik tetapi juga meningkatkan kinerja di aspek lainnya.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, kajian ini akan menguraikan dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan peranan wanita dalam berpolitik ditinjau dari aspek pembangunan dan budaya melalui studi kasus di India dan Mesir.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan instrument pengumpulan data berupa dokumen yang dapat memberikan jawaban dari inti permasalahan.⁶ Penulisan ini hanya mendeskripsikan informasi dan data yang tersedia tanpa pengujian hipotesa yang berkembang. Penelitian dalam penulisan ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) berupa validitas data-data sekunder seperti buku, makalah, dan jurnal dan artikel baik elektronik maupun non-elektronik.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Representasi Perempuan Di Parlemen India

India menganut sistem demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai. majelis rendahnya

³ Shirin Rai, *Kelas, Kasta dan Gender: Perempuan Dalam Parlemen Di India* terdapat dalam buku *Perempuan Di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, YJP, Jakarta, 1999, hal. 107.

⁴ *Ibid*, hal. 107.

⁵ Gehan Abu Zayd, *Mencari Kekuasaan Politik Perempuan Dalam Parlemen Di Mesir, Yordania, dan Libanon*, YJP, Jakarta, 1999, hal. 39.

⁶ John W. Creswell, *Research Design*, Jakarta : KIK Press, 2002, hal. 144.

disebut dengan *Lok Sabha* (Majelis Rakyat) yang beranggotakan 545 orang, sedangkan majelis tingginya disebut *Rajya Sabha* (Majelis Negara) yang beranggotakan 250 orang. Wakil perempuan ada tahun 1991 sebanyak 5,2 persen dari seluruh anggota *Lok Sabha* dan 9,8 persen dari seluruh *Rajya Sabha*.⁷

Persentase ini lebih rendah dibandingkan parlemen tahun 1989. Pemilihan umum tahun 1996, memperlihatkan kemunduran dalam persoalan representasi perempuan. Kecenderungan representasi perempuan yang rendah dalam lembaga-lembaga politik di negara-negara baru dapat menjadi suatu hal yang mencemaskan untuk keberlangsungan demokrasi.

Penyebab kemunduran ini disebabkan oleh menguatnya sistem kepartaian yang mengakibatkan marginalisasi politik berdasarkan isu ataupun pengambil-alihan gerakan berdasarkan isu-isu tunggal. Mayoritas gerakan-gerakan perempuan di India harus berhadapan dengan pola isu seperti ini.⁸ Di sisi lain, Partai-partai politik di India masih bergantung pada elite setempat dikarenakan masih lemahnya mereka secara organisasional. Oleh karena itu, kondisi tersebut dianggap sebagai perlawanan atas

implementasi prakarsa politik yang tanggap gender (*gender-sensitive*).⁹

Tuntutan terhadap representasi perempuan di India tidak berjalan dengan sistematis sampai terbentuknya Komite Status Perempuan Di India atau *Committee On The Status Of Women In India* (CSWI). Sebelum adanya CSWI, gerakan perempuan di India hanya tertuju pada persoalan peningkatan posisi sosial-ekonomi perempuan tetapi melalui laporan CSWI, representasi perempuan dalam institusi-institusi politik khususnya dari kelompok akar rumput (*grass root*) harus ditingkatkan melalui kebijakan penambahan kursi untuk perempuan.¹⁰

Di tahun 1988, Rencana Perspektif Nasional Untuk Perempuan mengusulkan kuota 30 persen bagi perempuan yang diperkenalkan diseluruh tingkatan badan-badan pemilihan. Kelompok-kelompok perempuan mendorong partisipasi kelompok akar rumput dalam politik. Tuntutan itu akhirnya mendapatkan hasil yang diapresiasi kedalam Amandemen ke-73 dan 74 dalam konstitusi di India.¹¹

Di tahun 1995, persoalan kuota menjadi isu polemik ketika perempuan dihadapkan dalam perspektif budaya dan agama. Ketika Rancangan Undang-Undang yang berisi tentang isu kuota di

⁷ Hem Lata Swarup, Niroj Sinha, Chithra Ghosh, Pam Rajput, *Women's Political Engagement In India dalam buku B. Nelson and Chowdhury, Women and Politics Worldwide*, London, Yale University Press, hal. 362.

⁸ *Op.Cit.*, Shirin Rai, hal. 107.

⁹ *Ibid*, Shirin Rai.

¹⁰ GOI (*Government Of India Publication*), 1974 dalam tulisan *Ibid*, Shirin Rai, hal. 108.

¹¹ *Ibid*

parlemen XI pada tahun 1997, beberapa partai mengajukan sikap keberatannya dengan beberapa alasan. *Pertama*, isu kuota yang tumpang tindih bagi perempuan dan untuk perempuan dari kasta yang lebih rendah. *Kedua*, isu elitisme. Sebagian besar kelompok perempuan merasa bahwa isu kasta dapat memecah belah kaum perempuan. Banyak yang merasa khawatir mengenai hak-hak istimewa yang akan diberikan kepada perempuan elite dengan menjamin kursi bagi mereka di parlemen, padahal kaum-kaum perempuan elite inilah yang mendukung adanya jumlah kuota khususnya dari kelompok akar rumput.¹²

Profil perempuan di Parlemen India tahun 1996, mayoritas terdiri dari perempuan-perempuan yang berasal dari kelas menengah, perempuan kelompok profesional yang sedikit sekali memiliki hubungan dengan kelompok gerakan perempuan. Sebagian besar dari mereka memasuki dunia politik lewat hubungan keluarga, sebagian lagi melalui gerakan mahasiswa dan hak-hak sipil, dan sebagian lagi hasil dari prakarsa negara untuk meningkatkan representasi kasta-kasta lebih rendah.¹³

Mayoritas perempuan di Parlemen terdiri dari kelas-kelas elite. Peran publik mereka seringkali menantang *stereotype*

yang ada. Posisi kelas selalu menempatkan mereka lebih istimewa dan memiliki banyak pilihan daripada perempuan yang berasal dari kelompok kelas yang lebih rendah.

Kasta merupakan ciri dari kehidupan publik dan politik di India. Sebagian besar anggota parlemen perempuan berasal dari kasta tinggi. Namun, bukan berarti korelasi politik semata-mata dikaitkan dengan kasta. Ada juga perempuan yang keterwakilannya karena mereka tergabung dan aktif dalam pergerakan politik, perjuangan nasional dan gerakan anti keadaan darurat. Dengan demikian jumlah perempuan yang mampu mengambil manfaat dari sistem kasta ini masih sedikit meskipun kasta mempengaruhi profil, loyalitas dan kerja perwakilan dalam parlemen.

Representasi perempuan dalam parlemen walaupun penting dalam landasan keadilan sosial dan legitimasi sistem politik, tidak dapat semudah itu diterjemahkan ke dalam perbaikan representasi berbagai kepentingan perempuan. Tidak hanya persoalan kasta semata tetapi ditentukan juga dalam kemampuan perempuan mengelola isu yang berkembang di masyarakat. Sistem yang mempengaruhi dan menghambat suatu kelembagaan berdampak terhadap isu-isu yang diajukan perempuan di parlemen.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Dalam tulisan Shirin Rai¹⁴ dikatakan bahwa, sebagian besar anggota parlemen perempuan tidak memiliki isu yang bermutu tinggi dalam melolokan kepentingan Perempuan. anggota parlemen perempuan tersebut hanya merasa cukup dan sekedar mengisi komite-komite yang berkaitan dengan ekonomi, hubungan internasional dan perdagangan. Mereka hanya menganggap dengan berada di parlemen berarti mereka sudah melakukan keterwakilan politik perempuan tanpa memberikan pengaruh yang substansial.

Isu-isu penting dalam pembahasan gender dan representasi adalah mengenai konstituensi yang diwakili oleh perempuan. Ketika isu mengenai perempuan muncul di parlemen, perempuan yang berada di parlemen harus berpartisipasi dalam setiap perdebatan. Isu-isu kesejahteraan, kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan merupakan isu-isu yang harus mendapatkan perhatian dan bisa mensinergikan kinerja perempuan di parlemen.

Beberapa perempuan di parlemen memanfaatkan instruksi pimpinan partai untuk melibatkan diri dalam sayap perempuan. Meskipun situasi ini tidak meningkatkan status dan peranan perempuan di partai, tetapi banyak dari mereka yang berhasil menjalankan dan

memberikan pengaruh dalam kepemimpinan partai.¹⁵

Melihat pengaruh dan hambatan yang dibebankan kepada anggota parlemen perempuan di India, membuktikan bahwa mereka dapat menjadi saluran antara kepemimpinan partai dan juga anggota-anggotanya khususnya yang perempuan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, keluarga, dan hak-hak perempuan.¹⁶

Saat ini, Majelis Tinggi parlemen India telah menyetujui Rancangan Undang-Undang yang akan menyisihkan sepertiga dari seluruh kursi di parlemen nasional serta badan pembuat undang-undang untuk para perempuan. RUU ini mengalokasikan sepertiga dari seluruh kursi di parlemen nasional dan legislator negara bagian untuk para perempuan.¹⁷ RUU ini diloloskan dengan dukungan 186 anggota dari 245 anggota majelis tinggi. Hanya satu anggota yang menentang, sementara beberapa anggota partai kecil melakukan veto.

Sekarang ini, para perempuan hanya memiliki 10 persen kursi dalam parlemen. Kursi yang disisihkan untuk para perempuan ini akan dipilih secara bergilir. Hal ini berarti kaum perempuan dalam setiap konstituante di daerah

¹⁵ *Ibid*, Shirin Rai, hal. 113.

¹⁶ Rai S.M, *Women Negotiating Boundaries Gender, Law and The Indian State, Social and Legal Studies*, Vol.4, No.3 Setember 1995.

¹⁷ www.bbcindonesia.com "India loloskan UU Persamaan Wanita" diakses 14 April 2011.

¹⁴ *Ibid*, Shirin Rai, hal. 112.

pemilihan wilayah negara bagian akan memiliki satu wakil. Dengan adanya keterwakilan perempuan di tiap daerah pemilihan dapat menjadi saluran aspirasi dari isu-isu perempuan yang berkembang.

Representasi Perempuan Di Parlemen Mesir

Anggota parlemen perempuan di Mesir mengungkapkan bahwa 68 persen perempuan anggota parlemen tidak memadai jika dikaitkan dengan tingkat partisipasi politik perempuan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor meliputi, masih sedikitnya jumlah perempuan anggota parlemen, kecilnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan lemahnya perencanaan strategi bagi partisipasi perempuan.¹⁸

Suatu fakta bahwa perempuan di Mesir, kewarganegaraan serta hak-hak politiknya dijamin dalam Undang-Undang 1956, namun lingkungan sosial ekonomi di negara tersebut telah berjalan menentang hak-hak politik perempuan tersebut. Nilai-nilai yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan-urusan publik saling berdampingan dengan nilai-nilai reaksioner, dan akibatnya konflik diantara dua nilai tersebut hanya menghabiskan waktu dan menjadi semakin intensif karena situasi

politik dan ekonomi yang terjadi di Mesir.¹⁹

Ekonomi di Mesir, saat ini dicirikan terutama oleh *Program Penyesuaian Struktural (SAPs-Structural Adjustment Program)* yang direkomendasikan oleh IMF yang menimbulkan dampak negatif terhadap perempuan. Kebijakan ini didasarkan pada dua unsur utama, yakni: *pertama*, berkurangnya peran negara dalam bidang kesejahteraan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, privatisasi industri-industri milik negara, yang mentransformasikan ekonomi ke suatu sistem yang berbasis kekuatan pasar.²⁰

Kebijakan-kebijakan tersebut telah mempengaruhi situasi perempuan kedalam banyak persoalan. Migrasi tenaga kerja membuat peranan perempuan bergeser sehingga beban sosial yang dideritanya menjadi besar. Dalam waktu yang bersamaan, negara pun telah mundur dari peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Situasi ini akhirnya dimanfaatkan sebagian golongan dengan memanfaatkan Islam sebagai pembenaran program kebijakan melalui pelayanan sosial.

Kelompok islam membangun pelayanan sosial hanya untuk mendorong ideologi politik mereka yang bermusuhan terhadap perempuan, yang

¹⁸ Op.Cit, Gehan Abu Zayd,, hal. 39

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

akhirnya membawa perempuan hanya mengurus hal-hal domestik saja. Dengan demikian, situasi ini berakibat pada menurunnya partisipasi ekonomi perempuan sehingga perempuan termarginalkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang tidak memiliki posisi-posisi penting.

Anggota parlemen terbentuk dalam dua era besar, yaitu: era gerakan nasionalis dan era negara satu partai dalam periode pasca kolonial. Gerakan perempuan secara langsung terkait dengan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh kalangan laki-laki dan perempuan terdidik yang berasal dari kalangan menengah-atas. Perempuan aktif dalam gerakan nasionalis dikarenakan keluarganya terkait dengan aktivis politik laki-laki. Perempuan tidak diberikan akses untuk dapat menduduki jabatan pembuatan keputusan. Para pemimpin perempuan tidak memperjuangkan kebijakan yang memperlihatkan pemahaman yang benar mengenai permasalahan dan kebutuhan perempuan. Aktivitas politik perempuan hanya melingkupi persoalan amal dan juga memberikan pelayanan sosial.²¹

Namun, sesudah revolusi tahun 1952, Mesir menghapuskan sistem multipartai dan memberlakukan partai tunggal. Saat pemilihan tahun 1957, lingkup peranan perempuan Mesir bergeser. Mereka berpolitik tidak lagi

sebagai pelayan sosial tetapi juga menempati posisi *bargain*. Kondisi ini terbukti dengan terpilihnya Rawya 'Atiya sebagai anggota parlemen untuk pertama kalinya. Situasi ini di dukung oleh ideologi sosialis yang mendukung perempuan dalam semua aspek pemerintahan dan politik. Sesaat setelah itu, di tahun 1976 ketika sistem multipartai kembali diterapkan, partisipasi politik perempuan rendah dan mereka dianggap sama dengan masyarakat pada umumnya dikarenakan kultur sistem satu partai tidak mendorong adanya pluralitas politik.²²

Ada empat hal yang digunakan untuk memudahkan perempuan berpolitik di Parlemen Mesir, yaitu²³: (i) Alokasi kursi sebanyak 30 kursi telah dicadangkan untuk perempuan sesuai dekrit presiden tahun 1979. (ii) menominasikan perempuan dalam daftar partai. (iii) perempuan mencalonkan diri sebagai kandidat perorangan dalam pemilihan perempuan. (iv) perempuan ditunjuk sebagai anggota parlemen oleh presiden, yang mempunyai hak untuk menunjuk sampai 10 anggota parlemen, proporsinya yang selalu diberikan kepada perempuan.²⁴

Analisa mengenai kinerja perempuan di parlemen Mesir

²² Dahlerup, Drude, *From a Small to a Large Minority: A Theory of a Critical Mass Applied to the Case of Women in Scandinavian politics*. Dalam Hem Lata Swarup and Sarojini Bisaria, *Women, Politics and Religion*, Etawah, India A.C Brothers, 1991, hal. 267-303

²³ Op.Cit. Gehan Abu Zayd., hal. 40.

²⁴ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hal. 40.

mengungkapkan beberapa hal.²⁵ *Pertama*, tidak adanya korelasi antara jumlah anggota parlemen perempuan dengan jumlah isu yang mereka munculkan. Kondisi ini menjelaskan bahwa kuantitas perempuan tidak menjamin kemampuan perempuan dalam memunculkan isu-isu penting yang berkenaan dengan perempuan. *Kedua*, Isu representasi perempuan bukan sesuatu yang kuantitatif. Ini bergantung pada perempuan yang terpilih untuk menghadirkan berbagai isu dan masalah masyarakat dan bertindak secara representatif dengan cara yang terbuka dan efisien.

Ketiga, partisipasi perempuan mengungkapkan berbagai isu yang meliputi pekerjaan politik, ekonomi dan sosial. Kajian ini juga menunjukkan bahwa wilayah utama perhatian anggota parlemen perempuan adalah isu-isu ekonomi yang diikuti dengan persoalan sosial lainnya. *Keempat*, kinerja perempuan anggota parlemen yang terpilih berbeda dari kinerja mereka yang memperoleh kursinya menurut sistem cadangan atau suatu sistem daftar partai. Dengan demikian kinerja perempuan dipengaruhi oleh peran parpol dalam masyarakat dan juga

tekanan dari konstituante terhadap isu-isu lokal.

Partai politik di Mesir tidak memberikan perempuan keanggotaan partai kecuali pada saat-saat perempuan termasuk daftar partai. Namun, dalam periode parlementer perempuan masuk didalam partai berkuasa – partai demokrasi nasional- yang secara ideologis homogen. Perbedaannya hanya terletak pada sejarah politik, kesadaran kultur parlementer, serta sifat dan interaksi mereka dengan masyarakat.²⁶

Anggota parlemen Mesir baik laki-laki maupun perempuan memiliki kecenderungan untuk mengangkat isu-isu lokal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lemahnya infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di masyarakat. Rendahnya pendapatan dan meningkatnya jumlah kemiskinan memberikan pengaruh penting terhadap masalah-masalah di parlemen yang kemudian berpindah pada isu-isu yang berkaitan dengan pelayanan sosial. Dengan demikian, kinerja perempuan anggota parlemen merefleksikan situasi umum dalam masyarakat dan bukan kekuasaan gerakan perempuan yang lebih progresif tetapi akibat lemahnya mekanisme tekanan politik khususnya yang berkenaan dengan kenyataan bahwa partai-partai politik masih tetap

²⁵ Wahbi Azza, *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l- Ajhiza Al-Tashri'ya (Perempuan Mesir dan Mekanisme Legislatif)*, Kairo, Markaz Al-bahuth wa-i- Dirasat Al-Siyasiya, 1995, hal. 17-20. terdapat juga dalam tulisan H. Farida Al-Naqash, *Perkembangan Partisipasi Politik Perempuan*, Kairo, Fakultas Ilmu Politik dan Ekonomi; Universitas Kairo, 1994, hal. 12.

²⁶ *Ibid.*

membahas isu-isu perempuan sebagai isu-isu sekunder.²⁷ Berikut ini akan diuraikan karakteristik keterwakilan perempuan parlemen Mesir dalam tiga periode.

Tabel 1
Perbandingan Aktivitas Anggota Perempuan Parlemen Mesir (Majelis Rakyat) Selama Periode II, IV, dan V

	Mekanisme yang Digunakan	Jenis Kasus	Isu-isu Politik	Isu-isu Ekonomi	Isu-isu Pelayanan	Isu-isu Sosial
Masa Kedua 1976 – 1979	Legislatif	Proposal Usulan	1	-	1	-
		Proposal Dekrit Legislasi	1	-	-	-
		Proposal Rancangan UU	2	1	-	7
	Sensor	Pemintaan Informasi	2	4	2	2
		Pemintaan Debat	-	1	-	-
		Soal-Jawab	1	12	15	23
		Interpolasi	1	2	4	-
		Total	8	20	22	32
	Masa Keempat 1984-1987	Legislatif	Proposal Usulan	-	-	-
Proposal Dekrit Legislasi			-	-	-	-
Proposal Rancangan UU			-	-	-	-
	Sensor	Pemintaan Informasi	-	9	5	1
		Pemintaan Debat	-	-	1	-
		Soal-Jawab	5	49	40	16
		Interpolasi	-	-	-	1
		Total	5	58	46	18
	Legislatif	Proposal Usulan	-	-	-	-
		Proposal dekrit Legislasi	-	-	-	-
		Proposal Rancangan UU	-	-	-	-
	Sensor	Pemintaan Informasi	-	-	-	-
		Pemintaan Debat	-	1	1	-
		Soal-Jawab	1	7	8	4
		Interpolasi	-	-	-	1
		Total	1	8	9	5

Sumber : Wahbi Azza, *Al-Mar'a Al-Misriya wa-I- Ajhiza Al- Tashriya (Perempuan Mesir dan Mekanisme Legislatif)*, Kairo, Markaz Al-bahuth wa-I- Dirasat Al-Siyasiya, 1995.

Berdasarkan penjelasan tersebut, partai politik di Mesir hanya memposisikan perempuan dalam persoalan-persoalan domestik, kalau pun mereka terlibat dalam kancah politik dikarenakan pemenuhan jumlah perempuan di parlemen melalui daftar partai. Penanganan isu perempuan juga belum tentu bisa terselesaikan walaupun ditinjau berdasarkan kuantitas

²⁷ *Ibid.*

perempuan di parlemen, tetapi kondisi tersebut bergantung pada sikap aktif-reaktif perempuan dalam menyuarakan isu-isu perempuan di parlemen.

Jika ditinjau dari jumlah keterwakilan politik perempuan menurut gambaran tabel, maka dapat dilihat bahwa isu ekonomi dan isu pelayanan sosial dari masa ke masa mengalami peningkatan. Meskipun begitu, jumlah perempuan yang mewakili tidak berarti berbanding sama dengan jumlah kuantitas isu yang mewakili kebutuhan perempuan. Dengan jumlah keterwakilan politik perempuan yang banyak belum tentu mampu meng-cover bentuk kebutuhan perempuan secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen menunjang mayoritas kaum perempuan untuk menyampaikan persoalan ataupun isu-isu yang berkenaan dengan kebutuhan proteksi bagi perempuan. Walaupun dalam kenyataan politis-realisnya perempuan masih termarginalkan dalam politik. Tingkat pendidikan, persoalan kasta, budaya dan agama menimbulkan konflik ataupun hambatan bagi representasi kaum perempuan dalam berpolitik.

Dalam studi kasus di India, kedudukan perempuan dalam berpolitik masih harus berhadapan dengan persoalan budaya dan agama-hindu

yang membagi kelompok keterwakilan perempuan di parlemen dalam kasta-kasta sosial yang ada di masyarakat, tanpa melihat kebutuhan konstituante dalam menyampaikan aspirasinya.

Kedudukan perempuan dalam berpolitik di India telah diberikan tempat melalui pemberian kuota 10 persen bagi kaum perempuan secara keseluruhan baik di majelis rendah maupun tinggi. Walaupun kini telah diloloskan RUU kuota perempuan dengan memberikan sepertiga kursi parlemen nasional dan negara bagian tapi hal ini hanya sebuah awal perjalanan perempuan dalam mensuarakan kepentingannya. Kuota yang diberikan bukan menjadi suatu prasyarat bagi perempuan jika perempuan di parlemen tidak mampu mengelola atau mencari isu-isu yang diperlukan oleh mayoritas kaum wanita.

Sejalan dengan itu, studi kasus di Mesir juga bernasib tidak jauh berbeda. Perempuan hanya ditempatkan sebagai pelayan sosial dan amal bagi masyarakat. Mereka terbatas lingkup berpolitik dalam partai karena dihalangi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Persoalan yang paling mendasar di kalangan perempuan anggota parlemen adalah masih minimnya kebutuhan pendidikan dan akses informasi. Kebanyakan dari anggota parlemen

menyatakan bahwa mereka perlu belajar mengenai posisi perempuan dalam pembuatan Undang-Undang dan masalah keagamaan yang relevan untuk mempertahankan hak perempuan.

Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam berpolitik dapat terbentuk jika hambatan-hambatan perempuan dalam korelasi pembangunan seperti sosio-ekonomi dan tingkat pendidikan meningkat. Namun, situasi ini juga harus didukung dengan kemampuan perempuan itu sendiri dalam membangun interaksi dan kerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan, agar isu-isu yang berkenaan dengan perempuan tetap lantang disuarakan demi melindungi hak-hak perempuan dari kejahatan ataupun kekerasan sosial.

Manfaat pemberian kuota bagi perempuan juga dapat terlaksana dengan maksimal ketika perempuan mengetahui dan sadar mengenai haknya, sehingga bisa memunculkan isu-isu publik yang khususnya berkenaan dengan wanita. Oleh karena itu wanita dapat bertanggung jawab dan menunjukkan eksistensinya dalam partai politik maupun parlemen tanpa harus termarginalkan perannya menjadi makluk "nomer 2".

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Richard, E. Matland, *Pengaruh Pembangunan dan Kultur Terhadap Representasi Perempuan; dalam buku Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP), International IDEA, Jakarta, 1999, hal. 27.
- Shirin Rai, *Kelas, Kasta dan Gender: Perempuan Dalam Parlemen Di India* terdapat dalam buku *Perempuan Di Parlemen, Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, YJP, Jakarta, 1999, hal. 107.
- Gehan Abu Zayd, *Mencari Kekuasaan Politik Perempuan Dalam Parlemen Di Mesir, Yordania, dan Libanon*, YJP, Jakarta, 1999, hal. 39.
- John W. Creswell, *Research Design*, Jakarta : KIK Press, 2002, hal. 144.
- Hem Lata Swarup, Niroj Sinha, Chithra Ghosh, Pam Rajput, *Women's Political Engagement In India*
- B. Nelson and Chowdhury, *Women and Politics Worldwide*, London, Yale University Press, hal. 362.
- GOI (Government Of India Publication), 1974 dalam tulisan *Ibid*, Shirin Rai, hal. 108.
- Rai S.M, *Women Negotiating Boundaries Gender, Law and The Indian State, Social and Legal Studies*, Vol.4, No.3 Setember 1995.
- Dahlerup, Drude, *From a Small to a Large Minority: A Theory of a Critical Mass Applied to the Case of Women in Scandinavian politics*. Dalam Hem Lata Swarup and Sarojini Bisaria, *Women, Politics and Religion*, Etawah, India A.C Brothers, 1991, hal. 267-303
- Wahbi Azza, *Al-Mar'a Al-Misriya wa-l-Ajhiza Al-Tashri'ya (Perempuan Mesir dan Mekanisme Legislatif)*, Kairo, Markaz Al-bahuth wa-i-Dirasat Al-Siyasiya, 1995, hal. 17-20.
- H. Farida Al-Naqash, *Perkembangan Partisipasi Politik Perempuan*, Kairo, Fakultas Ilmu Politik dan Ekonomi; Universitas Kairo, 1994, hal. 12.

Artikel On-Line :

- www.bbcindonesia.com "India loloskan UU Persamaan Wanita" diakses 14 April 2011.

THE ROLE OF NGO & WOMEN EMPOWERMENT IN THE PEACEBUILDING PROCESS OF ACEH CONFLICT

Ronald Roger Rohrohmana

rrohrohmana@gmail.com

ABSTRACT

With the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) on 15 August 2005 in Helsinki, Aceh has a fair chance to create a fair, just and equal society after decades of protracted conflicts. Parties to this agreement – the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement – have been implementing its clauses with commitment, receiving praise from the international community. However as men have been visible in the peace process, womens empowerment in the peace process has thus been limited. This paper will examine the role of non governmental organizations (NGO) in establishing the status of women's involvement and their participation in developing the Acehese society and its governance as a part of the peacebuilding process. It expounds the level of women's involvement and depth of their views which are taken into consideration along with whether the structures that are currently created as a result of the MOU provide equal opportunity for men and women in the peacebuilding process. As a conclusion, considering that women make up the majority of the Acehese people, this paper underlines that NGO activities in women's empowerment vastly contribute to the peacebuilding process in Aceh.

Keywords: *NGO, Women Empowerment, Peacebuilding Process*

BACKGROUND

A historical narrative of violence and humanitarian tragedy caused by conflicts throughout the world has shown that women, while remaining a minority in terms of being combatants and perpetrators of conflict, are the vulnerable majority, often victimized and increasingly suffer the greatest harm. However, taking into account the active role of women in peacebuilding the focus has then shifted to women as active agents of political change.

At the global level, women have long been active in advocating peace. Both individually and in groups, women

have lobbied for the goal of achieving sustainable peace in conflict prone areas. Women involvement in peace processes can inspire or confirm in women an awareness of the political dimensions of conflicts and of their own political position. Women have identified working for peace as a unique opportunity to become organized, an experience that has proved useful in other aspects of peacebuilding.

The interest of women in becoming involved in peace processes often stems from their experiences in armed conflicts, whether primarily as victims or as armed participants. Women in conflict areas are

aware of the potential for transformation and reform in periods of peacemaking and often work intensively to be part of this process . Involvement in peace processes can inspire or confirm in women an awareness of the political dimensions of conflicts and of their own political position. Women have identified working for peace as a unique opportunity to become organized, an experience that has proved useful in other aspects of postconflict reconstruction. Women's peace movements often focus on the shared social experiences of women, thus producing greater solidarity across lines of division.

On the other hand, active involvement in peacebuilding is a challenge for most local actors due to limitations in specific skills, resources and institutional support, which are difficult to access in conflict situations. Local male-dominated groups – even those devoted to peace - may be resistant to the involvement of women. Prevailing assumptions about their roles in society, particularly in relation to decision making, and stereotypical assumptions about their areas of expertise, have been used to exclude women from the peace processes. In some cases, women may be invited to join existing peace groups, but can then be denied access to decision-making positions within the organizations, and

relegated to “housekeeping” functions . In most cases, the activities of local woman activist were disapproved of, and women were told to stay at home and take care of their children . Hence, discrimination against women and gender inequality can persist or deepen during the period after conflict, thereby limiting the opportunities of women to play significant roles in the design and implementation of peacebuilding processes .

In the case of Aceh, little attention has been paid to the role that women played in the conflict in Aceh, their survival efforts or their involvement in development and peacebuilding. According to the historical and humanitarian tragedy in Aceh, women are vulnerable, victimized suffer submission and bear the consequences of being the wives and relatives of the “enemy”. In contrary, Acehnese women played strategic roles, generated bright ideas and were able to find unique ways to survive. They were able to become agents of change in ushering peace. In February 2000, five years before the MOU had been signed, the first All Acehnese Women's Congress (*Duek Pakat Inong Aceh*) was held. Nearly 500 women, many of whom suffered the direct consequences of armed conflicts engaged in discussions that demanded the prioritization of dialogues towards resolving the conflict and for greater

women's participation in all political decision-making. Then in 2005, the second All Acehese Women's Congress was held drawing more participants from different elements of the society including former female GAM combatants. Contributions to this development have largely occurred through the establishment of structures by NGOs in parallel to the various institutions mandated with the MOU's implementation.

This paper is intended to explore the role of women in the peacebuilding process of conflict prone areas through the support of non governmental organizations (NGO). It expounds the lessons learned from the peacebuilding process in Aceh, Indonesia which was established with the signing of the Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of Indonesia (GOI) and the Free Aceh Movement (GAM) on 15 August 2005 in Helsinki. As men have been visible throughout the peace process and during the implementation of the MOU, the involvement of women has thus far been limited. Issues such as the role of non governmental organizations (NGOs) in empowering women in the implementation of the MOU along with their views taken into consideration and whether the structures created as a result of the MOU provide gender equality in the peacebuilding process will

serve as the guiding questions of this research.

UNDERSTANDING NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOS)

NGOs have various definitions. Literally, they are transnational, made up of individuals or national groups and not official representatives of national governments. The term "non governmental organizations" (NGOs) refers to a large range of organizations in the developed or developing world. In addition, it is a subject of ambiguous conceptions. Hence the term, NGO's becomes all over applied to a wide variety of organizations. "Voluntary organizations," "nonprofit associations," "grassroots organizations," "peoples organizations" etc. are often used to describe similar organizations, i.e., NGOs. A 1994 United Nations document describes an NGO as;

A non-profit entity whose members are citizens or associations of citizens of one or more countries and whose activities are determined by the collective will of its members in response to the needs of the members of one or more communities with which the NGO cooperates.

Meanwhile, Kerstin Martens defines NGOs according to the two major controversial tracks of NGO interpretations; the juridical and sociological accounts, namely NGOs are

formal (professionalized) independent societal organizations whose primary aim is to promote common goals at the national or international level.

In general, there is no universally accepted definition of NGOs yet, however the way NGOs functions are important. NGOs usually function as agents of international comprehension, as shapers of public opinion, and as pressure groups. NGOs affect national governments, multilateral institutions, and national and multinational cooperations in four ways; setting agendas, negotiating outcomes, conferring legitimacy, and implementing solutions .

According to Simmons, first, in setting agendas, NGOs through their vast global public-relations has the capability in forcing leaders and policy makers to pay attention. Second, in negotiating outcomes, NGOs own the capacity in designing mulitateral treaties that work. Third, in conferring legitimacy, NGOs through their judgements or assestments play an important role in promoting or withholding political and financial support. NGOs also play important roles in turning agreements and norm into reality. Moreover, NGOs increasingly operate outside existing formal frameworks, moving independently to meet their goals and establishing new standards, hence governments, institutions, and corporations are

themselves compelled to follow through force of public opinion.

LIMITATIONS FOR EMPOWERING WOMEN

The *Securing Peace* document stresses the importance of a broad base of participation of all societal components to make sustainable peace and development possible. Empowering women brings many benefits to the peace process. Women informally monitor the implementation of the peace agreement through local networks and activities. Women can be an important ally in monitoring efforts conducted by parties during peace processes.

Furthermore the *Securing the Peace* document published by UNIFEM lists the benefits of empowering women in the peace process and how women's participation can improve the maintenance of peace:

- Women's organization persistently advocate for peace.
- Women often build a foundation for peace negotiations.
- Women can build ties among opposing factions.
- Women can increase the inclusiveness, transparency and sustainability of the peace process.
- Women ofthen complement official peacebuilding efforts.

- Women can foster reconciliation and provide an example for moving society forwards.
- Women often work to sustain the peace agreement on all levels.

In an assessment carried out by UNIFEM and later published by the Crisis Management Initiative, a non-governmental/ non profit organization from Finland responsible for brokering peace and holding mediations between GOI and GAM, in 2006 indicated that women had limited involvement in the peace process that led to the Helsinki Agreement (MOU) and its implementation. Technical reasons such as the presence of Acehese women with the substantial level of political and legal knowledge and familiarity has been indicated as the cause of the limitation. However a deep assessment into the issue would identify the following as principal reasons limiting women's involvement in the peacebuilding process .

First, cultural paradigm in Aceh have restricted women's involvement in the political sphere. Many Acehese men believe that women do not have a role to play in politics. Interestingly, most Acehese women submit to the same gender constructions and are therefore confine themselves from engaging on political issues . Despite a record of advocating for peace and fostering reconciliation, women were barely

involved in the dialogue processes spanning over five years that finally culminated in the MOU in August 2005 .

A second factor identified is the failure to recognise the need to address women's rights as human rights by counterparts in the institutions mandated by the MOU. The kind of gender-aware conflict resolution mandated by Security Council 1325 was not achieved. This was mirrored in other political processes as well; when Islamic Shari'ah law was introduced to Aceh, as a part of the Law on Governing Aceh (LoGA), women's representatives were not involved . When Women's Policy Network, a local non governmental organisation concerned with gender equality issues, campaigned for the insertion of gender sensitive provisions to the draft of LoGA, male members of parliament were reluctant to include such provisions because they considered their focus on women to be negatively discriminatory to men. Women were considered only as objects of political processes, not active subjects .

Third, women's organizations cite exhausted capacity as a critical factor limiting their involvement in implementing the MOU. Women organizations in Aceh are finding it hard to conduct their grassroots activities and contributing to higher level policy discussions and advocacy due to the lack of human resources. Adding to this is the fact that,

while male counterparts in NGOs work full-time, a large number of women activists contribute only on a part-time basis as they have other, especially family, obligations . As for financial resources, they are not the issue, as donors have channelled more funds than the organisations capacity can absorb .

Despite the above limitations, it is important to take into account the contributions that Acehnese women have made to the MOU's implementation and to ensuring that women's rights in Aceh are represented in this process.

NGO & EMPOWERMENT OF WOMEN IN ACEH'S PEACE PROCESS

In Aceh's case, NGOs are crucial elements in building peace and justice. When looking at the societal development of Aceh, it has to be underlined that the local NGO has played a pivotal role already through the years of conflict. These local NGOs have been actively searching for various ways of obtaining peace despite that fact that many were silenced and shut down . However this situation has also contributed to the rise of a new generation of Acehnese who have been committed to develop Aceh in a peaceful and non-violent way. An unarguable fact that can be obtained from all Acehnese, both men and women is that peace and the maintenance of peace is a top priority

for them. The signing of the Helsinki agreement on the 15 August 2005 has brought a sigh of relief to the battered local population and the nation in general after decades of protracted conflict and the devastating tsunami disaster in 2004.

For Acehnese women, the Helsinki peace agreement has a greater meaning. Women feel that with peace in Aceh they can regain their freedom. Freedom to farm, to do business, to work and to travel . With the new sense of freedom, women are looking forward to having more opportunities to express themselves freely in the peacebuilding process in order to develop and reconstruct Aceh. The urge to voice their concerns and make decisions on issues relating to health and education are becoming more intense. As stated before, the main problem in Aceh's peace process related to gender issues is the exclusion of women from the peace process itself. Womens concerns and views were marginally accomodated by signatories of the MOU leading to specific laws that take women and children into account being neglected. During the drafting of the Law on Governance of Aceh for instance, only two women were involved and out of 15 gender related issues that was proposed, only 6 were taken into account in the draft that was sent to Jakarta . After the peace agreement was signed between the government and GAM, attempts were

made by women activist to have women's voices and concerns heard in processes like law development and distribution of donor assistance. The government also has made efforts to address these concerns through the bureau for Women's Empowerment at the Governors office. Limited resources, however, were seen to be a constraint for the bureau .

With the growing urge of voicing their concerns and getting involved in the decision making processes of Aceh, women begun to engage on building women grassroots NGOs coordinated by single networks such as the Womens Peace Network. The Woman's Peace Network was established in Desember 2005 with purpose of women's groups working together more closely, for women to get more information about the peace process, and above all, to support the maintenance of peace in Aceh. It includes 26 organisations. These NGOs under the coordination of larger NGOs such the Womens Peace Network involved in socialising peace, Women's Policy Network involved establishing gender mainstreaming from a regulatory and law point of view have lead to the following developments in gender equity and mainstreaming in Aceh:

- The establishment of more women organization networks that are familiar with women's issues.

- The establishment of regular meeting and improved communication among NGOs, local government, national government and international community.
- The initiation of dialogues between women's groups and key stakeholders in the peace process.
- Improved understanding of the MOU and peace process so far among women NGOs.
- Enhanced capacity of women's NGOs to educate their beneficiary populations about the peace process and solicit information about womens needs.

Due to the limitations imposed on women participate actively and openly in the peace process, the constructions of structures in parallel (NGOs) to the various institutions mandated with the MOU's implementation, such as the Womens Peace Network and the Womens Policy Network, women have been able to assist the implementation of the MOU while at the same time ensuring that womens rights are taken into consideration at the process.

CONCLUSION

As women represents the majority of the Acehnese people, they also form the majority of the decision makers in a democratic system. The empowerment of women in the decision making process in

Aceh would help contribute to the peacebuilding process which aims at creating sustainable peace. As shown in this research, the role of NGOs as parallel institutions of structure mandated by the MOU has enable Acehnese women to do their part in the implementation of the MOU, thus making a significant contribution to the peacebuilding process in Aceh.

Due to the limitations imposed on women participate actively and openly in the peace process, the constructions of structures in parallel (NGOs) to the various institutions mandated with the MOU's implementation, such as the Womens Peace Network and the Womens Policy Network, women have been able to assist the implementation of the MOU while at the same time ensuring that womens rights are taken into consideration at the process.

Although the presence of NGOs has brought significant change in lives of many women in Aceh by having forwarding their voices and concerns to stakeholders of the MOU, more assistance is needed specifically from the national government and international community to aid the activities of NGOs. Training on women's rights and gender sensisitive programmes should be introduced. Proper representation of women in all organizations and decision-making bodies that deals especially to

community related issues should be established. Government could also request funding from the international community to provide aid for women NGOs or gender mainstreaming organisations in Aceh.

REFERENCE

- Aceh, S . P. (2006, May 25). Womens Involvement in the Aceh Peace Process. (C. M. Initiative, Interviewer)
- Andarlina, S. N. (2000). Women at the Peace Table: Making a Difference. New York: The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM).
- Ayissi, A . &. (2006) . Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone. United Nations
- CIDA . (1998). Gender Equality & Peacebuilding: An Operational Framework. Canadian International Development Agency.
- Clark, G. (1998) . The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and Protest in the Philippines. London: Routledge Press.
- Corrin, C. (2008). GENDER AUDIT OF RECONSTRUCTION PROGRAMMES IN SOUTH EASTERN EUROPE. New York: The Urgent Action Fund and The World's Commission for Refugee Women and Children.
- UNIFEM. (2005). Securing the Peace: Guiding the International Community towards Women's Effective Participation throughout Peace Processes. New York: United Nations Development Fund for Women.
- Kamaruzzaman, S. (2008) . Agents for change : The roles of women in Aceh's peace process. In C. Resources, Reconfiguring politics : the Indonesia – Aceh peace process (pp. 70-71). London: Conciliation Resources.

PERANAN NGO SEBAGAI REPRESENTASI PEREMPUAN TRANSNASIONAL DALAM RANGKA IMPLEMENTASI CEDAW DI MALAYSIA

Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh, Rashila Ramli

sharifahsyahirah@gmail.com, rashramli@yahoo.com

This article aims to discuss the role of NGOs in the efforts of empowering women in Malaysia through political representation that cross national boundaries. This Political representation happened after the Government of Malaysia ratifies the Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and sent it to the CEDAW Committee: The First and The Second Report of Malaysia CEDAW in 2004. Through CEDAW, women NGOs had the opportunity to represent Malaysian woman by including them into NGO Shadow Report CEDAW Malaysia at the 35th session, May 22, 2006. Thus, this paper has three objectives studies, first, is to highlight CEDAW's system that has enabled NGOs representing women globally. Second, is identify NGOs and played a substantive role. Third, analyzing the strength of NGO's influence to ensuring the Malaysian Government and the progress of CEDAW's domestication and women empowerment in Malaysia. Qualitative methods used to conduct interviews with 13 respondents among woman NGOs who has been involved directly and indirectly in the structure of CEDAW. Emphasis was also given to official documents, especially records Conclusion-732 Meeting-35th Session of the CEDAW Committee and Conclusions Comments of the CEDAW Committee. Primary data was obtained through observation and participation by attending 17 meetings, workshops and conventions that related to the women affairs in Malaysia which has been held during 2007 to 2009. This article will apply the social constructivist approach to global politics and upholding the feminist epistemology has been to strengthen the role of NGOs in the context of female political representation across the national border. This article finding that there are at least 30 NGOs showed involved descriptively. In terms of substantive representation, at least 24 roles have played a substantive role in voicing the interests of Malaysian women in the global governance.

Keywords: NGOs, Women's Movement, Women Political Rights

PENDAHULUAN

Menurut data Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia pada tahun 2010, kaum perempuan di Malaysia terdiri dari 49.1% populasi, yaitu 13,614,600 dari 27,738,900 orang rakyat Malaysia. Sebanyak 32% berusia 14 tahun kebawah, 63.3% berusia 15 hingga 64 tahun dan 4.7% berusia 65 tahun keatas. Perempuan di Malaysia terdiri dari berbagai kaum yaitu Melayu, China,

India, bumiputera Sabah dan Sarawak. Terdapat juga golongan perempuan warganegara asing seperti warganegara Indonesia, Filipina, Thailand, Cambodia dan Rohingya. Dari segi agama, sebanyak 60.4% rakyat Malaysia beragama Islam, 19.2% beragama Buddha, 9.1% beragama Kristian, 6.3% Hindu, 2.6% beragama Confusion dan Toaism, 0.8% agama puak, 0.8% tidak mempunyai agama dan 0,7% agama lainnya.

Awal tahun 1960an, agenda pemberdayaan perempuan di Malaysia telah mulai dijalankan. Agenda ini ternyata membuahkan hasil dan dibuktikan dengan tercapainya jumlah yang tinggi pada tingkat perempuan yang belajar di universitas, peningkatan dalam sektor pekerjaan serta pembuat keputusan. Namun, jumlah ini tidak mungkin akan terealisasikan jika tidak ada organisasi perempuan yang berupaya mewakili, menyuarakan dan memobilisasi kepentingan perempuan. Tulisan ini memberi tumpuan kepada pemberdayaan representasi politik perempuan yang telah dijalankan oleh berbagai NGO perempuan dalam proses implementasi domestik *Convention on Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW) di Malaysia. Bentuk representasi politik ini merupakan bentuk representasi yang melintasi batas-batas negara yang berhasil diwujudkan dengan adanya ruang dan forum-forum yang mewakili perempuan dalam tingkat global.

Maka, tulisan ini mempunyai tiga objektif kajian yaitu pertama, mengetengahkan mekanisme CEDAW yang telah membolehkan NGO mewakili perempuan di tingkat global. Kedua, mengkaji NGO dan peranan substantif yang telah dimainkan. Ketiga, menganalisis kekuatan NGO dalam mempengaruhi Pemerintahan Malaysia dalam memastikan domestikasi CEDAW

dan kemajuan pemberdayaan perempuan di Malaysia.

KONSEP REPRESENTASI POLITIK TRANSNASIONAL

Representasi politik adalah segala hal yang berkaitan dengan berbagai aktifitas dalam menyuarakan pendapat dan kepentingan dalam berbagai proses membuat keputusan. Representasi politik dapat terjadi jika terdapat aktor yang hadir menyuarakan, mendukung, melambangkan dan bertindak bagi kepentingan golongan-golongan yang diwakili. Konsep ini adalah kompleks karena ia melibatkan berbagai aktor dan mewakili berbagai golongan serta masalah. Namun, ia seringkali dianggap sebagai konsep yang berkaitan dengan struktur dan forum di tingkat nasional saja. Menurut Zaplan (1996), Castiglione and Warren (2004), Rehfeld (2006, 2009), Urbinati (2003), Mansbridge (2005) dan Dovi (2006), transformasi politik global dan domestik telah menyebabkan perubahan dalam bentuk dan sifat konsep representasi politik. Fenomena globalisasi telah membolehkan berbagai aktor tertentu berpartisipasi di tingkat global terutama dalam isu-isu yang lintas batas politik nasional. Golongan lemah seperti perempuan dapat diwakili oleh berbagai aktor yang berupaya menggunakan forum global.

Terdapat peningkatan partisipasi pergerakan sosial dan NGO telah berhasil mempengaruhi rakyat dalam menyuarakan tuntutan-tuntutan demi memenuhi dan memperjuangkan kepentingan golongan-golongan rakyat yang berbeda baik dari segi bangsa, gender, ketidakmampuan fisik bahkan orientasi seksual. Hal ini telah mempengaruhi konsep representasi politik ini (Held & McGrew 2002; Antrobus 2004; Mayo 2005). Representasi politik perempuan adalah salah satu bentuk representasi yang lintas batas negara dan menjadi salah satu agenda global karena ia melibatkan separuh dari populasi dunia (Phillips 1998; Karam 1998; Antrobus 2004). Untuk menganalisis konsep representasi politik ini, Dovi (2006) mengetengahkan empat komponen utama representasi politik yaitu;

- 1) Aktor yang mewakili seperti organisasi, pergerakan atau agen pemerintahan.
- 2) Golongan yang diwakili seperti kawasan, rakyat, kaum atau gender.
- 3) Sesuatu yang diwakili seperti pendapat, kehendak atau pemikiran.
- 4) Satu kerangka, struktur dan situasi yang membolehkan aktifitas representasi berlangsung dalam konteks politik.

Dalam tulisan ini, NGO merupakan aktor yang mewakili kepentingan perempuan Malaysia di tingkat global yang telah menghantar Laporan NGO Shadow mengenai Laporan Pertama dan Kedua CEDAW Pemerintahan Malaysia (2005). Aktor-aktor yang berperan mewakili perempuan di Malaysia terdiri dari tiga aktor utama yaitu CEDAW-PBB, Pemerintah Malaysia dan masyarakat sipil. Hal-hal yang diwakili adalah kerangka CEDAW yang terdiri dari Pasal 1 hingga Pasal 30. Satu kerangka, struktur dan situasi yang membolehkan aktifitas representasi berlangsung adalah CEDAW sebagai forum global yang berada dalam ruang sosialisasi politik global.

Zapplan (1999), Dovi (2006), Urbinati (2006), Mansbridge (2005) dan Castiglione & Warren (2005) berpendapat bahwa teori, kajian demokrasi dan representasi politik sering kali hanya terbatas pada representasi politik formal saja. Oleh karena itu, konsep representasi tersebut bersifat sukar dan rumit (*elusive*) serta hanya digunakan untuk aktor politik negara dalam konteks yang negara dan kawasan. Teori ini tidak berupaya menjelaskan perkembangan gerakan sosial serta organisasi tidak formal yang kini sering kali berperanan dalam mewakili golongan-golongan tertentu terutama golongan lemah dan minoritas. Selain itu, hubungan di antara

representasi politik formal dan representasi politik tidak formal ini tidak dapat dijelaskan oleh teori dan kajian representasi politik yang terbatas. Maka, tulisan ini mencoba mengembangkan konsep representasi politik ini dengan menerapkan dan menganalisis representasi politik tidak formal dan meluaskan kajian representasi pada ruang sosialisasi politik global yang tidak terbatas pada negara dan kawasan.

Tulisan ini memberi tumpuan kepada pengaplikasian dua sudut pandang representasi politik dan mengukur sejauh manakah keberadaan aktor yang mewakili perempuan dalam ruang pemerintahan global berperan demi kepentingan perempuan di Malaysia. Dua sudut pandang representatif politik yang ditumpukan adalah sudut pandang representasi deskriptif dan sudut pandang representasi substantif. Sudut pandang representasi deskriptif adalah untuk menjawab persoalan berkaitan dengan sejauh manakah aktor yang mewakili melambangkan golongan yang diwakili dan adakah aktor tersebut mempunyai persamaan dari segi rupa, pengalaman dan situasi kehidupan. Phillips (1998) mengetengahkan konsep 'politik kehadiran' bagi menggantikan konsep representasi tradisional yaitu '*politics of idea*'. Bagi Phillips (1998) golongan minoritas perlu mempunyai aktor yang mewakili secara fisik dan bukan hanya

diwakili dengan ide saja. Perempuan perlu hadir untuk mewakili kaum perempuan secara fisik demi memastikan kebijakan serta keputusan pemerintah sesuai dengan keinginan, kepentingan dan situasi perempuan. Keberadaan representasi deskriptif ini dapat memastikan peningkatan representasi substantif. Sapiro (1998) berpendapat bahwa representasi dari populasi perempuan diperlukan karena populasi ini mempunyai pendapat dan corak pemikiran tersendiri. Golongan perempuan berupaya memberi kesan proaktif dalam institusi, kepimpinan, politik dan membuat keputusan yang lebih seksama dalam negara.

Di Malaysia, kepentingan dan penjabaran dari representasi deskriptif perempuan telah diwacanakan dari perspektif lokal dan nasional oleh Lenore (1981), Dancz (1984), Nik Safiah Karim (1984), Jamilah Ariffin (1984), Rashila Ramli (1998, 1998^a, 1999, 1999a), Saliha Hassan (2005), Sharifah Zaleha Syed Hassan (1998, 2006), Maznah Mohammad (2001, 2002) dan Lai Suat Yan (2003, 2004). Ahli-ahli akademik ini juga mempercayai bahwa representasi deskriptif merupakan upaya untuk memastikan pembangunan representasi substantif. Sudut pandang representasi substantif merujuk kepada tindakan yang dijalankan oleh aktor yang mewakili untuk memenuhi kepentingan, kehendak dan pendukung agenda komuniti yang

diwakili. Analisis representasi substantif ini merujuk kepada hasil dan usaha yang telah dijalankan oleh berbagai aktor yang mewakili kepentingan golongan yang diwakili (Sanbotmatsu 2006). Dalam hal ini, kajian ini menggunakan pendekatan 'hal pribadi adalah politik' (*the personal is political*) yang dipopulerkan oleh feminis radikal dan telah diterima oleh aliran feminis lain.¹ Representatif substantif juga dinilai melalui upaya dan power yang dimiliki oleh berbagai aktor yang mewakili dalam menengahkan agenda perempuan di Malaysia melalui kerangka kerja CEDAW. Maka, representasi politik merupakan suatu dimensi pemberdayaan perempuan yang terpenting dalam memastikan domestikasi CEDAW di Malaysia.

CEDAW: Mekanisme Pemerintah Global

Sebagai konferensi internasional, CEDAW mempunyai beberapa limitasi yang disebabkan oleh sejarah hubungan internasional yang mendukung prinsip *state-centric*. Namun, keberadaan peraturan pemerintahan global telah membolehkan CEDAW mempengaruhi

Pemerintah Malaysia untuk memastikan diskriminasi terhadap perempuan dihapuskan. Pemerintah Malaysia telah menyiapkan Laporan Pertama dan Kedua CEDAW pada tahun 2004 dan mengutus sejumlah besar delegasi untuk mempresentasikannya pada tahun 2006. Ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat limitasi dari segi undang-undang dan status CEDAW sebagai konferensi internasional, Pemerintah Malaysia menyetujui kesepakatan pemerintahan global yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah negara yang meratifikasi CEDAW. Hal ini merupakan legalisasi CEDAW dalam berperan sebagai mekanisme pemerintahan global yang telah mewujudkan representasi politik perempuan di Malaysia yang diwujudkan dalam ruang sosialisasi politik pemerintahan global.

Analisis normatif pemerintahan global dapat digunakan untuk mengukur kekuatan CEDAW sebagai platform dan mekanisme global yang telah membolehkan keberadaan berbagai aktor untuk mewakili perempuan di Malaysia. CEDAW merupakan salah satu dari sembilan perjanjian hak asasi manusia utama yang didukung oleh PBB dan merupakan perjanjian internasional hak asasi manusia yang terbanyak diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB yaitu 186 negara dari 192 negara (*Womenwatch DAW, CEDAW-PBB* 2009). Dalam tulisan ini, CEDAW tidak

¹ Terdapat berbagai aliran feminis yang dipengaruhi dan mengkritik aliran rasional yaitu feminis liberal, feminis maxis, feminis radikal, feminis poskolonial dan feminis posmodern. Walaupun menyadari kemajemukan pendekatan dan interpretasi feminis, kajian ini lebih tertumpu kepada sasaran utama feminis saja yaitu untuk memastikan tidak ada kesamaan dan kesetaraan perempuan.

dinilai hanya sebagai salah satu konferensi internasional hak asasi manusia saja, tetapi ia juga merupakan salah satu mekanisme global yang telah mewujudkan ruang sosialisasi pemerintahan global.

Menurut Dingwerth (2003, 2004), terdapat tujuh prinsip utama mekanisme pemerintahan global yang diwujudkan melalui institusi internasional seperti CEDAW yaitu partisipasi, ketermasuk, akauntabilitas, efektifitas, timbal balik (*reciprocity*), universalitas dan rasionalitas. Tulisan ini menganalisis CEDAW sebagai mekanisme pemerintahan global dari tiga aspek yaitu latar belakang CEDAW, Pasal 1 hingga Pasal 16 dan sistem struktur CEDAW.

a. Sejarah Terbentuknya CEDAW

Sejarah terwujudnya CEDAW menunjukkan eksistensi prinsip partisipasi dan universalitas. Pertama, CEDAW adalah konferensi internasional yang terbentuk dari hasil partisipasi dan jaringan kerja NGO perempuan **global**²

² Gerakan dan organisasi perempuan global (terutamanya Barat) telah mulai semenjak pendirian *League of Nations*. Ketika PBB berdiri, gerakan perempuan global ini telah memastikan isi Piagam PBB (1945) mendukung kesetaraan dan keadilan di antara lelaki dan perempuan. Pada tahun 1946, *Commission on the Status of Women* (CSW) telah didirikan dan menjadi mekanisme utama mempromosi kepentingan perempuan dunia. Usaha pergerakan perempuan global ini semakin menampakkan hasil apabila Deklarasi Universal Hak Kemanusiaan juga telah mengakui kesetaraan gender (Karl 1995; *Womenwatch* DAW-PBB 2010).

(Karl 1995; *Womenwatch* DAW-PBB 2010). Kedua, prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW adalah hasil dari penggabungan enam konferensi internasional yang terdahulu yaitu *Convention for the Supression of Traffic in Persons and Exploitation of the Prostitution of Others* (1949), *Convention Concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value* (ILO) (1951), *Convention on the Political Rights of Women* (1952), *Convention Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (ILO) (1958), *Convention against Discrimination in Education* (UNESCO) (1962) dan *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age of Marriage, and Registration of Marriage* (1964). Hal ini menunjukkan bahwa CEDAW merupakan konferensi yang bersifat universal dari segi aspek-aspek yang mewakili perempuan.

b. Pasal 1 hingga Pasal 16 CEDAW.

Pertama, sebagai konferensi hak asasi manusia CEDAW telah menyiapkan definisi diskriminasi yang mendukung prinsip universalis. Pasal 1 menyatakan;

For the purposes of the present Convention, the term 'discrimination against women' shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on basis of equality of men and women, of human rights and

fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Pasal 1 ini telah secara teliti memberi definisi diskriminasi yang termasuk dalam dukungan terhadap prinsip universalitas. Hal ini berbeda dengan definisi yang telah dibuat oleh Pemerintah Malaysia yaitu;

The is no clear definition of the term 'discrimination against women'. However, for practical purposes, it is often interpreted to mean treating women differently to men to detriment women.

(Laporan Permulaan dan Kedua CEDAW Malaysia 2004)

Definisi diskriminasi yang diberikan oleh Malaysia mempunyai ruang lingkup yang sangat sempit dan tidak mendukung prinsip universalitas. Definisi ini menjadi lebih sempit lagi karena ditambah dengan pernyataan bahwa pemerintah Malaysia mendukung implementasi tradisi dan adat yang notabene nya membedakan peran laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan Pemerintah Malaysia tidak menerima prinsip universalitas yang disebabkan oleh keberpihakan mutlak terhadap kepentingan adat dan tradisi. Dalam analisis hak asasi manusia, Malaysia mendukung doktrin relativis berbanding doktrin universalis yang didukung oleh CEDAW dan konferensi-konferensi hak asasi manusia lain. Sifat universalitas CEDAW juga dapat dilihat dari segi aspek-aspek yang mencerminkan

perwakilan terhadap perempuan dari kandungan Pasal 1 hingga Pasal 16. Berikut adalah Tabel 1 yang menunjukkan isi CEDAW. Enam belas pasal dalam CEDAW ini menggambarkan prinsip universalitas dan masuknya semua golongan perempuan dalam memastikan bentuk diskriminasi apapun terhadap perempuan harus dihapuskan. Tabel 1 menunjukkan ringkasan Pasal 1 hingga Pasal 16 CEDAW.

Tabel 1 : Ringkasan Pasal 1 hingga Pasal 16 CEDAW

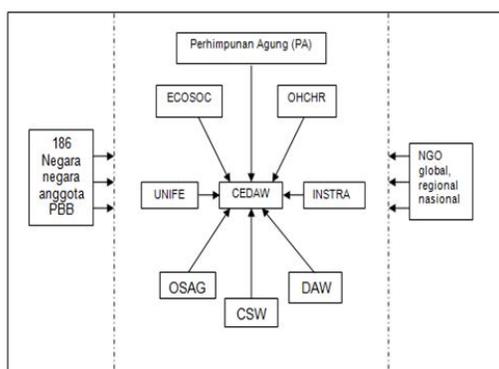
Artikel	Kandungan Artikel
Artikel 1	Definisi 'diskriminasi terhadap perempuan'.
Artikel 2	Penolakan 'diskriminasi terhadap perempuan' dan komitmen untuk menghapuskannya.
Artikel 3	Kesamaan dan kebebasan hak perempuan dan laki-laki.
Artikel 4	<i>Special measures.</i>
Artikel 5	Implementasi tradisi dan stereotype.
Artikel 6	Eksplotasi perempuan dan pelacuran.
Artikel 7	Kehidupan publik dan politik.
Artikel 8	Representasi dalam organisasi internasional.
Artikel 9	Kewarganegaraan.
Artikel 10	Pendidikan.
Artikel 11	Pekerjaan dan hak-hak pekerja.
Artikel 12	Kesehatan.
Artikel 13	Hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Artikel 14	Perempuan luar kota.
Artikel 15	Hak-hak perundangan dan kapasitas perjanjian.
Artikel 16	Keluarga dan perkawinan.

Sumber: Diolah oleh penulis dari CEDAW (2010)

c. Struktur CEDAW

Analisis struktur dan mekanisme CEDAW dapat dibagi menjadi dua, yaitu analisis struktur melalui jaringan dasar global dan sistem penyerahan dan ruang lingkup CEDAW. Struktur CEDAW melalui jaringan global dengan Negara-negara anggota PBB, agen PBB dan konferensi-konferensi perempuan internasional. Jaringan dasar global menjadikan isi CEDAW salah satu dasar penting dalam membuat keputusan dan resolusi seperti di konferensi-konferensi perempuan sedunia. Selain itu, CEDAW juga mendapat sokongan politik, pembentukan, pembiayaan dan penyelidikan. Gambar 1 menunjukkan jaringan global CEDAW,

Gambar 1: Jaringan Dasar Global CEDAW.



Sumber: Sharifah Syahirah (2011)

Gambar 1 menunjukkan keberadaan berbagai aktor yang mempunyai jaringan dasar global dengan CEDAW. Jaringan dasar global termasuk prinsip, visi misi dan pasal-pasal CEDAW telah didukung

oleh berbagai aktor global lain terutama agen-agen PBB dan NGO bagi agenda perempuan. Keterlibatan Perhimpunan Agung PBB, ECOSOC dan CSW telah dinyatakan dalam Pasal 21 CEDAW. Ia menyatakan bahwa laporan pengambilan keputusan dan pergantian ketua CEDAW dilakukan pada setiap Sidang Umum PBB melalui ECOSOC mengenai aktifitas, serta saran yang berasaskan penelitian laporan-laporan dan maklumat yang diperoleh dari negara-negara anggota. Laporan tersebut akan diteruskan ke CSW oleh Majelis Umum PBB. CSW merupakan komponen PBB yang bertanggungjawab merancang dan menjadikan CEDAW sebagai sebuah konferensi internasional. Keterlibatan agen-agen PBB yaitu OHCHR, UNIFEM dan INSTRAW adalah berdasarkan misi, prinsip dan objektif yang berlandaskan isi CEDAW. DAW dan OSAGI adalah dua badan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dokumentasi, menerima dan membuat laporan. CEDAW. Semenjak tahun 2009, tugas ini telah dipindahkan ke OHCHR.

Gambar 1 juga menunjukkan 186 negara-negara anggota PBB yang telah meratifikasi CEDAW. Sebagai konferensi internasional, ratifikasi dari 186 negara anggota merupakan ratifikasi yang terbesar berbanding dengan konferensi-konferensi hak asasi manusia lain. Ini menguatkan sistem pemerintahan melalui jaringan dasar global. Dalam

konteks Malaysia, peranan negara-negara anggota PBB ini dapat dilihat ketika para anggota membantah penambahan dan pengecualian kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Malaysia. Pasal 23 hingga Pasal 30 telah menyatakan mengenai status, jaringan kerja dan hubungan konferensi dengan negara-negara yang telah meratifikasinya. Ciri rasionalitas dapat dilihat melalui Pasal 23 yang menyatakan tidak ada *provision* dalam konferensi yang boleh menentukan yang mana yang lebih sesuai untuk mencapai kesamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terkandung dalam perundang-undangan negara anggota dan konferensi internasional, perjanjian atau persetujuan yang dibuat untuk negara tersebut. Ciri akauntabilitas juga didukung oleh Pasal 24 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota berjanji untuk mengambil semua langkah yang diperlukan di tingkat nasional dengan maksimal untuk mencapai hak-hak sepenuhnya yang telah dibahas dalam konferensi. Prinsip universalitas, rasionalitas, partisipasi, akauntabilitas, transparansi dan timbal balik didukung oleh Pasal 25, Pasal 26 hingga Pasal 30.

Keberadaan NGO nasional, regional dan global dalam jaringan dasar global CEDAW dapat dilihat melalui partisipasi NGO dalam sistem penyerahan dan pembuatan laporan

CEDAW. NGO bertugas menyiapkan laporan NGO *Shadow* jika pemerintah mengeluarkan laporan resmi. Dalam konteks Malaysia, terdapat dua NGO utama yaitu NCWO dan JAG yang terlibat secara langsung dalam proses ini. Proses penyerahan dan pembuatan laporan ini juga melibatkan NGO regional dan global seperti IRAW-Asia Pasifik. NGO ini berperan sebagai 'mediator' dalam menjelaskan kepentingan dan prosedur yang perlu diikuti oleh NGO dan negara anggota apabila sudah bersedia untuk mempresentasikan laporan masing-masing. Dalam sesi ke-32 pembuatan laporan CEDAW, para pembuat keputusan CEDAW yang sudah satu suara kemudian saling menyetujui untuk mengkaji dan memperincikan peranan NGO sebagai salah satu pendukungnya (IRAW-Asia Pasifik 2010). Maka, sistem pemerintahan melalui jaringan dasar global CEDAW adalah berasaskan prinsip partisipasi dan universalitas.

Sistem penyerahan dan pembentukan laporan CEDAW mendukung semua prinsip pemerintahan global. Pasal 17 menerangkan mengenai pemilihan pihak-pihak pemegang keputusan CEDAW yang terdiri dari dua puluh tiga orang pakar yang memenuhi prinsip universalitas. Pemilihan pihak-pihak pemegang keputusan CEDAW perlu mencakupi wakil dari setiap benua.

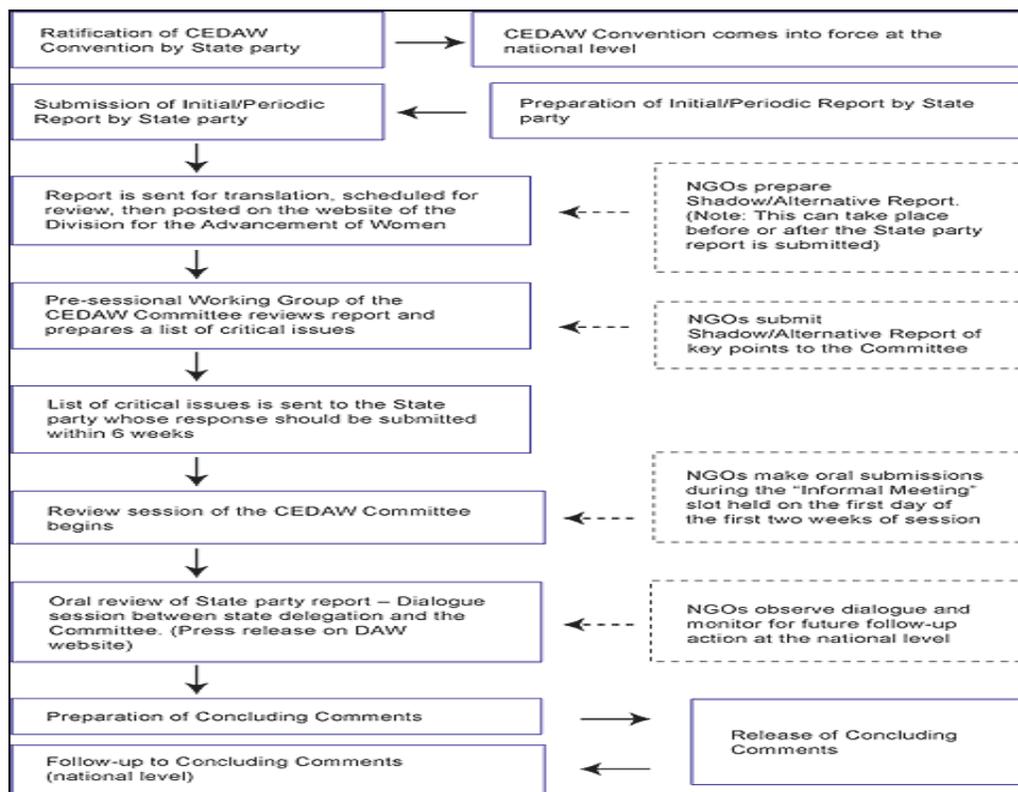
Melalui penyerahan dua jenis laporan yaitu resmi dan *shadow* menunjukkan sistem ini mendukung prinsip akuntabilitas. Sesi tidak formal bersama NGO mendukung pandangan alternatif dan usaha untuk mengurangkan sifat *state-centric* konferensi internasional memaparkan sistem pemerintahan CEDAW yang mementingkan prinsip partisipasi, timbal balik dan rasionalitas, sedangkan sesi tanya jawab di antara pemerintahan dengan pemimpin CEDAW yang disaksikan oleh NGO menunjukkan sistem ini mendukung ciri-ciri akuntabilitas, transparansi dan timbal balik. Ciri-ciri transparansi juga dapat dilihat melalui usaha memasukkan semua dokumentasi dan transkrip yang berkaitan dengan laporan CEDAW dalam satu wadah dengan dokumentasi DAW dan OHCHR. Dokumentasi dan bahan-bahan mengenai CEDAW juga bisa dilihat dalam NGO regional seperti IWRAW-Asia Pasifik.

Walaupun, CEDAW memberi status resmi kepada partisipasi pemerintahan negara dan status tidak resmi kepada NGO. Namun, sistem ini

menggalakkan aktifitas representasi yang berlaku dengan membolehkan representasi tidak resmi memainkan peranan. Kekuatan prinsip transparansi dalam pemerintahan telah menjadikan perbedaan status resmi dan tidak resmi ini tidak menghalangi NGO untuk mewakili perempuan dari perspektif apapun melalui Laporan *Shadow*. Zaitun Kassim (2007), Ivy Josiah (2007) dan Rozana Isa (2007) menyatakan walaupun waktu yang diberikan untuk NGO terbatas, pemimpin-pemimpin CEDAW seringkali mempercepat Laporan *Shadow* dalam sesi soal jawab dengan pemerintahan. Dalam konteks Malaysia, kajian ini mendapati hal tersebut berlaku. Gambar 2 menunjukkan struktur CEDAW yang telah berupaya kepada NGO untuk mewakili perempuan di tingkat global.

Gambar 2 juga menunjukkan peranan dua aktor utama lain yang terlibat yaitu Pemerintah Malaysia dan agen PBB *Division for the Advancement of Women* (DAW) serta pemimpin CEDAW.

Gambar 2: Struktur dalam Laporan Pelaksanaan CEDAW



Sumber: IWRAW-Asia Pasifik (2010)

Setelah Pemerintah Malaysia menyerahkan laporan resmi, pihak DAW telah menjadwalkan sesi perumusan dan memasukkan tabel sesi serta laporan resmi tersebut ke dalam dokumentasi DAW. Kemudian, satu *Pre-sessional Working Group Pemimpin-pemimpin CEDAW* diadakan untuk meneliti laporan resmi. Dalam sesi ini, Pemimpin CEDAW telah menguraikan isu-isu perempuan yang perlu dijelaskan dengan lebih mendalam oleh Pemerintah Malaysia. Pada masa yang sama, NGO di Malaysia telah membuat laporan NGO *Shadow* dan sejalan dengan isu-isu penting mengenai

perempuan di Malaysia. Dua dokumen dari pihak NGO ini diteliti oleh pemimpin CEDAW dan dibandingkan dengan informasi dalam laporan resmi Pemerintahan Malaysia. Setelah penelitian ini, satu persatu isu-isu kritis mengenai perempuan di Malaysia diserahkan pada 10 Februari 2006 kepada pihak Pemerintahan Malaysia untuk dijawab dan diserahkan kembali kepada pemimpin CEDAW dalam tempo enam minggu.

Pada bulan Mei 2006, Pemerintah Malaysia dan NGO telah hadir untuk membahas laporan. NGO terlebih dahulu membahas Laporan

NGO *Shadow* kepada pemimpin CEDAW hari kedelapan sesi ke-35 yaitu 22 Mei 2006. Kemudian pada 24 Mei 2006, delegasi Pemerintah Malaysia yang diketuai oleh Faizah Tahir membahas laporan resmi kepada Pemimpin CEDAW. Sesi pembahasan dan perumusan yang disertakan dengan sesi tanya jawab tersebut telah berlangsung selama 5 jam 20 menit yaitu dari jam 10 pagi hingga 1 siang dan 3 petang hingga 5.20 petang. Ketika sesi ini berlangsung, enam wakil NGO juga turut hadir sebagai pemerhati dan pencatat tindakan susulan bagi pelaksanaan CEDAW yang dinyatakan oleh delegasi Pemerintah Malaysia. Selepas sesi tersebut pada 31 Mei 2006, Pemimpin CEDAW telah membuat kesimpulan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Malaysia untuk merumuskan tindakan selanjutnya di tingkat nasional. Hasil dan kesimpulan ini juga telah dimasukkan dalam dokumentasi DAW demi memudahkan pihak mana saja terutama NGO yang mengetahui pasal-pasal yang perlu digunakan untuk meneliti Pemerintah Malaysia selepas menghadiri sesi pembahasan tersebut.

Sesi Susulan dari pertemuan tersebut dilaksanakan pada 8 Maret 2007, NGO di Malaysia yang telah menyerahkan memorandum kepada menteri KPWKM mengenai pelaksanaan CEDAW di Malaysia yang bertajuk

Memorandum on The Concluding Comments from Committee for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) to the Ministry of Women, Family and Community Development, Malaysia dengan mengetengahkan isi kandungan Kesimpulan Pemimpin CEDAW (2006). Proses penyerahan dan pembahasan Laporan Pertama dan Kedua CEDAW Malaysia (2004) dan Laporan NGO *Shadow* (2005) telah menunjukkan besarnya kekuatan NGO dalam memastikan Pemerintah Malaysia mendomestikasi CEDAW di Malaysia.

BERBAGAI EKSISTENSI NGO:

ANALISIS REPRESENTASI

DESKRIPTIF

Tulisan ini mendapati berbagai NGO yang telah mewakili perempuan dalam usaha mendomestikasikan CEDAW di Malaysia. Pada tingkat awal, IWRAW-Asia Pasifik yang telah berperanan dalam memberi penerangan kepada NGO lokal mengenai proses-proses setelah ratifikasi CEDAW oleh Pemerintahan Malaysia. Terdapat dua sesi pertemuan yang telah diadakan oleh NCWO dan WAO untuk memberi penerangan kepada NGO perempuan mengenai CEDAW. Sesi ini telah dihadiri oleh 30 orang aktivis perempuan

dari NGO.³ Dua sesi penerangan ini telah dikelola oleh IWRAW-Asia Pasifik.

Setelah dua sesi tersebut, Laporan NGO *Shadow Malaysia* (2005) telah disiapkan untuk dibahas dengan 28 masyarakat sipil yang terdiri dari kalangan NGO perempuan, aktivis, ahli akademik, agen pemerintahan dan parti politik. NCWO telah diwakili oleh lima orang ahlinya yaitu Prof Madya Dr. Kiranjit Kaur⁴, Puan Sri Prof Dr. Fatimah Hamid Don, Prof Madya Dr. Norma Mansur⁵, Dr. Hamidah Karim dan Usha Pillay. WAO juga telah diwakili oleh Ivy Josiah, Wathshlah Naidu, Jaclyn Kee, Lee Shook Fong and Mah Xian Shen. Dari JAG, sebanyak 10 orang terlibat yaitu Nik Noraini (SIS), Zarizana Abdul Aziz (WCC), Zaitun Kassim (WCI), Cecilia Ng (WDC), Lynn Oh (WCC), Manohari Subramaniam (AWAM), Angela Foo (SAWO), Anne Lasimbang (PACOS), Gill Raja (SWWS) dan Margaret Bedus (SWWS). Selain itu dari ahli akademik juga terdapat tiga universitas yang terlibat secara langsung yaitu Datin Dr Rashidah Shuib dari Universitas Sains Malaysia (USM), Dr. Hew Cheng Sim dari Universitas Malaysia Sabah (UNIMAS) dan Dr.

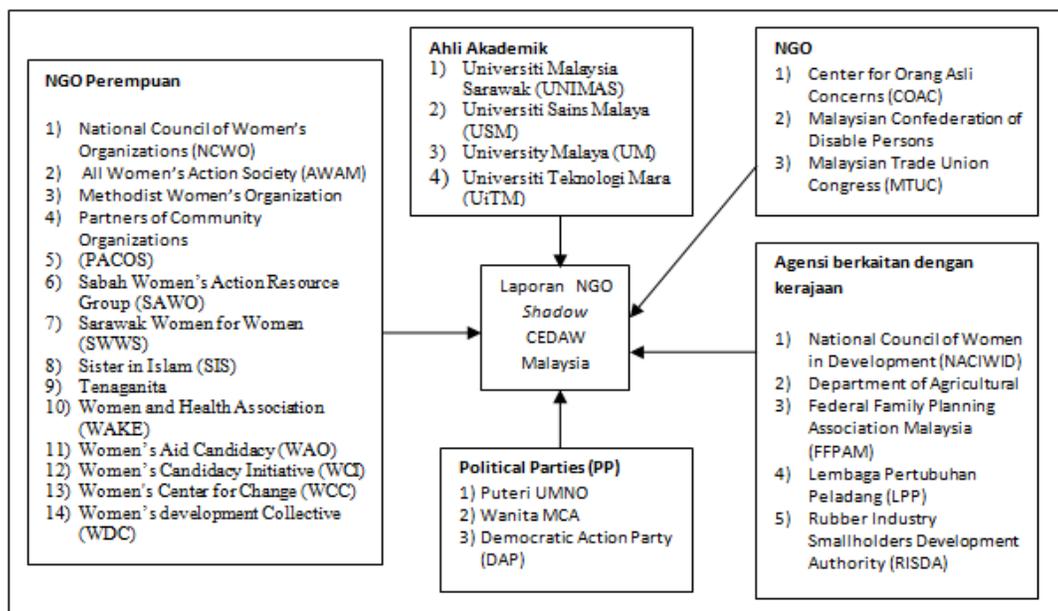
Shanthi Thambiah dari Universitas Malaya (UM).

Selain itu, wakil NGO lain yang terlibat adalah Catherine Arumanayagam (WAKE), Colin Nicholas (COAC), Shellatay Devadason (*Methodist Women Organization*) dan Bathmavathi Krishnan (*Malaysian Confederation of Disable Persons*). Terdapat empat wakil dari Tenaga wanita yaitu Maslina Abu Hassan, Bathmalashanee Muniandy, Aegile Fernandez dan Dr. Irene Fernandez. Terdapat tiga wakil dari partai politik yaitu YB Chong Eng (DAP), Priscillia Yap (MCA) dan Haezreena Begum (Puteri UMNO). Terdapat juga wakil dari agen-agen pemerintahan yang terdiri dari tiga wakil dari Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) yaitu Dr Rokiah Talib, Salbi Ranting dan Che Aloha Bt Sulaiman, seorang dari FELDA yaitu Sarifah Yusof, tiga orang dari Jabatan Pertanian yaitu Dr. Husna Sulaiman, Zaliha Othman dan Redza Baba, seorang dari RISDA yaitu Maimun Teop Kamarudin dan seorang dari FELCRA yaitu Azizah Hashim. Gambar 3 menunjukkan 28 aktor dari masyarakat sipil yang telah menyiapkan Laporan NGO *Shadow* (2005);

³ Lihat Annex I dalam Laporan NGO *Shadow* mengenai Laporan Permulaan dan Kedua Kerajaan Malaysia (2005).

⁴ Prof Madya Dr. Kiranjit Kaur merupakan dosen di Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.

⁵ Prof Madya Dr. Norma Mansur merupakan dosen di Universiti Malaya.

Gambar 3: Kemajemukan Aktor Dalam Menyiapkan Laporan NGO Shadow (2005)

Sumber: Sharifah Syahirah (2011)

Melalui jumlah individu dan organisasi yang berpartisipasi dalam menyiapkan Laporan NGO Shadow (2005), dapat dilihat jumlah representasi deskriptif dari segi jumlah perempuan dari berbagai kaum dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus untuk aspek-aspek yang mewakili perempuan di Malaysia. Kemudian, pada Sesi ke-35, masyarakat sipil telah diwakili oleh enam delegasi yaitu Dr. Hamidah Karim (NCWO), Zaitun Kassim (SIS), Ivy Josiah (WAO), Vizla Kumaresan (WAO), Meera Samanther (WAO) dan Zarizana Abdul Aziz (WCC). Dua dari enam delegasi ini telah membahas laporan NGO Shadow yaitu Dr. Hamidah Karim dan Zaitun Kassim.

Jumlah partisipasi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai NGO, ahli akademik, partai politik dan agen pemerintahan menunjukkan sistem dan mekanisme CEDAW telah berhasil mewujudkan berbagai aktor mewakili perempuan di Malaysia dalam ruang pemerintahan global. Keterlibatan deskriptif berbagai aktor dalam masyarakat sipil ini disebabkan oleh kerangka CEDAW yang telah merangkumi berbagai aspek perempuan dan setiap aktor yang terlibat mempunyai aspek khusus seperti bagi golongan perempuan asing.

PERANAN SUBSTANTIF

Melalui analisis peranan substantif yang dimainkan oleh NGO dalam beberapa fase utama dalam pemerintahan CEDAW, terdapat sekurang-kurangnya 24 tindakan dan peranan substantif yang telah dijalankan oleh NGO untuk mewakili perempuan di Malaysia di tingkat global. Fase-fase tersebut adalah; Empat fase ini telah menyiapkan platform kepada NGO perempuan untuk mengetengahkan pandangan, kritikan dan cadangan mereka mengenai pelaksanaan kerangka CEDAW di Malaysia. Tabel 2 menunjukkan peranan substantif yang telah dimainkan oleh masyarakat sipil terutamanya NGO perempuan dalam memastikan domestikasi CEDAW di Malaysia.

**Tabel 2 : Peranan Substansif
Berbagai Aktor dari Tiga Entiti Utama**

No.	Peranan substantif	No	Peranan substantif
1.	Mengumpulkan data	13.	Partisipasi
2.	Menyiapkan dokumen	14.	Mobilisasi
3.	Mengkoordinasi	15.	Menegaskan
4.	Mengumpul dana	16.	Menjanjikan
5.	Menerangkan	17.	Meningkatkan kesadaran
6.	Mengetengahkan	18.	Melobi
7.	Membincangkan	19.	Mempengaruhi
8.	Menyokong	20.	Mencetuskan keraguan
9.	Meminta	21.	Membantah
10.	Mengadakan kerjasama	22.	Mengkritik
11.	Meneliti	23.	Mencadangkan
12.	Mengenal pasti	24.	Merumuskan

Sumber: Sharifah Syahirah (2011)

Dari Tabel 2, terdapat sekurang-kurangnya 24 peranan dan tindakan yang telah diketahui melalui analisis peranan aktor melalui empat fase yang

telah dibahas. Peranan masyarakat sipil melalui kerjasama berbagai aktor terutamanya NGO perempuan yaitu NCWO, WAO, JAG dan ahli akademik menunjukkan kesungguhan mereka dalam mengkoordinasi dan bekerjasama dalam mengumpulkan data dan menyiapkan Laporan NGO *Shadow* (2005). Terdapat juga usaha pengumpulan dana bagi pihak-pihak yang menghadiri sesi pembahasan oleh WAO dan NCWO. Peranan masyarakat sipil dalam mengetengahkan isu-isu penting mengenai status perempuan di Malaysia telah membantu Pemimpin CEDAW untuk lebih memahami kelemahan pelaksanaan CEDAW di Malaysia. Masyarakat sipil juga telah mengkritik dan membantah setengah kandungan laporan pemerintah. Entitas ini juga telah bertindak melobi, mempengaruhi dan mencetus keraguan mengenai setengah isi kandungan laporan pemerintah. Di Malaysia, terdapat usaha mobilisasi dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Malaysia mengenai CEDAW seperti penyerahan memorandum dan bengkel mengenai CEDAW. Terdapat beberapa kerjasama dengan berbagai pihak khususnya masyarakat sipil yang telah dijalankan oleh Pemerintahan Malaysia yang diprakarsai oleh KPWKM dalam memastikan pelaksanaan CEDAW di Malaysia. Pemerintahan Malaysia juga telah menjanjikan dan

menyokong kerangka CEDAW seperti menyatakan kesiapan untuk melihat kembali pengecualian bagi Pasal 5 (a) dan Pasal 7 (b).

KESIMPULAN

Pembahasan tulisan ini telah menunjukkan bentuk baru representasi politik yang telah melintasi batas-batas negara. Representasi ini kemudian diwujudkan karena disebabkan oleh perkembangan pemerintahan global yang dihasilkan oleh fenomena globalisasi. Representasi ini bertujuan untuk mewakili golongan yang telah dipinggirkan dalam representasi formal di tingkat nasional seperti kaum perempuan. Analisis CEDAW sebagai mekanisme pemerintahan global menunjukkan bahwa sistem konferensi ini telah membolehkan NGO berperanan

dalam mewakili perempuan di Malaysia dalam tingkat global. Secara deskriptif, terdapat berbagai NGO perempuan dan aktor-aktor lain dalam masyarakat sipil yang terlibat dalam mewakili perempuan di Malaysia untuk memastikan pelaksanaan CEDAW. Analisis representasi substantif menunjukkan bahwa NGO perempuan telah memainkan peranan dan bertindak demi kepentingan dan kehendak wanita di Malaysia dengan berlandaskan kerangka CEDAW. Maka, representasi lintas batas negara ini telah memberi ruang kepada NGO untuk terlibat secara deskriptif dan substantif, Ia juga telah memperkuat suara dan kepentingan isu dan golongan yang telah dipinggirkan dalam negara seperti isu dan kepentingan kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antrobus, Peggy. 2004. *The global women's movement: origin, issues and strategies*. Kuala Lumpur: SIRD.
- Dingwerth, Klaus. 2003. The democratic legitimacy of global public policy networks: analysing the world commission on dams. *Global Governance Working Paper No .* <http://www.glogov.org> [6 April 2007]
- Dingwerth, Klaus. 2004. Democratic governance beyond the state: operationalising an idea. *Global Governance Working Paper No 14 December 2004* <http://www.glogov.org> [6 April 2007]
- Dovi, Suzanne. 2006. Political Representation. Stanford Encyclopedia of Philosophy. <http://plato.stanford.edu> [2 Januari 2006]
- Karam, Azza (pnyt.). 1998. *Women in parliament: beyond numbers*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).
- Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). 2004. *Dasar 30% Tingkat Pembuat Keputusan Wanita*. Malaysia: KPWKM
- Malaysian Government. 2006. *Introduction of combine initial and second period report to the committee on the elimination of discrimination against women (CEDAW) by Datuk Faizah Tahir, secretary general of the Ministry of Women, Family and Community Development Malaysia, 24 May 2006*. New York: UN-DAWN.
- Rashila Ramli, Lubi, Elisa Tita & Djanaeva, Nurgul (pnyt.). 2005. *Seethings and seatings: strategies for women's political participation in Asia Pacific*. Ching Mai: Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
- United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2005. *NGO Shadow Report on Combined initial and second periodic reports of States parties: Malaysia (CEDAW)*. <http://www.un.org/womenwatch/daw/> [20 Mei 2006]
- United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2006. Summary record of the 732nd meeting, 35th Session Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 May 2006, at 10a.m. New York: DAWN. <http://www.un.org/womenwatch/daw/> [28 April 2007]
- United Nations Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs. 2006. Summary record of the 732nd meeting, 35th Session Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 24 May 2006, at 3p.m. New York: DAWN.

<http://www.un.org/womenwatch/daw/> [28 April 2007]

United Nations Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs. 2006. *Concluding*

Comment of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Malaysia.

[http://www.un-
org/womenwatch/daw/](http://www.un.org/womenwatch/daw/) [20 Mei 2006]

NGO DAN PERKEMBANGAN GERAKAN WANITA
STUDI KASUS : NATIONAL COUNCIL OF WOMEN'S ORGANIZATIONS (NCWO)
DI MALAYSIA

Yuni Satia Rahayu

yunisatia@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to explain the development of women's movement in Malaysia done by NCWO. This study is a qualitative research using descriptive analysis techniques, and library research in data collection. This study found that the NCWO is an important women's movement NGO in Malaysia. NCWO in its development have achieved some important progress in the fight for women's rights. Some important areas such as education, health, family, children, violence, media, and disenfranchised rights showed positive results. So, the development of the women's movement through the NGO showed a positive progressive.

Keywords: *Social Movements, Movement Woman's, Non-Governmental Organizations, and NCWO.*

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesenjangan posisi antara pria dan wanita secara fundamental terbentuk melalui konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat. Terutama pada sistem masyarakat yang patriarki, lingkungan sosial dan budaya tanpa disadari telah menciptakan stigma tentang superioritas kaum pria. Secara otomatis stigma itu telah mampu menggeser wanita sebagai kelompok yang marjinal. Berangkat dari realita seperti ini, wanita-wanita yang berpikir maju berupaya memperjuangkan hak asasi mereka agar dapat menjadi mitra sejajar bagi kaum pria.

Gerakan wanita yang berlangsung di dunia tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui

proses panjang. Bermula dari gerakan yang berlangsung di kalangan wanita elit di Eropa, perjuangan gerakan perempuan kemudian meluas hingga ke Amerika Serikat (AS). Di Eropa, mulanya gerakan wanita belum menampakkan hasil signifikan karena tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Setelah bertransformasi ke Amerika Serikat, barulah gerakan wanita mulai dikenal (Melander, 1997: 18). Melalui perjuangan yang diprakarsai *Non-Governmental Organization* (NGO) AS yang bernama *National Organization for Women* (NOW), gerakan wanita telah berhasil menjadi topik pembicaraan penting di PBB. Dimana, perhatian terhadap gerakan wanita kemudian direalisasikan PBB dalam bentuk *Convention on the Elimination of All*

Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (Cook, 1994: 634). Setelah terleleenggaranya konvensi wanita tingkat dunia yang pertama itu, gerakan wanita semakin meluas di kalangan internasional. Selain itu, kondisi internasional yang berdinamika, juga berpengaruh terhadap gerakan wanita. Awal tahun 1980-an – dimana munculnya fenomena globalisasi – membuat gerakan wanita kian mendapatkan momentum pentingnya. Globalisasi membuka peluang munculnya aktor-aktor baru dalam lingkungan global, dan feminisme yang diperjuangkan oleh kalangan NGO dari berbagai negara termasuk salah satu aspek yang diperhitungkan. Hasilnya, gerakan feminisme yang sebelumnya terkesampingkan, selanjutnya berdiferensiasi menjadi gerakan feminisme global yang menyita perhatian masyarakat internasional, dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di tingkat negara.

Gerakan wanita di tiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi internalnya masing-masing. Perbedaan adat, budaya, agama mayoritas, dan tingkat kesejahteraan dan pembangunan mempengaruhi perbedaan motif pergerakan wanita di setiap negara. Akan tetapi dari perbedaan-perbedaan motif pergerakan tersebut terdapat satu kesamaan fundamental, yakni

membebaskan wanita dari kondisi ketertindasan oleh kaum pria dalam segala dimensi kehidupan.

Walaupun tidak dapat dikatakan mutlak, namun secara mayoritas, aktor pergerakan wanita pada setiap negara didominasi oleh NGO (*Non-Governmental Organization*). Mulai dari gerakan feminis yang terjadi di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia secara umum, dilakukan oleh NGO. Termasuk di Malaysia sebagai bagian dari Asia, gerakan wanita juga didominasi oleh perjuangan NGO. NCWO (*National Council of Women's Organizations*) tercatat sebagai NGO pergerakan wanita yang terbesar dan berpengaruh besar pula di Malaysia.

B. Perumusan masalah

Gerakan wanita yang berlangsung di berbagai negara muncul melalui proses perkembangan yang memiliki ciri khas tersendiri pada masing-masing negara. Kendati demikian perkembangan gerakan wanita baik di negara maju ataupun berkembang seperti halnya Malaysia, berhubungan dengan pergerakan sosial yang dilakukan NGO-NGO baik di tingkat domestik maupun yang berafiliasi dengan NGO yang berada di lingkungan global. Oleh karena itu perkembangan gerakan wanita di Malaysia juga dapat dikatakan berhubungan dengan upaya-upaya gerakan wanita yang dilakukan

oleh NGO Malaysia, seperti halnya NCWO. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perkembangan gerakan wanita melalui NGO NCWO di Malaysia.

C. Tinjauan pustaka

Gerakan wanita bukanlah terminologi tunggal yang berdiri sendiri, namun dibangun oleh gagasan secara teoritis, yakni feminisme.

Pemikiran feminisme selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk gerakan wanita yang bertujuan untuk merubah perlakuan diskriminatif yang diterima wanita selama ini. Sedangkan gerakan wanita, pada dasarnya adalah bagian dari pergerakan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sipil. Mayoritas aktor dari gerakan wanita yang berlangsung di dunia adalah NGO.

Jackson dan Jones (1998) mengkaji bahwa gerakan wanita identik dengan terminologi feminisme. Feminisme adalah pemikiran atau ideologi yang berisikan tentang pembebasan wanita dari konstruksi sosial, budaya, dan agama yang memposisikan perempuan pada kelompok nomor dua (Jackson dan Jones: 1998). Namun Sandilands (1999) berupaya untuk memberikan pencerahan. Menurutnya, pembebasan perempuan dalam pemikiran feminisme menghendaki adanya pemisahan antara

gender dan seks. Seks adalah perbedaan biologis (perbedaan jenis kelamin) yang merupakan kodrat Tuhan, dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Adapun gender, perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) yang dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang (Sandilands, 1999: 10). Konstruksi seperti inilah yang dianggap mendasari perbedaan perlakuan antara pria dan wanita.

Pemikiran feminis diaktualisasikan melalui gerakan perempuan.¹ Sarah (1982) menyebutkan bahwa gerakan wanita merupakan perjuangan kaum wanita sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk memperjuangkan persamaan haknya dengan kaum pria. Gerakan wanita tidak bermaksud untuk mengungguli kaum pria. Namun lebih tepatnya merupakan upaya pencapaian eksistensi wanita sebagai mitra sejajar pria dalam berinteraksi pada semua aspek kehidupan (Sarah, 1982: 702).

¹ Terdapat beberapa istilah yang mengacu pada pergerakan kaum feminis, seperti: gerakan wanita, gerakan perempuan, gerakan feminis, kesetaraan gender, dan beberapa istilah yang bersinonim lainnya. Dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah gerakan wanita.

Pada dasarnya gerakan wanita merupakan bagian dari gerakan social yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sipil. Gerakan sosial berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok *civil society* dalam mendukung atau menentang perubahan sosial (Jenkins dan William, 2006). Untuk menjelaskan gerakan wanita yang merupakan bagian dari gerakan sosial, Sijatmiko (2006) memberikan spesifikasi untuk mempermudah mengidentifikasi gerakan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Gerakan sosial terbagi dalam dua bagian. Pertama, *Old Social Movement*. Pergerakan sosial jenis ini memfokuskan isu pada hal-hal yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait dengan satu kelompok misalnya, petani dan buruh. Kedua, *New Sosial Movement*. Gerakan sosial ini lebih berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan (Sujatmiko, 2006: xv). Dari penjelasan ini dapat dicermati bahwa gerakan wanita adalah bagian dari gerakan sosial dengan bentuk *New Sosial Movement*.

Semenjak perkembangan era globalisasi, *New Sosial Movement* seolah mendapatkan momentum yang tepat karena dalam globalisasi banyak bermunculan ragam bentuk baru dalam pola hubungan antar kelompok dalam lingkungan domestik negara dan lingkungan global. NGO kemudian

muncul menjadi salah satu aktor yang dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal dan internasional. Aktor merupakan komponen gerakan wanita yang berperan penting untuk menentukan kualitas pergerakan dalam mencapai keberhasilan. Stetson dan Maszur (2003) secara umum mengidentifikasi aktor yang menjadi komponen gerakan wanita dalam 4 kelompok, yaitu (a) jejaring nasional / organisasi payung; (b) organisasi perempuan independen (termasuk NGO perempuan); (c) organisasi internal (misalnya kelompok perempuan dalam serikat buruh, sayap perempuan dalam partai politik, aktor-aktor individu maupun kelompok pakar); dan (d) kelompok-kelompok akar rumput (Stetson dan Maszur, 2003). Dari keempat komponen itu, NGO menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Menurut Bastian (1997), NGO adalah bagian dari *civil society*. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, NGO dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan politik (*community empowering*), penguatan arus bawah, dan peningkatan pendapatan ekonomi. Kinerja NGO ditandai dengan perubahan sosial, dimana mandatnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat sipil. Perubahan difokuskan pada masyarakat, sebagai pelaku perubahan, melalui penataan organisasi dan metodologi secara bersama (Bastian,

1997: 8). PBB (2007) mendefinisikan NGO sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Istilah NGO ini diterapkan pada organisasi *non-profit* yang bebas dari pemerintah. NGO merupakan organisasi yang berbasis nilai secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan yang sukarela. Jadi, prinsip altruisme dan voluntarisme ditetapkan sebagai defenisi karakter kuncinya. NGO meliputi semua organisasi yang berada di luar struktur atau jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau bagian dari birokrasi pemerintah (Bastian, 2007: 8-9).

Peran NGO dalam mencapai keberhasilan gerakan wanita tidak berlangsung dalam proses yang sederhana. Perjalanan NGO dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan tak terlepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan internasional. Oleh karena itu, dinamika yang berlangsung dalam dunia internasional pada dasarnya turut mengkonstruksi signifikansi peran NGO baik bagi lingkungan internal negara maupun lingkungan global.

Dari penjelasan di atas, dapat dicermati adanya bentuk inter-relasi pada beberapa aspek (feminisme,

gerakan wanita, gerakan sosial, dan NGO) tersebut. Sinerji diantara semua aspek itulah yang mampu membuat gerakan wanita bertransformasi dari satu ke wilayah ke wilayah lainnya, dan dari gerakan marjinal ke ranah global. Demikian pula halnya dengan perkembangan gerakan wanita di Malaysia yang tidak terlepas dari aktivitas dan peran dari NGO. NGO di Malaysia telah berupaya melakukan pergerakan sosial secara aktif, dan NCWO adalah diantara NGO gerakan wanita yang terpenting di Malaysia.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Menjelaskan tentang gerakan wanita di Malaysia.
- Menjelaskan tentang NCWO sebagai NGO yang berperan aktif dalam pergerakan wanita di Malaysia.
- Menjelaskan perkembangan gerakan wanita melalui NGO NCWO di Malaysia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Alwasilah (2002) penelitian jenis ini dilakukan dengan melihat hubungan sebab-akibat dari gejala-gejala yang diteliti dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Penelitian kualitatif terfokus pada fenomena tertentu yang tidak memiliki generalisasi dan perbandingan,

tetapi memiliki validitas internal dan pemahaman yang konseptual.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik, yang pada dasarnya berusaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Artinya, temuan ataupun hasil penelitian ini hanya akan memberikan deskripsi ataupun gambaran tentang masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau *library research*, dimana data-data pendukung dikumpulkan dan dengan merujuk kepada buku-buku, jurnal, artikel, dan berita-berita dan berbagai media yang relevan dengan penelitian ini. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisa atau dikaji sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan. Dalam mengumpulkan data-data tersebut, penulis juga menggunakan fasilitas internet dengan mengambil informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian, serta laporan tahunan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan wanita di Malaysia

Gerakan wanita sebenarnya sudah bermula pada tahun 1785 di Eropa. Namun dunia lebih mengenal AS sebagai pelopor penting gerakan

feminisme karena negara itu yang pertama kali memperjuangkan gerakan perempuan secara terstruktur dan terorganisir. Kaum feminis di AS memelopori dan menyelenggarakan konvensi perempuan yang pertama di dunia. Konvensi yang diselenggarakan di Seneca Falls pada tahun 1848 inilah yang dianggap sebagai awal munculnya gerakan perempuan. Bahkan, konvensi itu dianggap pula sebagai *Women's Great Rebellion*. Namun tahun pasca Perang Dunia I, wanita AS cenderung kembali ke lingkungan domestik, semenjak saat itu gerakan wanita kembali mengalami masa stagnansi (Djajanegara, 2000).

Sekitar tahun 1960-an gerakan feminis kembali berkembang, namun kali ini dengan skala yang lebih luas karena tidak hanya negara-negara Barat seperti AS dan beberapa negara Eropa saja yang terdorong untuk menggalakkan kembali gerakan tersebut. Melalui NGO perempuan yang bernama *National Organization for Women* (NOW) yang didirikan tahun 1966 oleh Betty Friedan di Amerika Serikat, persoalan gerakan perempuan berhasil dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahun 1967, gerakan feminisme di Amerika Serikat membentuk *Student For A Democratic Society* (SDS). Lembaga ini berhasil mengadakan konvensi di Ann Arbor dan kemudian kemudian di Chichago (Djajanegara, 2000).

Untuk memasukkan gerakan wanita ke tingkat internasional, aktifis feminis berupaya memasukkan pembahasan tentang masalah diskriminasi perempuan ke dalam agenda Hak Asasi Manusia (HAM). Perjuangan wanita mendapatkan momentum penting dan masuk dalam pembahasan internasional pertama kali pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) PBB. CEDAW merupakan bagian dari konvensi HAM PBB yang diselenggarakan tahun 1979. Secara sederhana, pesan yang dapat ditangkap dari konvensi CEDAW yaitu: pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak wanita adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM (Cook: 1994, 634). Konvensi CEDAW PBB adalah tonggak awal sekaligus merupakan bentuk legitimasi internasional terhadap upaya perjuangan gerakan wanita seluruh negara di dunia. Selain itu, konvensi tersebut juga menjadi cikal bakal perkembangan gerakan wanita secara global (Antrobus, 2004:17-18).

Pola pergerakan wanita secara global dipengaruhi oleh sistem dan geopolitik dominan yang berlangsung di dunia internasional. Pada dekade 1980-an, NGO sudah mulai muncul dan berpengaruh terhadap pergerakan perempuan di tingkat global. Selanjutnya, pada dekade 1990-an, peranan NGO menjadi semakin kuat dirasakan dalam

pergerakan-pergerakan wanita maupun pergerakan sosial lainnya. Dunia internasional yang tengah semakin dalam memasuki era globalisasi telah memunculkan NGO sebagai kekuatan tersendiri yang berpengaruh signifikan. Di tingkat global, NGO menjadi salah satu aktor internasional yang mampu mempengaruhi keputusan melalui pengguliran isu-isu tertentu. Demikian pula halnya dengan wilayah domestik (Ticker, 1997: 611). NGO semakin berkembang dan menjadi salah satu kelompok yang dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.

Gerakan wanita di Malaysia dapat juga ditelisik seperti halnya gerakan wanita yang berlangsung dalam lingkungan global seperti yang digambarkan di atas. Gerakan wanita di Malaysia sebenarnya telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masa pendudukan Jepang. Akan tetapi gerakan-gerakan tersebut masih terpisah dalam kelompok-kelompok kecil dan belum terorganisir dengan baik, sehingga hasil pencapaian gerakannya pun belum begitu signifikan. Gerakan perempuan di Malaysia barulah mengalami perubahan setelah gerakan wanita menjadi isu global. Oleh karena itu, gerakan wanita yang berlangsung di lingkungan global memberikan pengaruh tersendiri terhadap gerakan wanita di Malaysia.

Perkembangan pergerakan wanita di Jepang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Zaman pra-pendudukan Jepang

Menurut tinjauan sejarah, NGO gerakan perempuan telah bermunculan sebelum zaman pendudukan Jepang. Pada awal munculnya gerakan perempuan di Malaysia, jumlah NGO masih sedikit, dan masing-masing NGO memiliki matlamat kegiatan yang berbeda-beda. NGO pada masa itu adalah *Young Women's Christian Association* (YWCA), *Malay Women Teacher's Union* (MWTU), *Malay Ladies Association* (MLA), *Chinese Ladies Association of Singapore*, *Khalsa Diwan Selangor*, dan bagian atau sayap perempuan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) (Tumin, 2006: 3-8).

b. Zaman pendudukan Jepang

Pada zaman pendudukan Jepang, NGO pergerakan perempuan tidak berkembang independen (Manderson, 1980:52). Pada masa itu Jepang memprakarsai NGO perempuan antara lain: (a) Kor Perkhidmatan Buruh (KPB) tahun 1949; (b) Kor Perkhidmatan Sukarela Perempuan Melayu (KPSWM); (c) *Malayan Reconstruction Co-Operative Association* (MRCA); dan *Malayan Welfare Association* (MWA). Namun sayangnya, organisasi-organisasi itu "diperalatkan" untuk

meningkatkan dukungan politik terhadap pemerintah tentara Jepang di Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura (Dairiam, 2006: 3-8).

c. Pasca pendudukan Jepang hingga kemerdekaan 1957

Sesudah pendudukan Jepang, kesadaran politik yang menyeluruh di kalangan masyarakat Melayu dalam menentang penubuhan *Malayan Union* secara tidak langsung juga telah membangkitkan kesadaran politik di kalangan perempuan. Perempuan tidak hanya hadir dalam rapat-rapat umum tetapi juga mengambil bahagian dalam berbagai musyawarah dan unjuk rasa. Manifestasi kesadaran politik perempuan, terutama perempuan Melayu diwujudkan dengan membentuk NGO seperti Angkatan Perempuan Sedar (AWAS) yang dipimpin oleh Aishah Ghani (Cecilia, 2006). AWAS merupakan "sayap perempuan" pada Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Pada masa itu juga muncul NGO perempuan China yang berhaluan kiri yakni *Women's Federation* di bawah pimpinan Lee Kin pada bulan Mei 1946, namun NGO ini berhaluan komunis dan dilarang keberadaannya (Tumin, 2006: 3-8).

Untuk bidang politik gerakan perempuan membentuk NGO *All Malaya Women's Federation* (AMWF), dan memiliki sebelas cabang di seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura (Dancz: 1987, 101).

Perkembangan signifikan adalah saat terbentuknya Pertubuhan Kaum Ibu UMNO (diketahui Puteh Mariah) pada September 1949 untuk bersama-sama dengan UMNO (*The United Malay National Organizations*) meningkatkan status orang-orang Melayu seterusnya menuntut kemerdekaan (Padaonkar, 1993). Pendirian Kaum Ibu UMNO sangat berperan penting terhadap gerakan perempuan dan memicu bermunculannya NGO-NGO gerakan perempuan yang tersebar hampir diseluruh wilayah Malaysia (Sri Susayati, 1978: 25).

d. Tahun-tahun awal kemerdekaan sampai 1980

Kemerdekaan yang dicapai pada 1957 telah memberikan ruang dan peluang yang lebih luas pada gerakan perempuan di Malaysia. Di tahun-tahun awal kemerdekaan pengaruh dan gerakan “emansipasi perempuan” semakin berkembang melalui berbagai kegiatan. Pada tahun 1960, langkah yang lebih sistematis dilakukan dengan mendirikan *Women’s Teachers Union of the Federation of Malaya* (WTU) di bawah pimpinan F.R. Bhupalan pada Maret 1960. WTU merancang pergerakan perempuan dengan lebih terstruktur dan sistematis. Selain itu di tingkat nasional didirikan *National Association of Women’s Institute of Malaya* (NAWIM) tahun 1960 (di bawah

pimpinan Khamsiah Abdul Majid). NAWIM merupakan NGO yang aktif mengambil bagian dalam isu-isu kemajuan masyarakat di tingkat akar rumput (Tumin, 2006: 3-8).

Pengaruh kesadaran emansipasi perempuan yang semakin meningkat dan keperluan membangun jaringan kerja yang lebih luas mendorong beberapa pemimpin NGO perempuan menggabungkan NGO perempuan yang ada di bawah satu kelompok (Dancz, 1987:139). Keinginan itu dimusyawarahkan oleh Kaum Ibu UMNO, dan akhirnya pada Agustus 1963 beberapa NGO besar menggabungkan diri dengan membentuk *National Council of Women’s Organizations* (NCWO). Berdirinya NCWO merupakan langkah terpenting dari gerakan perempuan di Malaysia karena jangkauan kerjanya tidak lagi sekedar meningkatkan taraf kehidupan perempuan saja, namun mulai berani mengambil langkah-langkah menentang Undang-Undang kerajaan yang selama ini diskriminatif terhadap perempuan (Tumin, 2006: 3-8).

e. Tahun 1980 sampai sekarang

Pada masa ini gerakan perempuan di Malaysia semakin meluas dan kesadaran perempuan di dalam masyarakat juga tumbuh semakin pesat. Pada masa ini feminisme sudah menjadi agenda global, dimana setiap negara harus menyelaraskan dan mengikuti

kecenderungan yang ada agar sejalan dengan lingkungan global. Pada masa ini, NCWO sebagai NGO perempuan terbesar di Malaysia banyak memberikan kontribusi dan capaian-capaian yang signifikan (Cecilia, 2006).

Dari perkembangan gerakan wanita di Malaysia tersebut, NGO tampak telah menjadi aktor penting yang berjuang melalui pergerakan sosial. Pergerakan sosial yang dilakukan NGO terangkum dalam gerakan wanita yang bertujuan untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Apapun nama dan bentuknya, pesan yang dibawa NGO-NGO dalam gerakan wanita di Malaysia itu tetaplah sama, yakni menggeser posisi mereka yang semula termarginalkan menjadi lebih diperhitungkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan berkeluarga dan bernegara. Sungguhpun demikian dapat dikemukakan bahwa NCWO merupakan NGO yang penting dalam pergerakan wanita di Malaysia dalam era globalisasi, tatkala NGO mulai menjadi aktor penting yang dipertimbangkan dalam dunia internasional.

B. NCWO sebagai NGO gerakan wanita di Malaysia

a. Terbentuknya NCWO

Gerakan wanita di Malaysia yang dimanifestasikan melalui pembentukan NGO-NGO gerakan

wanita semakin menjadi kecenderungan utama. Berbagai NGO yang membawa maklumat gerakan wanita bermunculan dalam berbagai dimensi, mulai dari rasial, religi, dan kelompok-kelompok ide. Pergerakan yang tersebar luas dan masih terpecah-pecah tersebut pada akhirnya dipersatukan dalam satu wadah. Beberapa NGO melebur diri menjadi "satu payung" dan mulai mengorganisasikan pergerakan perempuan secara terarah, yang dikenal dengan NCWO.

National Council of Women's Organizations (NCWO) didirikan tahun 1960 dan diresmikan pada 25 Agustus 1963. Kamsiah Abdul Majid (Presiden WI) merupakan Presiden pertama NGO ini. NCWO adalah sebuah badan yang berperan penting dalam menengahkan isu-isu wanita (gender) di Malaysia. Sebagai badan penting yang memayungi sejumlah besar (kira-kira dua pertiga) NGO wanita yang aktif di Malaysia, banyak isu gender dari berbagai perspektif telah diartikulasi melalui NGO ini (Tumin, 2006 : 24).

Latar belakang pendirian NCWO dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu antara tahun 1960 hingga 1961 dan 1962 hingga 1963. Pada tahap yang pertama, usaha-usaha untuk pendirian NCWO banyak dilakukan oleh pemimpin

pemimpin tertinggi YWCA, terutama F.R. Buphalan. Pada tahap kedua, usaha-usaha mendirikan NGO ini banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin tertinggi Kaum Ibu UMNO, khususnya Fatimah Hashim (Ketua) yang terlibat mengambil inisiatif menggabungkan kelompok perempuan yang berasal dari partai-partai politik di bawah satu kelompok yang bernama NCWO ini tersebut (Tumin, 2006 : 28).

Tahun 1970-an terjadi perubahan corak aktivitas NGO perempuan di Malaysia dari yang sebelumnya bersifat "tradisional" menjadi "modern". Perkembangan semakin pesat lagi setelah meningkatnya pengaruh gerakan feminisme global, khususnya pasca Persidangan Perempuan Sedunia Pertama tahun 1975 di Mexico City yang ditetapkan sebagai Tahun Perempuan. Selain itu penetaan tempo 1976-1985 sebagai Dekade Perempuan juga semakin mempengaruhi strategi dan pendekatan NGO perempuan di Malaysia dalam menengahkan isu-isu perempuan dalam era 1980-an (Tumin, 2006 : 22). NCWO yang dibangun atas dasar kemajemukan, mampu merespon kondisi di lingkungan global secara efektif dan positif.

Sifat NCWO yang *non-political, non-religious, non-comunal* dan hanya fokus pada isu-isu gender membuka kesempatan luas NGO wanita dari berbagai latar belakang yang berlainan (agama, etnik, dan kecenderungan politik) menganggotai NGO ini. Kepemimpinannya yang rentas politik telah menjadikan NGO ini memiliki status dan imej yang representatif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan dan kemajuan perempuan. Faktor keseimbangan etnik dalam kepemimpinan dan keanggotaannya semakin memperkuat imej dan sifat pluralitas tersebut (Tumin, 2006 : 24).

NCWO memayungi 76 afiliasi organisasi perempuan (Dairiam, 1993). NCWO pada mulanya terbentuk dengan semangat untuk menghentikan ketidaksetaraan upah yang di terima kaum perempuan di Malaysia. Isu ini dikemukakan pertama kali oleh *Women Teacher's Union*. Ketidaksetaraan upah merupakan permasalahan yang sangat penting yang menggerakkan perempuan kaum urban dan kelas menengah di Malaysia. Lahirnya NCWO juga didasari oleh kecenderungan global yang mencoba mendapatkan perhatian terhadap hak-hak pekerja perempuan (Mohamad, 2002).

b. Tantangan NCWO dalam melakukan pergerakan

Dalam melakukan gerakan wanita, NCWO menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan itu berasal dari beberapa unsur, yakni situasi sosial, politik, dan budaya di lingkungan internal Malaysia. NCWO sebagai NGO dapat dikatakan relatif mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi internal tersebut.

Malaysia adalah negara monarki konstitusional yang mengikuti sistem demokrasi parlementer. Warga negaranya terbagi sekitar 65 persen keturunan Melayu, 26 persen keturunan China, dan 7 persen keturunan India. Malaysia adalah salah satu contoh bentuk masyarakat plural. Dengan keberagaman yang ada, secara politik dan sosial lebih didominasi Islam sebagai agama dengan mayoritas terbesar Malaysia (Mohamad, 2002). Ini merupakan tantangan pertama bagi NCWO. Pada dasarnya NGO merupakan kelompok kepentingan yang tumbuh subur di negara-negara yang demokratis, karena suara-suara dari kelompok kepentingan turut membangun mekanisme (sebagai input) dalam proses pembuatan kebijakan. Namun dalam bentuk kerajaan, kelompok kepentingan

seperti NGO belum mendapat tempat yang terlalu strategis.

Sejumlah lebih dari setengah populasi (50,39 persen) di Malaysia. perempuan sudah seharusnya ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam level keluarga, sosial dan publik dengan hak hak politik yang setara (Azizah, 2002). Namun banyak yang beranggapan bahwa budaya sosial dalam masyarakat Malaysia masih didominasi oleh kaum pria. Pria merasa terancam oleh keberadaan kaum perempuan jika perempuan menempati posisi yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini tercermin dalam jumlah perempuan Malaysia pada kekuasaan politik tingkat atas di Malaysia (Kim: 2005). Dominasi etnis Melayu dan India yang patriarki merupakan persoalan yang mendasari masalah ini. Secara sosial masyarakat patriarki lebih mengutamakan pria sebagai pertimbangan penting dalam mengambil keputusan-keputusan, baik di lingkungan keluarga, sosial, terlebih lagi publik (Azmawati dan Wahab, 2005).

Angapan agama dan budaya setempat merupakan tantangan tersendiri bagi pergerakan NCWO. Dalam masalah budaya ini, faktor yang menghambat partisipasi aktif perempuan Malaysia dalam bidang

politik adalah: (a) diskriminasi sosial yang terjadi secara tidak sadar atau membudaya terhadap peran perempuan dalam domain publik, (b) keterbatasan waktu dalam berkarir yang harus diimbangi oleh kebutuhan domestik rumah tangga, (c) anggapan budaya dan agama bahwa perempuan seharusnya berada di rumah saja, (d) batasan struktural di dalam setiap partai di Malaysia dibentuk untuk tidak memperbolehkan perempuan berada pada level tertentu (Keong, 2004, 17). Dalam pandangan struktural yang telah terbentuk ini, perempuan memiliki beberapa persoalan, seperti kurangnya kuantitas dan kualitas dari berbagai faktor, kurangnya organisasi pendukung, pengaruh pribadi keluarga, dan kurangnya dalam hal keuangan (Ramli dan Hasan, 1998).

Persoalan di atas memang begitu struktural. Namun NCWO harus mampu mencapai tujuan organisasinya di tengah-tengah kondisi fundamental yang menyempitkan peluang untuk memposisikan perempuan setara dengan pria. Sementara, subjek dan objek gerakan perempuan adalah perempuan itu sendiri.

Kondisi secara struktural telah membuat perempuan mengalami kesulitan untuk

berpartisipasi dan memiliki arti penting dalam pengambilan keputusan. Apabila perempuan berhasil menerobos tantangan di atas, maka tantangan yang berikutnya juga harus dihadapi. Ketika seorang perempuan sudah beraktivitas di luar rumah, dan ketika sebagian perempuan Malaysia telah berada pada posisi yang tinggi di masyarakat, mereka harus dihadapkan dengan tanggung jawab kodrati mereka, baik sebagai istri, maupun sebagai ibu dari anak-anak mereka (Azizah: 2002). Oleh karena itu, tanpa pengertian dan dukungan dari kaum pria, gerakan wanita juga mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan tujuan dan capaian pergerakannya.

Contoh sederhana untuk memperlihatkan kesulitan wanita untuk tampil di publik adalah ketika wanita berada di parlemen. Mereka mengalami beberapa hambatan dalam menjalani rutinitasnya sebagai aktor penting dalam politik Malaysia (Cecilia, 2006), seperti: (a) Beban ganda. Wanita di parlemen Malaysia biasanya menemui kesulitan dalam mengekspresikan pendapat karena dianggap kurang kuat keberadaannya dan juga mereka harus memikul beban tanggung jawab domestik rumah tangga beserta segenap permasalahan karir

yang dihadapi. Namun keberadaan wanita yang lebih muda lebih bisa diterima keberadaannya karena dianggap lebih fleksibel; (b) Partai Politik. Dalam kebijakan yang ditetapkan, partai politik di Malaysia biasanya mempersulit keterlibatan wanita. Secara general dapat dikatakan bahwa partai politik cenderung mempertahankan perilaku dan aturan konservatif, dan mengabaikan perubahan radikal yang terjadi di masyarakat; (c) Lingkungan yang kurang mendukung. Wanita dalam parlemen dan perwakilan wanita lainnya dalam berbagai macam pertemuan masih juga mendapatkan tindak kekerasan seksual dalam bentuk tidak dianggapnya peran serta wanita dan dilecehkan dalam berbagai kesempatan sidang parlementer. Tidak ada tindakan yang efektif guna menghilangkan permasalahan ini, baik dari anggota parlemen wanita maupun laki laki. Selain itu juga anggapan bahwa "panggung" politik adalah wilayah pria, membuat wanita sering kali merasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh hipokresi dan "dirty game" dalam politik yang dilakukan oleh pria.

Hal lain yang menjadi faktor penghambat partisipasi dan keterlibatan wanita baik dalam lingkungan politik dan sosial adalah

strata sosial. Di Malaysia para pemimpin wanita biasanya merupakan keturunan dari orang yang berpendidikan, kaya dan terhormat (orang besar kampung) (Pandokar, 1983). Para wanita ini biasanya terlanjur menikmati status sosial yang tinggi dikarenakan latar belakang keluarga, sehingga para pemimpin wanita ini, walaupun jumlahnya tidak banyak, hanya merupakan bagian dari para pemimpin pria. Di beberapa bagian merupakan istri dari suami mereka yang mempunyai jaringan yang luas di masyarakat. Sehingga, partisipasi wanita dalam sosial politik di Malaysia digambarkan hanya sebagai pengikut, bukan berdasarkan kemampuan mereka membuat suatu kebijakan sebagai pemimpin (Dairiam, 1993).

Berbagai persoalan politik, sosial dan budaya Malaysia yang sangat kompleks tersebut merupakan tantangan yang relatif berat bagi NCWO dalam melakukan pergerakan wanita di Malaysia. Sebabnya, tantangan itu berkenaan dengan persoalan-persoalan struktural yang secara fundamental telah menjadi "darah daging" dalam kehidupan masyarakatnya. Akan tetapi, perkembangan situasi gerakan wanita di lingkungan global dan usaha keras NGO yang salah

satunya adalah NCWO, gerakan wanita di Malaysia tetap menunjukkan adanya tingkat keberhasilan. Keberhasilan itu salah satunya dapat dilihat dari peranan-peranan yang disumbangkan oleh NCWO sebagai NGO gerakan wanita yang terbesar di Malaysia.

C. Perkembangan gerakan wanita melalui NGO NCWO

Keberadaan NCWO memiliki peranan signifikan terhadap perkembangan gerakan wanita di Malaysia. Kedekatan NCWO dengan sayap wanita dari Partai UMNO (Kaum Ibu UMNO) – partai pemerintah yang sangat berpengaruh pada masa itu – sangat strategis untuk mencapai tujuan gerakan wanita oleh NCWO. Selain itu NCWO sebagai organisasi “payung” yang mengakomodir berbagai kepentingan golongan wanita sangatlah pluralis, sehingga lebih menjadi pilihan bagi wanita lintas agama dan lintas etnis. Keberadaan NCWO dapat menyatukan berbagai suara wanita dalam menyampaikan isu-isu wanita kepada masyarakat dan kerajaan (Cecilia, 1990).

NCWO telah berkembang menjadi “kendaraan” bagi wanita menuju legislatif yang menyetujui perubahan akan diterapkannya kesetaraan upah, kesetaraan akses perempuan akan pekerjaan pelayanan publik, dan hak-hak pernikahan. Beberapa pemimpin NCWO

juga merupakan Menteri dalam kabinet. Hal ini membuat NCWO bukan hanya mempunyai kedekatan dengan pemerintah, tetapi juga sebagai cerminan elit dari model *consociational-democratic* yang diadopsi dari pengaturan partai koalisi (Mohamed, 2002).

Di tengah tantangan yang dihadapi NCWO dalam gerakan wanita di Malaysia, NCWO tetap melakukan pergerakan dan memainkan peranan penting bagi kemajuan wanita-wanita di Malaysia. Beberapa bentuk perkembangan gerakan wanita melalui NGO NCWO di Malaysia adalah sebagai berikut (Kim, 2005):

a. Pendidikan

Di bidang pendidikan, pergerakan wanita melalui NGO NCWO menunjukkan perkembangan yang positif. NCWO berperan melalui keberhasilannya melakukan berbagai pencapaian, seperti pengajuan memorandum pendidikan, agar terciptanya suatu edukasi formal yang terkonsentrasi kepada penguasaan kemampuan dasar pada tahun 1975. Pengajuan itu akhirnya diimplementasikan oleh Menteri Pendidikan Malaysia melalui penerapan kurikulum pendidikan primer dan sekunder baru yang diterapkan pada tahun 1980-an.

NCWO melakukan pengajuan proposal pendidikan untuk membentuk pola pendidikan baru dimana

dijadikannya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Malaysia. Melalui perkembangan teknik mengajar pada tahun 1979 yang mendapat perhatian khusus dari Menteri pendidikan di Malaysia, bahasa Inggris pun diaplikasikan dalam aktivitas pengajaran yang diresmikan pada tahun 1990-an. NCWO juga terus menekankan akan pentingnya pendidikan berbasis sains dan teknologi, dan pendidikan moral yang efektif melalui NCWO *Education Commites and Commition*.

b. Kesehatan

NCWO melalui *The Commition On Health* terus menekankan permasalahan kesehatan yang dialami Malaysia seperti : (a) kurangnya kebutuhan akan dokter suster, dan ahli medis lainnya, (b) transparansi terhadap privatisasi perusahaan asing yang bergerak dalam masalah kesehatan, (c) mendorongnya formulasi *National Health Policy* yang mengatur berbagai kebijakan akan permasalahan kesehatan di Malaysia seperti perlakuan terhadap orang cacat dan korban kekerasan, (d) kesadaran akan pencegahan pribadi terhadap suatu penyakit, (e) keamanan penggunaan obat dan lain-lain, dan (f) pembentukan *Malaysian Aids Council*.

c. Keluarga

Berhubungan dengan penerapan hukum atas pernikahan, perceraian dan

aspek lain yang ada dalam keluarga. NCWO telah berkontribusi besar dalam membawa perubahan terhadap perempuan dan anak anak. NCWO pada tahun 1963 mengajukan penegakan hukum yang lebih kuat terkait permasalahan pembayaran uang pasca perceraian terhadap perempuan dan anak yang direalisasikan oleh pemerintah kedalam *The Married Women and Children (Enforcement of Maintenance) ACT*, 1968.

NCWO mengangkat permasalahan terkait hukum pernikahan untuk Non-Muslim pada tahun 1963 yang direalisasikan oleh pemerintah Malaysia kedalam *The Law Reform (Marriage and Divorce) ACT*, 1976 *Comes Into Forces*. NCWO juga mengangkat permasalahan hukum keluarga Islam. Meminta perempuan ditujukan kepada pengadilan Syariah pada tahun 1970, yang direalisasikan pemerintah Malaysia kedalam *Islamic Family Law (Federal Teritory) ACT*, 1984.

d. Anak

Hak-hak terhadap anak-anak diperjuangkan dengan sangat aktif oleh NCWO. Melalui perjuangan NCWO, anak-anak telah diberikan perlindungan legal yang lebih baik agar terindar dari penyiksaan, eksploitasi dan ditelantarkan. Selain itu NCWO juga berperan dalam mengupayakan perawatan yang lebih baik terhadap anak yang memiliki

keterbelakangan dan anak yang lahir di luar pernikahan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam Undang-Undang.

e. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk pemerkosaan dan kekerasan domestik, adalah permasalahan sosial yang terus dilawan oleh NCWO dan organisasi terkait lainnya. Hampir semua rekomendasi yang mereka ajukan ke pemerintah diterima dan usaha untuk merubah perilaku negatif masyarakat dapat dikatakan sukses, walaupun masih celah dalam hukum yang berlaku dan kurang sempurnanya implementasi dari hukum tentang kekerasan di Malaysia. Dalam hal ini NCWO juga berhasil memperjuangkan masalah kekerasan dalam rumah tangga, dengan keluarnya Akta Keganasan Dalam Rumah Tangga.

f. Media

NCWO terus berusaha merangkul media di Malaysia untuk menggambarkan imej positif tentang wanita, pencegahan eksploitasi fisik wanita dalam periklanan, pelarangan film porno dan literatur pornografi. NCWO juga mengajukan beberapa proposal kepada Menteri Informasi di Malaysia yang membahas tentang bahaya rokok, agar memberikan batasan kepada media Malaysia tentang iklan produk rokok. Hasilnya adalah pengumuman dari deputi

Menteri Informasi bahwa setiap iklan dengan merek produk rokok dan kegiatan yang disponsori oleh rokok di TV nasional akan dikenai hukuman selama 6 tahun.

g. Tempat tinggal

NCWO secara konsisten terus menekankan tentang kebutuhan akan tempat tinggal murah bagi kelompok pendapatan rendah. NCWO mencatat bahwa developer perumahan swasta lebih tertarik membangun bangunan biaya tinggi seperti kondominium. Ketika tekanan terjadi terhadap mereka oleh pemerintah dan media untuk membuat bangunan biaya rendah mereka biasanya membuat bangunan dengan kualitas buruk. NCWO terus mendorong pemerintah dalam melakukan dukungan terhadap pembangunan rumah yang layak terhadap rakyat miskin dan mendorong diberikannya hukuman kepada developer yang tidak menaati peraturan. NCWO juga berusaha mencegah kenaikan eskalasi harga rumah, terutama rumah dengan kategori *budget* rendah.

Gerakan wanita melalui NGO NCWO di Malaysia mengalami perkembangan yang positif, dimana perkembangan pergerakan berlangsung dalam dua sisi. Pertama dalam sisi internal Malaysia, capaian-capaian NCWO dalam perkembangan gerakan wanita begitu penting dalam upaya

meminimalisir berbagai bentuk perlakuan diskriminatif terhadap kaum wanita di Malaysia. Pada sisi eksternal, jaringan dan afiliasi yang dibangun NCWO di lingkungan regional dan internasional, dapat mengangkat martabat perjuangan gerakan wanita di Malaysia. Kedua sisi ini semakin mengarahkan pada realita bahwa sebagai NGO gerakan wanita, NCWO mengalami perkembangan yang positif dan relatif berhasil dalam memperjuangkan gerakan wanita di Malaysia.

KESIMPULAN

NCWO merupakan NGO gerakan wanita terbesar di Malaysia yang merupakan gabungan dari berbagai NGO yang sebelumnya terpecah-pecah dan berjalan sendiri-sendiri. Penggabungan beberapa NGO dalam "satu payung" ini memiliki kelebihan tersendiri. NCWO bersifat pluralistik karena memiliki keanggotaan dari berbagai etnik, agama dan isu dalam pergerakan wanita. Dikarenakan NCWO merupakan gabungan dari beberapa NGO dengan keunggulan dan spesifikasi masing-masing, maka NCWO menjadi lebih komprehensif dan memiliki beragam sumber daya serta dukungan.

Dalam perjalanannya memperjuangkan gerakan wanita, NCWO menghadapi berbagai tantangan yang relatif luar biasa. Tantangan itu merupakan bentuk struktural yang

secara fundamental membangun kehidupan masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia yang patriarkhi membentuk lingkungan politik, sosial, dan budaya yang tidak berpihak pada wanita, dan hanya semata-mata mengunggulkan dan mengedepankan pria. Berbagai perubahan status wanita akan mengakibatkan terjadinya "benturan" dan beban bagi wanita itu sendiri setelah berkiprah layaknya pria.

Kendati demikian, NCWO tetap melanjutkan dan bahkan berupaya meningkatkan pencapaian-pencapaian hak wanita dalam perkembangan pergerakannya. Pada perkembangannya NCWO telah mampu memunculkan teobosan-terobosan baru dalam memperjuangkan hak kaum wanita di Malaysia dalam beberapa bidang penting seperti pendidikan, keluarga, anak, media, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Akhirnya, gerakan wanita di Malaysia melalui perjuangan NGO NCWO berhasil mencapai kemajuan-kemajuan signifikan dalam pergerakan wanita di Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antrobus, Peggy, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, New York: Palgrave, 2004.
- Azizah, Wan, "Women in politics : Reflections from Malaysia International" *IDEA*, 2002.
- Azmawati, Azman, Azwan, dan Juliana Abdul Wahab "Power and Patriarchy: Women's Programmes on Malaysian Television" Paper dipresentasikan pada the 14th AMIC Annual Conference; *Media and Society in Asia-Transformation and Transition. Beijing, People's Republic of China*, 2005.
- Bastian, Indra, Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik, Yogyakarta: Erlangga, 2007.
- Catriona, Sandilands, *The Good-Natured Feminist*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
- Cecilia, Ng, Mazmah Mohammad dan Tan Beng Hui *Feminism and the women's movement in Malaysia*, 2006.
- Dairiam, Shanthi, "The struggle for women Right's in Malaysia : A Review and Appraisal of Women's Activism in the Eighties and Nineties, Canadian Woman Studies, *Cahiers De La Femme*, Volume 15, Nomor 2.
- Djajanegara, Soenarti, *Kritik Sastra Feminis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Jackson, Stevie dan Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories*, New York: New York University Press, 1998.
- Kim, Wang Lay, *Ways of Seeing Women: Sketches of Women in Magazines in the Global Age*. Paper dipresentasikan pada the International Conference on Media and Communication: Communication, Globalization and Cultural Identities, Universiti Kebangsaan Malaysia, Putrajaya, 2005.
- Maznah, Mohamad, "From Nationalism to Post-Developmentalism ; the Intersection of Gender, Race, and Religion in Malayasia", *Macalester International* Vol. 12..
- Padaonkar, Latika, *Women in Politics : Australia, India, Malaysia, Philippines, Thailand* Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994.
- Rallonza, Louders ,Veneration, "Women and the Democracy Project: A Feminis Take on Women's Political Participation in the Philippines", dalam *Women's Political Participation and*

- Representation in Asia*, Kazuki Iwanaga ed., Copenhagen: NIAS Press, 2008.
- Tickner, J., Ann, "You Just Don't Understand: Troubled Engagements between Feminists and IR Theorists", *International Studies Quarterly*, Vol. 41, No. 4. Desember, 1997.
- Tumin, Makmor, *Perempuan di Malaysia, Perjuangan Menuntut Hak*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2006.
- Sarah, Elizabeth, "Finding A Feminist Historical Framework: A Review of Feminism in Europe", *Women Studies International Forum*, Vol. 5, No. 6, 1982.
- Sujatmiko, Iwan, Gardono, "Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat" dalam *Gerakan Sosial Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, Darmawan Triwibowo ed., Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006.
- Sylvester, Christine, *Feminist International Relations: An Unfinished Journey*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Thomas, George M. dan John Boli, "INGOs and the Organization of World Culture" dalam *Constructing World Culture : International Nongovernmental Organizations Since 1875*, John

PENGARUH FEMINISME GLOBAL TERHADAP GERAKAN WANITA DI INDONESIA

Yusran

yusran@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

As part of the social sciences, the discipline of international relations have developed continuously according to the dynamics that take place in the international. Fundamental issues such as perspectives, theories, and concepts were also shifting. This paper aims to clarify the influence of feminism on feminist movements that occurred in Indonesia. Writing that uses qualitative methods, found that the entry of feminism into the realm of international relations to give effect to the countries in the world, especially in addressing the feminist movements that take place in their respective countries. Thus, it can be concluded that the feminist movement that occurred in Indonesia is inseparable from the influence of the feminist movement at the global level.

Keywords: *Feminism, Non-Government Organization, and the Feminist Movement in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Studi ilmu Hubungan Internasional (HI) merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial dengan area studi yang interdisipliner dan heterogen. Wilayah kajiannya sangat luas menyangkut orang-orang beserta kebiasaan-kebiasaannya yang melintasi batas negara.¹ Dewasa ini HI merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh.² Artinya, masih berada dalam proses perkembangan dan belum mencapai bentuk final. Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam

masyarakat yang terus mengalami perubahan dengan dimensi yang melewati batas negara akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap perkembangan HI. Demikian pula sebaliknya, perubahan substansi dalam HI dapat pula memberi pengaruh terhadap sikap negara-negara di dunia dalam menyikapi persoalan tertentu.

Adalah gerakan feminisme sebagai contohnya. Berbagai persoalan seputar perkembangan feminisme pada perjalanannya tidak sekedar menjadi persoalan bagi negara-negara tertentu saja – Eropa dan Amerika – yang mengawali munculnya pemikiran dan pergerakan ini. Lebih lanjut, feminisme telah melintasi batas-batas negara dan menghadirkan “tugas” baru bagi

¹ Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pavehouse, *International Relations 2006-2007 Edition*, (New York: Priscilla McGeehon, 2007), 3.

² Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 2.

pemerintah negara-negara di dunia. Selain itu, feminisme juga menjadi topik perbincangan penting dan turut pula mengkonstruksi disiplin ilmu HI yang sedang berada dalam masa perkembangan. Sehingga, Christine Sylverster, mengatakan: "Feminisme termasuk dalam kajian hubungan internasional yang kontemporer"³.

Tulisan ini merupakan telaah mengenai gerakan feminisme. Secara spesifik tulisan ini membahas tentang pengaruh feminisme global. Selanjutnya pandangan-pandangan yang ditemukan dalam tulisan ini akan lebih dikhususkan lagi untuk menelaah pergerakan feminis yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, selain upaya yang dilakukan masyarakat Indonesia secara internal, respon pemerintah terhadap gerakan, serta capaian gerakan feminis tentunya tak terlepas dari pengaruh dunia internasional yang merupakan objek substansial dalam ilmu HI.

FEMINISME DALAM TATANAN KONSEPTUAL

Feminisme adalah pemikiran yang mulanya dikembangkan oleh kalangan Eropa Barat dan kemudian meluas ke AS. Kajian feminisme terkandung dalam filsafat humaniora dan mencerminkan sifat dasar seorang

wanita.⁴ Ide utama pemikirannya dalam rangka memperjuangkan persamaan antara dua jenis manusia: pria dan wanita. Sandilands mengatakan bahwa pemikir feminisme menghendaki pemisahan gender dan seks.⁵ Artinya, dalam masalah seks secara kodrati tidak perlu dipermasalahkan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah dari segi gender (sifatnya).⁶

Dalam perkembangannya feminisme terbagi atas berbagai jenis aliran pemikiran berdasarkan gelombang kemunculannya yang terkadang saling kontroversial satu sama lainnya, namun memiliki tujuan akhir yang sama. *Pertama*, feminisme gelombang pertama terdiri dari: (a) Feminisme Liberal, yang menekankan pada hak individu; (b) Feminisme Radikal, yang terfokus pada permasalahan ketertindasan perempuan; (c) Feminisme Marxis/Sosialis, menekankan pada permasalahan kelas

⁴ Elizabeth Sarah, "Finding A Feminist Historical Framework: A Review of Feminism in Europe", *Women Studies International Forum*, Vol. 5, No. 6, 1982, 702.

⁵ Catriona Sandilands, *The Good-Natured Feminist* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999), 8.

⁶ Seks adalah perbedaan biologis (perbedaan jenis kelamin) yang merupakan kodrat Tuhan, dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Adapun gender, perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Gender merupakan perbedaan perilaku (*behavioral differences*) yang dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender dapat berubah dari masa ke masa. Misalnya, wanita itu dikenal lemah, lembut, cantik, emosional, keibuan, dan lain sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Konstruksi seperti inilah yang dianggap mendasari perbedaan perlakuan antara pria dan wanita.

³ Christine Sylverster, *Feminist International Relations: Unfinished Journey* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 9.

sebagai penyebab utama perbedaan fungsi dan status perempuan. *Kedua*, feminisme gelombang kedua yang terdiri dari: (a) Feminisme Eksistensial, yaitu feminisme yang melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggung oleh perempuan, sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki; dan (b) Feminisme Gynosentris, yaitu feminisme yang memandang ketertindasan perempuan dari perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki. *Terakhir* adalah feminisme gelombang ketiga yang terdiri dari: (a) Feminisme Post-Modernis, yaitu feminisme yang menggali persoalan alienasi perempuan, seksual, psikologis, dan sastra bertumpu pada bahasan sebagai suatu sistem; (b) Feminisme Multikultural, yaitu feminisme yang melihat ketertindasan perempuan sebagai “satu definisi” dan tidak melihat ketertindasan terjadi dari kelas, ras, preferensi sosial, umur, agama, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya; (c) Feminisme Global, menekankan pada ketertindasan dalam konteks perdebatan antara feminisme di dunia yang sudah maju dengan feminisme di dunia yang sedang berkembang; dan (d) Ekofeminisme, yaitu feminisme yang berbicara tentang ketidakadilan perempuan dalam lingkungan, berangkat

dari ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan atau alam.⁷

Implementasi pemikiran feminisme dilakukan melalui gerakan pembebasan wanita yang dikenal juga dengan beberapa istilah lain, seperti gerakan gender, gerakan wanita, atau gerakan feminis – dimana seluruhnya memiliki pengertian yang sama. Gerakan feminis yang terjadi dalam masyarakat terformat dalam bentuk gerakan sosial masyarakat sipil (*civil society movement* – selanjutnya baca: gerakan sosial). Gerakan sosial inilah yang dapat dikatakan sebagai “motor” penggerak gerakan wanita, dimana pada mulanya hanya berlangsung di tingkat akar rumput (*grass root society*) hingga menyebar luas menjadi agenda global yang diperbincangkan intensif di kalangan internasional seperti sekarang ini.

M. Diani dan I. Bison yang dikutip oleh Sujatmiko, mengartikan gerakan sosial sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu.⁸ Sementara J. Craig Jenkins dan William Form, mengemukakan bahwa gerakan sosial

⁷ Stevie Jackson dan Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories* (New York: New York University Press, 1998).

⁸ Iwan Gardono Sujatmiko “Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat” dalam *Gerakan Sosial Wahana Cevil Society bagi Demokratisasi*, Darmawan Triwibowo ed., (Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006), vii.

muncul dari aspek-aspek bernilai tradisional yang diupayakan untuk membawa perubahan sosial dalam masyarakat terhadap tujuan perubahan yang diinginkan.⁹ Dari pendapat ini terlihat bahwa isu-isu yang dimunculkan dalam gerakan sosial adalah nilai-nilai mendasar yang ada dalam lingkungan masyarakat sipil. Lebih jelasnya, merupakan persoalan-persoalan mendasar secara tradisional yang dialami masyarakat (atau bersifat *bottom-up*).

Gerakan sosial yang cenderung inklusif ini terbagi dalam dua bentuk. Pertama, "*Old Social Movement*" yakni gerakan sosial yang memfokuskan pada isu yang berkaitan dengan materi dan biasanya terkait dengan satu kelompok misalnya, petani dan buruh. Kedua, "*New Sosial Movement*" yang lebih berkaitan dengan masalah ide atau nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan.¹⁰ Dari pembagian bentuk ini, maka secara eksplisit dapat disebutkan bahwa gerakan feminis adalah bentuk *New Sosial Movement*.

Gerakan feminis ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan wanita. Secara umum kaum wanita merasa dirugikan

dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum pria dalam bidang sosial, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya – terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Gerakan feminis lahir dari sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati.¹¹ Sehingga, tujuannya adalah menuntut keadilan dan pembebasan wanita dari kungkungan agama, budaya, dan struktur kehidupan lainnya.

Gerakan sosial – termasuk gerakan feminis didalamnya – berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok *civil society* dalam mendukung atau menentang perubahan sosial. Gerakan tersebut juga menunjukkan pentingnya para aktor organisasi *civil society* seperti Ormas, Ornop (NGO), Organisasi komunitas, Media dan Universitas.¹² Secara umum, Stetson dan Maszur (2003) membagi komponen gerakan feminis ke dalam empat kelompok, yaitu (1) jejaring nasional atau organisasi payung; (2) organisasi wanita independen (termasuk NGO wanita); (3) organisasi internal (misalnya kelompok

⁹ J. Craig Jenkins dan William Form, "Social Movement and Social Change" dalam Thomas Janoski dkk. (ed.), *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 31.

¹⁰ Op.Cit, Sujatmiko, hlm xv.

¹¹ Jane L. Parpart dan Marysia Zalewski, *Rethinking The Man Question: Sex, Gender and Violence in International Relations* (New York: Zed Books, 2008), 3.

¹² Op.Cit, Sujatmiko, xxiv.

wanita dalam serikat buruh, sayap perempuan dalam partai politik, aktor-aktor individu maupun kelompok pakar); dan (4) kelompok-kelompok akar rumput.¹³

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa salah satu komponen penting dalam gerakan feminis adalah NGO sebagai aktornya. PBB mendefinisikan NGO atau LSM sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Istilah NGO ini diterapkan pada organisasi non-profit yang bebas dari pemerintah. NGO merupakan organisasi yang berbasis nilai secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan yang sukarela. Jadi, prinsip altruisme dan voluntarisme ditetapkan sebagai defenisi karakter kuncinya. NGO meliputi semua organisasi yang berada di luar struktur atau jalur formal pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau bagian dari birokrasi pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, NGO dapat mendorong perubahan sosial.¹⁴

MUNCULNYA GERAKAN FEMINISME DI DUNIA

Gerakan feminis telah terjadi sejak beberapa abad silam yang bermula di Eropa pada Era Pencerahan. Lady Mary Wotrley dan Marquis de Condorcet merupakan pelopornya. Mereka melakukan upaya perjuangan hak wanita di Middleburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Karena tidak mendapat dukungan yang maksimal, gerakan ini kemudian seolah terhenti.¹⁵ Gerakan feminis muncul kembali sekitar satu abad kemudian, bertepatan dengan meningkatnya industrialisasi setelah terjadinya revolusi industri. Ketidakpuasan atas kondisi ketidakadilan terhadap wanita ketika itu dituangkan oleh Simone de Beauvoir, seorang filsuf Perancis dalam karya pertamanya yang berjudul *The Second Sex*. Dua puluh tahun setelah kemunculan buku itu, barulah pergerakan wanita di Barat mengalami kemajuan pesat.¹⁶

Gerakan feminis awal telah berlangsung di Eropa. Namun perkembangannya belum begitu signifikan. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini kemudian merambah ke Amerika dan berkembang sejak publikasi John Stuart Mill yang berjudul *The Subjection of Women*, pada tahun 1869. Setelah berlangsung di AS, gerakan

¹³ *Ibid*, 100.

¹⁴ Indra Bastian, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), 8-9.

¹⁵ Soenarti Djajanegara, *Kritik Sastra Feminis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 1-14.

¹⁶ *Ibid*.

wanita memasuki momentum perkembangan pesat dalam sejarah. Perjuangan wanita di AS menandai lahirnya gerakan feminisme gelombang pertama di dunia. Namun sekitar tahun 1920-1930 wanita AS cenderung kembali ke lingkungan domestik, tidak ikut bersaing dengan kaum pria dalam bidang politik maupun bisnis, dan mengalihkan perhatian ke bidang kesejahteraan wanita dan anak yang meliputi bidang pendidikan dan kesehatan. Semenjak masa itu, gerakan wanita seolah mengalami masa stagnansi.¹⁷

Gerakan feminis kembali berkembang sekitar tahun 1960-an. Kali ini tidak hanya negara-negara Barat seperti AS dan beberapa negara Eropa saja yang terdorong untuk menggalak kembali gerakan tersebut. Gerakan pada periode ini disebut sebagai gerakan feminisme Gelombang Kedua. Gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis).¹⁸

Gerakan feminisme gelombang kedua yang berlangsung di AS ternyata lebih keras gaungnya ketimbang di Eropa. Terbitnya buku *The Feminine*

Mystique yang ditulis oleh Betty Friedan (ahli sosiologi dan aktivis feminisme) pada tahun 1963 berdampak luas bagi gerakan wanita di seluruh dunia. Sukses dengan tulisannya, Betty Friedan kemudian mendirikan suatu organisasi wanita yang bernama *National Organization for Women (NOW)* tahun 1966. Organisasi non-pemerintah ini cukup berpengaruh, dan merambat ke segala bidang.¹⁹ NOW memiliki jangkauan kerja dan pengaruh di level nasional. NOW merupakan NGO feminis terbesar di dunia. Prestasinya dalam perjuangan wanita di dunia, berhasil membawa persoalan wanita ke PBB, dan NOW juga merupakan organisasi aktifis feminis yang terbesar di PBB.²⁰

Gerakan feminis gelombang kedua terutama yang terjadi di AS telah berhasil membuatnya bergaung ke seluruh dunia. Walaupun secara spesifik perjuangan kaum feminis banyak dilakukan oleh individualis kulit putih untuk menuntut haknya di negara masing-masing, namun mereka juga mengarahkan perhatian dan penelitiannya pada wanita-wanita di dunia ketiga, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

¹⁹ Diperoleh dari <http://www.now.org/> diakses tanggal 12 April 2011.

²⁰ Jennifer Tripp, "National Organization for Women", diperoleh dari <http://learningtogive.org/papers/paper200.html> diakses tanggal 12 April 2011.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Hal itu menjadikan gerakan feminis semakin di kenal di dunia.²¹

PENGARUH FEMINISME GLOBAL TERHADAP NEGARA-NEGARA DI DUNIA

Munculnya gerakan feminis di tingkat internasional dan terbentuknya feminisme global, tak terlepas dari kontribusi perjuangan wanita di negara maju. NGO perjuangan wanita di negara maju, terutama NOW AS, telah berhasil membawa persoalan wanita sebagai pembahasan penting di PBB. Perjuangan wanita mendapatkan momentum penting dan masuk dalam pembahasan internasional pertama kali pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) PBB. CEDAW merupakan bagian dari konvensi HAM PBB yang diselenggarakan tahun 1979. Dengan terselenggaranya CEDAW, artinya secara *de jure* pergerakan wanita seluruh negara di dunia telah mendapatkan pengakuan.²² Secara sederhana, pesan yang dapat ditangkap dari konvensi CEDAW adalah, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak wanita adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²³ Konvensi

CEDAW PBB adalah tonggak awal sekaligus merupakan bentuk legitimasi internasional terhadap upaya perjuangan gerakan feminis seluruh negara di dunia.²⁴

Pola pergerakan wanita secara global dipengaruhi oleh sistem dan geopolitik dominan yang berlangsung dalam HI. Pada dekade 1980-an, NGO sudah mulai muncul dan berpengaruh terhadap pergerakan wanita di tingkat global. Selanjutnya, pada dekade 1990-an, peranan NGO menjadi semakin kuat dirasakan dalam pergerakan-pergerakan wanita maupun pergerakan sosial lainnya. Dunia internasional sedang memasuki era globalisasi ketika itu, telah memunculkan NGO sebagai kekuatan tersendiri yang berpengaruh signifikan. Di tingkat global, NGO menjadi salah satu aktor internasional yang mampu mempengaruhi keputusan melalui pengguliran isu-isu tertentu, termasuk feminisme. Demikian pula halnya dengan wilayah domestik. NGO semakin berkembang dan menjadi salah satu kelompok yang dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.²⁵

Berbagai perkembangan internasional secara komprehensif memberikan atmosfer positif terhadap

²¹ Djajanegara, 1-14.

²² Goran Melander dan Gudmundur A, *The Raoul Wallenberg Compilation of Human Rights Instruments*, (London : The Hague, 1997), 18.

²³ Rebecca J.Cook (ed)., *Human Rights of Woman, National and International Perspective*,

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994), 634.

²⁴ Peggy Antrobus, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, (New York: Palgrave, 2004), 17-18.

²⁵ *Ibid*, 135.

gerakan feminis. Masuknya feminisme dalam agenda HI memberikan pengaruh kepada negara-negara di dunia. Hampir seluruh negara di dunia berupaya untuk membangkitkan kesadaran terhadap pentingnya gerakan feminis bagi kesinambungan pembangunan dan penghargaan terhadap HAM serta menyesuaikan dengan lingkungan global maupun internasional.

Keberhasilan negara maju dalam mengangkat gerakan feminis menjadi agenda global menjadi inspirasi signifikan bagi kemunculan dan perkembangan gerakan-gerakan feminis di negara-negara sedang berkembang. Kehadiran ribuan utusan dari negara-negara sedang berkembang pada konvensi wanita se-dunia yang terselenggara, menunjukkan bentuk kesadaran dan keseriusan mereka dalam upaya menuntut haknya. Selain itu pertumbuhan NGO-NGO gerakan feminis yang signifikan menunjukkan kuatnya pengaruh feminisme global terhadap negara-negara di dunia. Tidak hanya negara-negara maju, eksistensi feminisme di tingkat global telah memberikan pengaruh terhadap pergerakan feminis di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

PENGARUH FEMINISME GLOBAL TERHADAP GERAKAN FEMINIS DI INDONESIA

Secara internal Indonesia mengenal beberapa tokoh perempuan seperti R.A. Kartini, Tjut Nyak Dien, dan beberapa tokoh lainnya yang telah disebut sebagai tonggak pergerakan perempuan di Indonesia. Namun pada kenyataannya pergerakan mereka belum melembaga dalam bentuk-bentuk yang terorganisir dengan rapih, sehingga belum memberikan hasil signifikan. Menurut Murniati, "Kemajuan penting dalam gerakan feminis di Indonesia dimulai setelah adanya gerakan feminis di lingkungan eksternal yang muncul berdasarkan pemikiran-pemikiran besar di dunia"²⁶. Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa peningkatan gerakan feminis di Indonesia tak terlepas dari kondisi gerakan feminis yang berlangsung di tingkat internasional.

Jika dilihat dari sejarahnya, tonggak gerakan feminis di Indonesia baru dimulai pada permulaan abad ke-20, yaitu mula dibentuknya gerakan secara modern. Hal ini dikarenakan bentuk gerakan tersebut ditandai oleh tumbuhnya organisasi-organisasi wanita yang diikuti oleh proses perkembangan organisasi-organisasi gerakan

²⁶ A. Nunuk P. Murniati, *Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004), xiii.

kebangsaan Indonesia pada waktu itu.²⁷ Selain itu, perhatian secara akademik dan terorganisir terhadap gerakan feminis di Indonesia dimulai saat munculnya Pusat Studi Wanita (PSW) awal tahun 1970-an, dimana PSW adalah NGO gerakan feminis di Indonesia. Munculnya PSW adalah implementasi yang dilakukan delegasi wanita Indonesia setelah mengikuti *World Women's Conference* di Mexico tahun 1975. Pemikir-pemikir wanita di Indonesia berupaya untuk mengikuti kecenderungan yang terjadi di lingkungan global. Setelah tiga tahun diperbincangkan, lobi mereka terhadap pemerintah akhirnya mendapatkan respon dengan dimasukkannya wanita dan pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) III pada 1978-1983.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa lingkungan internasional secara langsung maupun tidak berkontribusi besar terhadap gerakan feminis di Indonesia. Perkembangan feminis di lingkungan internasional turut mempengaruhi efektifitas pergerakan dan reaksi pemerintah di lingkungan internal

Indonesia. Selain itu, NGO berperan penting dalam gerakan feminis di Indonesia, karena gerakan feminis secara terorganisir baru dilakukan setelah terbentuknya gerakan feminis secara modern yakni melalui organisasi.

Dalam perjalanannya, organisasi perempuan Indonesia untuk pertama kalinya mengikuti Kongres Perempuan Internasional di Lahore, Januari 1931. Pada kongres itu perempuan Indonesia mulai mengetahui ternyata organisasi perempuan di negara lain tidak mengesampingkan masalah politik, dan bahkan mulai menggiring masalah politik menjadi persoalan utaman. Semejak mengikuti kongres itu, selanjutnya kongres perempuan yang berlangsung di internal Indonesia mulai memikirkan masalah politik dan partisipasi bersama laki-laki untuk melawan penjajah, dan NGO²⁹ pun semakin tumbuh berkembang.³⁰

Pada masa Orde Baru (Orba), walaupun berkembang namun gerakan feminis tidak dapat leluasa karena "terkungkung" oleh kondisi rezim yang sepenuhnya berada dalam pengawasan

²⁷ Sulistyowati Irianto dan Titiek Kartika Hendrastiti, *Buku Panduan tentang Gender di Parlemen* (Jakarta: Sekjen DPR RI dan UNDP, 2003), 9.

²⁸ Nahiyah Haidi "Country Institutional Report: Indonesia", dalam *Women's/gender studies in Asia-Pacific Thailand*, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2004, 73.

²⁹ NGO wanita yang muncul saat itu adalah Istri Sedar. Organisasi Istri Sedar itu selanjutnya berganti nama menjadi Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) di tahun 1940, dan selanjutnya beruban menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) tahun 1954 dengan anggota lebih dari satu juta orang di tahun 1961. Sayangnya organisasi ini terpecah dua akibat adanya pengaruh PKI. Pergantian rezim Orde Lama (Orla) menjadi Orde Baru (Orba) membuat Gerwani juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

³⁰ *Op.cit*, Murniati, 17-19.

dan kontrol pemerintah. Akan tetapi, gerakan perempuan yang berlangsung di tingkat global ternyata tidak mampu memasung gerakan perempuan yang berada dalam kontrol penuh pemerintah Orba. Tahun 1978 PBB mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk Kementerian Urusan Wanita. Walaupun kementerian ini kurang bekerja secara efektif, tapi dampak positifnya mampu memberi pengaruh bagi gerakan perempuan di Indonesia. Terlebih setelah berlangsungnya CEDAW yang pertama, pemerintah “terpaksa” harus membuka pintu kebebasan bagi wanita hingga akhirnya Indonesia meratifikasi CEDAW melalui keluarnya UU No 7 tahun 1984, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW berkontribusi relatif besar terhadap perjuangan gerakan feminis Indonesia di masa Orba. Pasca CEDAW, di pertengahan dekade 1980-an berbagai NGO bermunculan kembali, dan mulai melakukan gerakan feminis di segala aspek kehidupan, seperti perburuhan, pertanian, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, advokasi, litigasi, dan informasi mengenai masalah perempuan.³¹

Sejarah pergerakan kaum perempuan Indonesia telah membuktikan peran NGO. Bahkan,

kemunculan NGO perempuan terjadi ketika berbagai gerakan masyarakat berada dalam kontrol ketat pemerintah. Semangat gerakan perempuan di Indonesia yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, rupanya tidak padam dalam diri kelompok perempuan di Indonesia, meskipun berada dalam “pasungan” rezim Orba yang sangat berada dalam kontrol ketat pemerintah. Namun kondisi itu dapat dilalui oleh NGO wanita di Indonesia.³²

Masa Orba dapat dikatakan kendala bagi gerakan feminis Indonesia. Hal itu terjadi karena pemerintah menggunakan PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) sebagai wadah satu-satunya gerakan perempuan dalam pembangunan di masyarakat. Ketika organisasi perempuan independen, dengan status pribadi perempuan, dikoordinasi dan dipayungi oleh Kowani (Korps Wanita Indonesia), tak ada lagi pergerakan perempuan yang benar-benar independen untuk menentukan sendiri langkah-langkah dan agenda-agenda perjuangannya. Dua organisasi itu, ketua dan pengurus intinya ditentukan oleh hierarki sosial yang ditentukan oleh suami mereka (jabatan suami sangat menentukan posisi dalam kepengurusan dua organisasi ini). Dalam Kowani, bahkan para pengurus intinya berasal dari organisasi perempuan

³¹ *Ibid*, 20-21.

³² *Ibid*, 22.

dependen yang sistem keanggotaannya atas dasar status mereka sebagai istri.³³

Untungnya, situasi seperti itu tidak berlangsung permanen. Dominannya pembahasan persoalan seputar gender di lingkungan global memberikan pengaruh tersendiri bagi gerakan feminis di Indonesia. Ketika dunia dan negara-negara yang tergabung dalam PBB sudah membicarakan Gender and Development (GAD), Indonesia masih berputar-putar dalam Women in Development (WID)³⁴. Situasi di lingkungan internasional membuat Indonesia “dipaksa” untuk turut mengikuti cara pandang GAD. Pergerakan pemikiran GAD terakumulasi dalam Kongres Perempuan Se-dunia yang diselenggarakan PBB setiap lima tahun sekali. Kongres perempuan tersebut memiliki imbas yang sangat nyata dalam aktifitas dan pemikiran para aktivis NGO gerakan perempuan di

Indonesia. Apalagi setelah Indonesia maratifikasi CEDAW (1981) atas desakan PBB dalam mendorong lahirnya Kementerian Urusan Perempuan (1978), hingga kemudian Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan.³⁵

Wawasan dan tujuan pergerakan dalam NGO³⁶ tersebut secara umum mengikuti suara pergerakan wanita di tingkat internasional yakni masyarakat yang demokratis dan berkeadilan gender. Berbagai NGO wanita yang tersebar luas di seluruh bagian di Indonesia tersebut memiliki jaringan kerja yang luas, koneksi dengan NGO di tingkat internasional, dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sangat komprehensif untuk memperjuangkan persoalan-persoalan perempuan. Beberapa materi yang diperjuangkan dan dikembangkan NGO dalam proses pendampingan dirancang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kaum perempuan Indonesia, serta dengan penyesuaian-penyesuaian agenda gerakan wanita di lingkungan

³³ *Ibid*, 23.

³⁴ Ada tiga istilah keterlibatan wanita dalam pembangunan. Women in Development (WID), Women and Development (WAD) dan Gender and Development (GAD). WID menganggap perempuan sebagai masalah karena tidak mampu bersaing dengan laki-laki, dan oleh karena itu harus dilakukan peningkatan potensi, posisi perempuan masih sangat marginal. WAD setingkat lebih memperhatikan posisi perempuan, dan telah berfokus pada hubungan perempuan dan pembangunan yang melihat laki-laki kelas bawah di dunia ketiga juga tertindas oleh struktur masyarakat internasional yang tidak adil. Sedangkan pemikiran tentang GAD muncul dari teori sosial yang dikemukakan Frederich Engels yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki peranan penting dalam pembangunan dan saling ketergantungan. Pendekatan GAD ini muncul dari cara pandang holistik.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ NGO wanita yang muncul pada tahap ini: Yayasan Annisa Swasti (Yasanti), Kalyanamitra, Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP), Perserikatan Kelompok Perempuan Sadar (KPS), RUMPUN, Yayasan TjutNja' Dien, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Lembaga Bantuan Hukum APIK, Yayasan Kesejahteraan Fatayat, WCC dan WIC Suara Nurani Perempuan Yabinkas, KAKAK, YLKI, dan masih banyak lagi.

internasional, terutama pada program-program yang diselenggarakan PBB.

Pada awalnya berbagai NGO gerakan perempuan di Indonesia berjalan sendiri-sendiri, sehingga tidak jelas arah dan tujuannya. Keruntuhan rezim Orba yang berganti menjadi rezm reformasi memberikan apresiasi tersendiri terhadap gerakan perempuan. Jaringan kerja NGO gerakan perempuan di Indonesia makin meningkat, dan menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Indonesia telah bangkit kembali. Peningkatan jaringan kerja NGO yang berproses dan berkelanjutan bukan saja dengan menjalin jaringan internasional, melainkan lebih penting dari itu adalah jaringan kerja secara nasional, untuk secara serentak berjuang menegakkan keadilan gender.³⁷

Ada begitu banyak pertemuan internasional – yang diselenggarakan PBB – yang memberikan pengaruh terhadap gerakan feminis di Indonesia. Pertemuan tersebut diawali oleh Seminar tentang Peningkatan partisipasi perempuan Asia dalam kehidupan publik di Bangkok pada tahun 1957, dan dilanjutkan oleh banyak pertemuan besar di berbagai kota di dunia sampai hari ini. Isu yang diagendakan sangat beragam, di antaranya adalah keikutsertaan perempuan dalam pembangunan, hak politik perempuan, hak-hak perempuan

dalam ekonomi, sosial, ketenagakerjaan, perempuan di pedesaan, masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan bagi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan perempuan, situasi perempuan di daerah konflik, situasi perempuan di kawasan Afrika, Asia dan Pasifik, dan banyak lagi. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga dicanangkan program bersama, kesepakatan internasional, dan bahkan instrumen hukum yang harus dipatuhi oleh negara-negara peserta dan penandatangan. Di pertemuan-pertemuan penting tersebut, yang terpenting adalah: (a) ICPD (Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan Kairo-Mesir (1994), (b) Beijing 1995, (c) Beijing Plus Five (New York, 2000), (d) Beijing Plus Ten (New York, 2005), dan (e) jaringan regional seperti APWLD (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development) yang setiap tahun mengadakan pertemuan.³⁸

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan warga dari komunitas internasional, Indonesia terikat dalam berbagai kesepakatan dan hukum internasional. Apalagi bila Indonesia menyatakan diri sebagai negara penandatangan, dan meratifikasinya, itu berarti Indonesia berkewajiban memastikan bahwa

³⁷ *Op.cit*, Murniati, 30.

³⁸ *Ibid*.

prinsip-prinsip dari hukum dan kesepakatan internasional itu terakomodasi dalam berbagai peraturan perundangan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Bila ratifikasinya melalui Undang-Undang, itu berarti Konvensi Internasional, menjadi sumber hukum nasional, dan kedudukannya setara dengan Undang-Undang. Apabila ada Konvensi yang belum diratifikasi oleh Indonesia, maka sebagai negara anggota PBB, Indonesia tetap terikat secara moral untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut.

Berikut ini adalah beberapa hukum, dan kesepakatan internasional terpenting, yang mengikat Indonesia dalam gerakan feminis: (a) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), (b) Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (1956), (c) Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1993), (d) Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi atau Platform for Action (2005), (e) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau CEDAW (1979), (f) Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990), (g) Konvensi Palermo (2000), (h) Deklarasi Millenium Development Goals (MDG's).³⁹

Berdasarkan pengaruh situasi internasional yang telah memunculkan

peran penting feminisme global, telah menghasilkan banyak pencapaian bagi gerakan feminis di Indonesia. Kesemua itu sangat sulit dilepaskan dari peran-peran NGO berbasis feminis yang ada pada berbagai kelompok dalam masyarakat.⁴⁰ Secara legal, perjuangan gerakan feminis Indonesia yang dipengaruhi oleh situasi internasional telah memberikan hasil (pencapaian) dalam berbagai bentuk peraturan hukum (Undang-Undang/ UU), seperti berikut:

1. Konstitusi UUD 1945, Pasal 27 (2), UU No. 7/1984 yang meratifikasi Konvensi CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).⁴¹
2. UU No. 3/1997 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Pasal 45 menyebutkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia).
3. UU No. 23/2000 tentang Peradilan Anak, Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

⁴⁰ Ester Mariani GA, "Partisipasi Politik Perempuan: Antara Kewajiban dan Perjuangan, *Bina Darma*, No. 54, Maret 1997, 94.

⁴¹ Sali Susiana, Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, *Kajian*, Vol 13, No. 3, September 2008, 2

³⁹ *Ibid.* 12-15.

4. UU No. 12/2003 tentang Pemilu, Pasal 65 (1) yang mengatur kuota politik perempuan dalam parlemen.⁴²
5. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6. UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik.
7. UU No.13/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya.
8. UU No. 17/2006 tentang Kewarganegaraan.
9. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi.
10. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
11. Peraturan Kapolri No. 10/2007 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Polisi Resor (Polres) ke atas. Dalam hal ini ditegaskan bahwa PPA harus ada dalam unit kepolisian.
12. Peraturan Presiden No. 7/tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang jelas menyebut agenda kesetaraan dan keadilan gender.
13. Terakhir adalah UU Pemilu No. 10/2008 yang memberikan peluang lebih besar kepada perempuan

untuk menempati kursi di parlemen pusat maupun daerah.

14. UU No.27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.⁴³

Beberapa UU di atas merupakan hasil (capaian) gerakan feminis di Indonesia. Jika menelaah UU tersebut satu per satu, akan terlihat “benang merah” yang membawa pada satu kesamaan persepsi bahwa pengaruh lingkungan internasional dan NGO sebagai salah satu aktor pergerakan, berkontribusi besar terhadap keberhasilan gerakan feminis di Indonesia.

PENUTUP

Dari tulisan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa gerakan feminis awalnya terjadi di Eropa dan AS. Feminisme diimplementasikan dalam bentuk pergerakan sosial yang semakin meluas dan dilakukan oleh beberapa elemen dasar dalam masyarakat sipil, termasuk NGO. Pergerakan yang dilakukan NGO berhasil membawa feminisme masuk ke tatanan internasional dan dari pergerakan marjinal, feminisme bertransformasi membentuk feminisme global. Eksistensinya feminisme global memberikan pengaruh terhadap negara-negara di dunia. Pengaruh itu juga merambah ke Indonesia, dan membentuk gerakan

⁴² Nani Saptarini, "Perempuan dan Politik Lokal", *Wacana*, ELSPPAT, Edisi 30/VIII, 18.

⁴³ Irianto dan Hendrastiti, 10.

feminis Indonesia yang membawa pesan dan tujuan pergerakan relatif sama dengan feminisme di lingkungan global. Selain itu, secara tidak langsung gerakan feminis di Indonesia pada dasarnya juga terkait dengan gerakan

feminis awal yang berlangsung di Eropa dan AS.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Acker, Brooke dkk., *Feminist Methodologies for International Relations*, New York: Cambridge University Press, 2006.
- Antrobus, Peggy, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, New York: Palgrave, 2004.
- Bastian, Indra, *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Yogyakarta: Erlangga, 2007.
- Burchill, Scott, *Theories of International Relations : Feminism*, New York : Palgrave, 2001.
- Connell, R.W. dan James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept", dalam *Gender and Society*, Vol. 19, 2005.
- Cook, Rebecca J. (ed)., *Human Rights of Woman, National and International Perspective, Instruments*, (London : The Hague, 1997), 18.
- Djajanegara, Soenarti, *Kritik Sastra Feminis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Goldstein, Joshua S. dan Jon C. Pavehouse, *International Relations 2006-2007 Edition*, New York: Prisscilla McGeehon, 2007.
- Haidi, Nahiyah "Country Institutional Report: Indonesia", dalam *Women's/gender studies in Asia-Pacific Thailand*, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, 2004.
- Irianto, Sulistyowati dan Titeik Kartika Hendrastiti, *Buku Panduan tentang Gender di Parlemen*, Jakarta: Sekjen DPR RI dan UNDP, 2003.
- Jackson, Stevie dan Jackie Jones, *Contemporary Feminist Theories*, New York: New York University Press, 1998.
- Jenkins, J., Craig dan William Form, "Social Movement and Social Change" dalam Thomas Janoski dkk. (ed.), *The Handbook of Political Sociologi: States, Civil Societies, and Globalization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Jennifer, Tripp, "National Organization for Women", diperoleh dari <http://learningtogive.org/papers/paper200.html>
- Linklater, Andrew, *International Relations Volume: Critical Concepts in Political Science Critical Concepts in Political Science*, Volume IV, New York: Routledge, 2000.

- Mariano, Ester, GA., "Partisipasi Politik Perempuan: Antara Kewajiban dan Perjuangan, *Bina Darma*, No. 54, Maret 1997.
- Susiana, Sali, "Keterwakilan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD", *Kajian*, Vol 13, No. 3, September 2008.
- Saptarini, Nani, "Perempuan dan Politik Lokal", *Wacana*, ELSPAT, Edisi 30/VIII, 18.
- Keohane, Robert O., "Beyond Dichotomy: Conversations between International Relations and Feminist Theory", *International Studies Quarterly*, J Stor, Vol. 42, No. 1. Maret, 1998.
- Melander, Goran dan Gudmundur, A, *The Raoul Wallenberg Compilation of Human Rights*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994.
- Murniati, A., Nunuk, P., *Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
- Parpart, Jane, L., dan Marysia Zalewski, *Rethinking The Man Question: Sex, Gender and Violence in International Relations*, New York: Zed Books, 2008.
- Perwita, Anak, Agung, Banyu, dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Sandilands, Catriona, *The Good-Natured Feminist*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
- Sarah, Elizabeth, "Finding A Feminist Historical Framework: A Review of Feminism in Europe", *Women Studies International Forum*, Vol. 5, No. 6, 1982.
- Steans, Jill, *Gender and International Relations: an Introduction*, Cambridge: Polity Press, 1998.
- Sujatmiko, Iwan, Gardono, "Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat" dalam *Gerakan Sosial Wahana Cevil Society bagi Demokratisasi*, Darmawan Triwibowo ed., Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES, 2006.
- Sylverster, Christine, *Feminist International Relations: Unfinished Journey*, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Ticker J. Ann, *Feminist Perspective on International Relations*, London: SAGE Publications, 2002.

-----, *Gender in International Relations
Feminist Perspectives on Achieving
Global Security*, New York :
Columbia University Press, 1992.

-----, "You Just Don't Understand:
Troubled Engagements
between Feminists and IR
Theorists", *International
Studies Quarterly*, Vol. 41,
No. 4, Desember, 1997.

PENULIS

Denik Iswardani Witarti, Ph.D adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Jeanie Annissa, S.IP, M.Si adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

Ronald Roger Rohrohmana, S.IP adalah Staf FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

DR. Sharifah Syahirah Bt Syed Sheikh dan Rashila Ramli adalah Dosen senior ilmu politik di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia. Pada tahun 2011, memperoleh gelar Ph.D dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Selama ini aktif bergiat dalam politik, pada tahun 2001-2004 menjabat selaku EXCO Pergerakan Puteri UMNO dan Pengerusi Biro Pendidikan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Kini, terlibat aktif dalam beberapa NGO seperti *National Council of Women Malaysia* (NCWO) dan organisasi akademik seperti Persatuan Sains Sosial Malaysia (PSSM), *Southeast Asia Women Studies (Malaysia)* (SAMA), dan anggota International Movement for A Just World (JUST) and *Asian Association of Women's Studies* (AAWS), dan Director, Institute of Occidental Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia and Associate Professor Faculty of Social Science and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia.

Yuni Satia Rahayu, SS, M.Hum adalah Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat ini sedang menyelesaikan S3 di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sejak tahun 2005 - sekarang menjabat sebagai Direktur Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta.

Yusran, S.IP, M.Si adalah Dosen dan Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut:

❑ Maksud dan Tujuan

Jurnal Transnasional diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur untuk media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan para peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur maupun dari para peneliti lain.

❑ Ruang Lingkup

Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi dan Pembangunan Nasional.

❑ Bahasa

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga Pembinaan Bahasa.

❑ Bentuk Naskah

Naskah diketik pada kertas jenis A4 putih pada satu permukaan dengan jarak 1,5 spasi. Tulisan mempunyai jarak 3 cm dari Atas dan Kiri kertas, Kanan dan Bawah kertas berjarak 2,5 cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Arial ukuran 11, naskah diketik dengan bentuk satu kolom.

❑ Isi Naskah

Naskah disusun dalam urutan: judul (Bahasa Indonesia); Nama penulis: lembaga/instansi; Abstrak (100-150 kata) dalam bahasa Inggris berisi tujuan, metode dan hasil penelitian; Pendahuluan (berisi latar belakang; perumusan masalah; Tinjauan Pustaka; Tujuan penelitian); Metode penelitian (alat, bahan, cara dan metode Analisis); Hasil dan pembahasan; Kesimpulan; Daftar Pustaka, lampiran (jika ada).

❑ Judul Karangan dan Nama Pengarang

Judul karangan berupa suatu ungkapan dalam bentuk kalimat pendek mencerminkan isi dari karangan. Nama lembaga/Instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila Penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan.

❑ Tabel dan Gambar

Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada diatas, sedangkan judul pada gambar berada dibawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomorurut (1,2,... dst).

❑ Daftar Pustaka

Penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama penulis dan diketik 1 spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain.

❑ Alamat Redaksi

Naskah dikirim dalam bentuk file(copy CD) dan 1 print out ke: Redaksi Jurnal Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 252